



JURNAL ILMIAH

MIMBAR DEMOKRASI

Civics and Citizenship Education Journal

EDITORIAL

Editor	i-ii
HEGEMONI IDEOLOGI PENGUASA TERHADAP GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Zulkarnain	1-11
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017 Muhamad Ridwan Effendi & Iqbal Syafrudin	12-27
PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANIMASI TERHADAP MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII SMP ISLAM ALIMUDDIN KABUPATEN PROBOLINGGO Eliya Hakiki Nur Sugini & Abdul Basit	28-31
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKAL Sri Rahayu Pudjiastuti	32-39
PEMANFAATAN MEDIA VISUAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Yulita Pujilestari & Afni Susila	40-47
KOLABORASI KABINET ZAKEN DAN KABINET KOALISI DALAM PEMBENTUKAN KABINET EFEKTIF Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim	48-54

VOLUME 19

NOMOR 2

APRIL 2020

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

dan



Asosiasi Profesi PPKn Indonesia



LPPM UNJ

DEWAN REDAKSI

EDITOR IN CHIEF

Dr. Komarudin, M.Si. (Universitas Negeri Jakarta)

ASSOCIATE/MANAGING EDITOR

Fauzi Abdillah, M.Pd. (Universitas Negeri Jakarta)

EDITORS

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. (Universitas Negeri Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Hj. Etin Solihatin, M.Pd. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Solihin Ichas Hamid, M.Pd. (IAPCEP & Universitas Pendidikan Indonesia)

Mohammad Maiwan, Ph.D. (Universitas Negeri Jakarta)

Asep Rudi Casmana, S.Pd., MA. (Universitas Negeri Jakarta)

REVIEWERS:

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si. MH. (IAPCEP & UPI)

Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd. (IAPCEP & Universitas Lampung)

Dr. Achmad Husen, M.Pd. (IAPCEP & Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd. (IAPCEP & Universitas Negeri Jakarta)

Hertanto, Ph.D. (Universitas Lampung)

Dr. Heri Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Dr. Mutrofin, M.Pd. (Universitas Negeri Jember)

Dr. Sarkadi, M.Si. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Susan Fitriasari, M.Pd. (IAPCEP & Universitas Pendidikan Indonesia)

Nurul Febrianti, M.Pd. (Universitas Esa Unggul)

Ludovikus Bomans Wadu, M.Pd. (Universitas Kanjuruhan Malang)

Meidi Saputra, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)

Khuswatun Hasanah, S.Pd., M.I.P. (UPN Veteran Yogyakarta)

Beny Dwi Lukitoadji, M.Pd. (Universitas PGRI Yogyakarta)

Feriyansyah, M.Pd. (Universitas Negeri Medan)

Administrator : Fauzan Fuadi, S.Pd. (Universitas Negeri Jakarta)

Alamat Redaksi

Jln. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Kampus Universitas Negeri Jakarta,

Gedung K, Lantai II, Ruang 208, Kantor Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial

Telp./Fax: (021) 47882930

Email: jmd@unj.ac.id

<https://doi.org/10.21009/jimd>

Diterbitkan atas kerja sama

Program Studi PPKn FIS UNJ

dan

Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Volume 19, Nomor 2, April 2020

DAFTAR ISI

EDITORIAL	
Editor	i-ii
HEGEMONI IDEOLOGI PENGUASA TERHADAP GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
Zulkarnain	1-11
PERTALIAN AGAMA PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017	
Muhamad Ridwan Effendi & Iqbal Syafrudin	12-27
PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANIMASI TERHADAP MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII SMP ISLAM ALIMUDDIN KABUPATEN PROBOLINGGO	
Eliya Hakiki Nur Sugini & Abdul Basit	28-31
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKAL	
Sri Rahayu Pudjiastuti	32-39
PEMANFAATAN MEDIA VISUAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	
Yulita Pujilestari & Afni Susila	40-47
KOLABORASI KABINET ZAKEN DAN KABINET KOALISI DALAM PEMBENTUKAN KABINET EFEKTIF	
Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim	48-54

Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi

Diterbitkan atas kerja sama

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

dan

Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Editorial: Transfigurasi dan Aksentuasi Jurnal di Tahun 2020

Para pembaca yang budiman, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi menerbitkan artikel hasil penelitian, artikel gagasan, dan ulasan buku yang termasuk pada ruang lingkup kajian disiplin ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Saat ini Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi secara *online* telah terindeks pada Google Scholar, Portal Jurnal Garuda, Crossref, Sinta dan lain sebagainya.

Pada tahun 2019, melalui Surat Keputusan No. 36/E/KPT/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), telah menyatakan bahwa Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi telah **terakreditasi** pada peringkat Sinta 5 mulai Volume 17 No. 1 2018 sampai Volume 21 No. 2 tahun 2022.

Editorial kali ini juga dimanfaatkan sebagai media informasi bahwa telah terjadi transfigurasi atau perubahan pada beberapa aspek di Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Perubahan pertama adalah pergantian dan perubahan susunan Dewan Editor atau Editorial Boards dan Reviewers atau Mitra Bestari. Perubahan susunan dan penambahan Editor maupun Reviewer dilaksanakan dengan pertimbangan kepakaran, jejak publikasi, dan mengoptimalkan peran asosiasi profesi untuk berkontribusi pada proses penerbitan jurnal.

Selain pada susunan tersebut, perubahan juga dilakukan untuk gaya selingkung atau *template* jurnal dengan tujuan aksentuasi dengan kebutuhan publikasi daring. Perubahan logo jurnal dan tampilan website *OJS* Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi juga terjadi mulai edisi ini. Pengembangan-pengembangan lain akan dilakukan secara kontinyu untuk memenuhi standard yang ditetapkan dalam rangka optimalisasi jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara online. Demikian kami menyampaikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.

Pada edisi kali ini, kami telah menentukan untuk menerbitkan enam buah artikel yang memenuhi standar minimal penerbitan dan memiliki dampak untuk memperkaya kajian PKn. Memperkaya pengalaman praktis PKn dengan tujuan untuk mengombinasikan fakta, nilai, dan strategi sehingga kajian PKn bisa terus terbentuk. (Levine, 2014) Kita bisa mengikuti lima prinsip untuk pengembangan *Civic Studies*, antara lain (1) belajar dari kolaborasi, karena kita perlu melakukannya secara interaktif dan deliberatif; (2) rendah hati, untuk mengakui keterbatasan intelektual; (3) kritik internal, agar menjadi norma komunitas untuk melakukan *intellectual engagement* sebagai upaya ilmiah bersama; (4) menyudahi pencarian akar permasalahan, karena lebih baik menyelesaikan yang di permukaan daripada pencarian akar masalah yang tak kunjung berhasil, dan; (5) bergandengan tangan, karena bisa jadi perubahan arah bisa terjadi dengan cepat untuk menuju arah kondisi ideal (Levine, Civic studies, 2018). Prinsip ini diadaptasi sebagai kontribusi perkembangan keilmuan.

Secara khusus, perkembangan tersebut dimulai dari: *Pertama*, sisi praksis yaitu inovasi strategi, model, dan temuan-temuan lainnya yang mutakhir untuk peningkatan kualitas pembelajaran PPKn. *Kedua*, pengembangan keilmuan PPKn dengan memperkaya pemahaman materi, cakupan, dan prospek pengembangan konten. Maka, melalui kedua faktor tersebutlah tim editor yang dibantu oleh para reviewer mengeluarkan rekomendasi untuk menerbitkan artikel terpilih tersebut.

Selayang Pandang Terbitan

Artikel pertama ditulis oleh **Zulkarnain** yang membahas bagaimana hegemoni negara mempengaruhi kurikulum dan praktik pendidikan kewarganegaraan di Singapura. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah Singapura melalui kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam upaya menjaga *status quo*, tidak berhasil seperti apa yang diharapkan. maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya benar persepsi yang mengatakan guru terhegemoni oleh negara meskipun kontrol ketat dilakukan oleh pemerintah dan begitu juga dengan guru PKn Singapura meskipun telah mendapat pelatihan.

Artikel kedua ditulis oleh **Muhamad Ridwan Effendi & Iqbal Syafrudin** yang menguraikan tentang hubungan antara agama dan politik yang terjadi di DKI Jakarta dalam kerangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017 lalu sebagai salah satu saluran demokrasi di Indonesia. Kajian ini

menunjukkan bahwa proses demokrasi yang tengah berjalan telah memunculkan politik identitas agama dalam Pilkada DKI Jakarta. Penggunaan isu yang berlandaskan agama disebutkan sebagai salah satu bukti untuk menjustifikasi bahwa agama dan politik tidak dapat dilepaskan, keduanya saling mengisi satu sama lain, meskipun di antara agama dan politik memiliki ciri yang dapat membedakan keduanya.

Eliya Hakiki Nur Sugini & Abdul Basit menyampaikan hasil penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo. Para penulis berharap penggunaan media pembelajaran berbasis animasi dapat membantu proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ada pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo.

Artikel keempat merupakan karya **Sri Rahayu Pudjiastuti** yang bertujuan untuk memberi kontribusi pemikiran, gagasan dan strategi dan upaya dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mencegah perkembangan paham radikal. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara; penguatan sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama. Penulis menyampaikan bahwa kewaspadaan masyarakat dalam menangkalkan penyebaran paham-paham radikal.

Yulita Pujilestari & Afni Susila melalui artikel penelitiannya mengungkapkan media visual dapat mempermudah guru dalam memberikan materi alam pembelajaran, media visual menampilkan gambaran konkret suatu materi, media visual juga dapat memusatkan motivasi siswa dalam belajar dan siswa mudah mengerti materi pelajaran, serta merangsang keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Artikel penutup edisi kali ini oleh **Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim** yang mengungkapkan gagasannya dalam mencari formulasi kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi. Setidaknya penulis menawarkan empat macam bentuk kolaborasi yang di antaranya; (1) harus ada kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi, (2) adanya pembagian kekuasaan atau power sharing yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli, (3) perlu penegasan Presiden kepada partai politik untuk memberikan kader terbaiknya yang memiliki keahlian dibidangnya untuk duduk sebagai menteri, (4) Kabinet Zaken bisa di pilih oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing.

Demikian paparan singkat artikel yang dipublikasikan Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi edisi kali ini. Semoga bisa menambah khazanah disiplin keilmuan PKn secara epistemologis yang konseptual-struktural sehingga dapat memantapkan sebagai sistem pengetahuan terpadu (Somantri & Winataputra, 2017). Harapan kami, kontribusi pemikiran dan pengujian keilmuan bisa menjauhkan PKn dari *discrepancy* (penyimpangan) yang menimbulkan kabut sehingga mempersulit kita dalam melihat kelemahan-kelemahan PKn (Wahab & Sapriya, 2011). Kita perlu berkolaborasi untuk menyibak cakrawala keilmuan PKn dengan kontribusi akademis yang bermakna. Semoga kebermaknaan itu juga terdapat di edisi kali ini. Selamat membaca!

Referensi

- Levine, P. (2014). The Case for Civic Studies. In P. Levine, K. E. Soltan, & B. Checkoway (Ed.), *Civic Studies*. Washington DC, Washington, USA: Bringing Theory to Practice.
- Levine, P. (2018). Civic studies. *Philosophy and Public Policy Quarterly*, 32(1), 29-33.
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis dan Pedagogis*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Fauzi Abdillah

^a Managing Editor, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi
Universitas Negeri Jakarta
abdillah@unj.ac.id

 <https://orcid.org/0000-0001-6024-0610>

Hegemoni Ideologi Penguasa terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Zulkarnain^{a, 1*}

^a Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ Zulkarnainmuhsinin@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

07-12-2017

Disetujui:

02-04-2020

Kata kunci:

Pendidikan
Kewarganegaraan
Guru
PAP
Hegemoni
Singapura

Keywords:

Citizenship education
Teacher
PAP
Singapore
Hegemony

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis Pendidikan Kewarganegaraan di Singapura secara kritis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu agenda nasional di Singapura memiliki kedudukan penting dalam memberikan pemahaman kewarganegaraan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda untuk masa depan Singapura. Sistem pendidikan Singapura yang terpusat dan kontrol ketat mengakibatkan pendidikan kewarganegaraan sangat rentan terjadi politisasi dan ideologisasi warga negara melalui pendidikan. Bahkan banyak penelitian membuktikan bahwa pemerintah dibawah pemerintahan *People's Action Party* (PAP) menggunakan cara otoriter dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya melalui pendidikan. Upaya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan pemerintahan (*soft authoritarian*) otoriter lunak atau sebagian ahli mengatakan otoriter dengan artian Gramscian yang biasa di sebut "hegemoni". Hegemoni merupakan upaya seseorang atau sekelompok orang (negara) dalam mempertahankan atau dominasi kekuasaannya dengan cara damai bukan dengan cara kekerasan. Dengan penelitian kepustakaan dan metode deskriptif analitis kritis berupa buku dan penelitian relevan, makalah ini ingin menunjukkan bagaimana PAP berusaha menafsirkan ideologinya dengan hegemoni yang dilakukan kepada guru-guru Pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua guru terhegemoni oleh kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang ketat di Singapura.

ABSTRACT

The ideological hegemony of the authorities towards the citizenship education teacher. This paper wishes to conduct a critical analysis of Citizenship Education in Singapore. Citizenship education as one of the national agenda in Singapore has an important position in providing citizenship understanding in order to prepare young citizens for the future of Singapore. Singapore's centralized education system and strict controls lead to highly vulnerable citizenship education politicization and ideologization of citizens through education. In fact, many studies show that the government under the People's Action party (PAP) is using authoritarian ways to defend and perpetuate its power through education. The attempts by the Singapore government with the soft authoritarian government or some experts say authoritarian with the usual Gramscian meaning "hegemony". Hegemony is the effort of a person or group of people (state) in maintaining or dominating his power in a peaceful way not by violence. With literature research and critical analytical descriptive methods in the form of relevant books and research, this paper wants to show how the PAP seeks to interpret its ideology with the hegemony done to teachers of citizenship education. The study concludes that not all teachers are hegemonized by Singapore's strict citizenship education policy..

Copyright © 2020 (Zulkarnain). All Rights Reserved

How to Cite: Zulkarnain. (2020). Hegemoni Ideologi Penguasa terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 1-11. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.4975



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini pendidikan menjadi sangat penting. Karena bekal pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia suatu negara. Sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan merupakan modal yang berharga untuk tetap berdiri tegak ditengah-tengah persaingan global (Supardi, 2013, hlm. 1-2). Dalam membangun suatu negara pendidikan menjadi sebuah keharusan yang mutlak di lakukan negara dalam menunjang cita-cita dan tujuan setiap negara. Setiap negara di dunia memiliki cara tersendiri untuk membangun dan mempersiapkan generasi penerus bangsanya salah satu yang banyak negara gunakan adalah dengan mengembangkan warga negara muda dengan pendidikan.

Dalam sebuah sistem pendidikan ada tiga hal yang sangat mendasar dalam mengembangkan suatu pendidikan nasional suatu negara antara lain: (1) peserta didik, (2) guru, (3), kurikulum. Guru sebagai menyusun proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang sangat penting karena guru merencanakan dan menentukan cara, metode, strategi, model pembelajaran yang akan digunakan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas. dalam proses pembelajaran tiga komponen di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya (Suparlan, 2011, hlm. 11). Setiap system pendidikan nasional suatu negara tentu peran pemerintah sebagai sutradara dibaliknya tidak mungkin terelakkan (Sim, 2008, hlm. 743- 744). Proses perencanaan yang dilakukan oleh guru berdasarkan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah yang berkuasa dan dilakukan pengembangan materi ajar (*Learning material development*) oleh guru atau pendidik. Jika diibartakan maka kurikulum adalah “kitab suci”, maka silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari “kitab suci” yang berupa kurikulum. Secara sederhana kurikulum tidak akan pernah bisa berjalan tanpa ada peran guru dalam proses pembelajaran.

Pendidikan tidak akan pernah jauh dari peran penguasa dalam mengontrol dan mengendalikan pendidikan melalui kebijakn yang dibuatnya. Pembelajaran melalui sekolah merupakan salah satu proses pembentukan pengetahuan. Negara melalui kurikulum nasional seakan berdiri di sisi lain dalam proses pembentukan pengetahuan (Pradipto, 2007, hlm. 221). Berdasarkan beberapa penelitian, negara Singapura merupakan salah satu negara yang mengontrol ketat pendidikannya,

pendidikan kewarganegaraan di bawah kekuasaan Partai tindakan rakyat (*Peoples's Action Party*) (Sim & Print, 2008, hlm. 705,). Hal ini diakibatkan oleh banyak hal salah satunya adalah gejala politik global yang terjadi di berbagai belahan dunia sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pendidikan yang dikontrol secara ketat oleh negara-negara di asia termasuk Singapura (Sim, 2011, hlm. 221). Oleh sebab itu Singapura terus melakukan inovasi kebijakan dalam menjaga stabilitas politik melalui kebijakan pendidikan.

Pengaruh *People's Action Party* (PAP) dalam perkembangan politik, ekonomi dan pendidikan di Singapura tidak bisa terelakkan. Isu ekonomi merupakan sumber utama legitimasi politik PAP sehingga ia mampu bertahan hingga sekarang (Sim, 2011, hlm. 222-223). Dalam menjaga dan menjalankan kekuasaan politiknya PAP menggunakan filosofi “lebih penting membangun kehidupan warga negara baik daripada ideologi politik”. Dengan kata lain ekonomi yang kuata merupakan prioritas utama dalam membangun Singapura. Bahkan ada slogan di Singapura rakyat akan mengikuti apapun aturan yang di buat oleh PAP asalkan rakyat sejahtera. Hal ini mengakibatkan lemahnya rakyat sipil dalam berbagai bidang kebijakan publik (Sim, 2011, hlm. 222). Ketika gejala politik dunia terus berubah, dimana beberapa negara bahkan beganti rezim oleh sebab itu maka pemerintah PAP berusaha memasuki dunia pendidikan untuk tetap menjaga kekuasaanya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang memilik kontribusi dalam menjaga stabilitas politik di Singapura. Hegemoni negara terhadap pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk di kaji karena pendidikan kewarganegaraan tidak pernah lepas dari latar belakang sejarah dan struktur politik suatu negara (Kerr, 1999).

Pembangunan generasi muda suatu negara merupakan salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan diberbagai negara (Kerr, 1999) termasuk negara Singapura. Kemajuan Singapura dalam berbagai hal tidak lepas dari peran pendidikan di negara tersebut. Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah Singapura sejak melepas diri dari Malaysia pada tahun 1965 adalah bagaimana membangun ekonomi yang kuat dan warga negara muda sebagai penerus bangsanya salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan yaitu sejak tahun 1959 dengan sebutan *Ethics* sebelum keluar dari Malaysia pada bulan agustus tahun 1965 (Gopnath & Sharpe,

2004, hlm. 122; Sim, 2011, hlm. 221-222; Lee, 2013). Pendidikan kewarganegaraan di Singapura memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya sejak tahun 1959 ketika masih menjadi bagian dari Malaysia hingga tahun 2010 tercatat 12 kali terjadi perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Singapura (Gopnathan & Bakar, 2013, hlm. 15; Lee: 2013, hlm. 246-248). Sejarah pendidikan kewarganegaraan ini menjadikan Singapura sangat penting untuk di bahas karena setiap negara memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda di setiap negara. Terlepas dari itu Singapura merupakan salah satu representasi kemajuan pendidikan di Asia bahkan di dunia.

Perkembangan suatu pendidikan tidak akan pernah jauh dari kebijakan politik dan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa begitu juga dengan negara Singapura. Sejak melepas diri dari Malaysia hingga sekarang Singapura hanya dikuasai oleh satu partai politik yaitu Partai tindakan rakyat (*People's Action Party*) PAP (Sim, 2011, hlm. 221-222). PAP telah menguasai perpolitikan di Singapura hingga saat ini dan berkuasa penuh atas parlemen di Singapura (Hefner, 2007, hlm. 147). Dominasi politik yang dilakukan oleh PAP tentu membuat para partai oposisi memanggap PAP sebagai partai yang otoriter dalam mempertahankan kekuasaannya. Dominasi yang dilakukan oleh PAP tidak hanya pada ranah politik bahkan pemerintahan di bawah ideologi PAP melakukan intervensi secara ketat kepada guru-guru khususnya guru pendidikan kewarganegaraan di Singapura hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jasmine B-Y. Sim & Murray Print pada tahun 2009 tentang “*Citizenship education in Singapore: kontrolling or empowering teacher understanding and practice?*” dan pada tahun yang sama ia juga mengulas kembali bagaimana hegemoni yang dilakukan oleh negara terhadap pendidikan kewarganegaraan di Singapura dalam artikelnya yang berjudul “*State, Teachers and Citizenship Education in Singapore Schools*”. Pada tahun 2011 Jasmine B-Y. Sim kembali melakukan penelitian tentang “*Sosial studies and citizenship for participation in Singapore: how one state seeks to influence its citizens*” dalam hasil penelitiannya ia mengemukakan bahwa Singapura adalah contoh dari sebuah negara di mana ada kontrol terpusat dari kurikulum sekolah dan di mana para pemimpin politik mempunyai pengaruh langsung terhadap pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui kebijakan pendidikan. Bahkan ada

penelitian yang sangat menarik dan mencengangkan dari pendidikan kewarganegaraan di Singapura yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Yeow-Tong Chia, pada tahun 2016 tentang “*Singapore General Election 2015 and the Role of Citizenship Education*” kemenangan PAP merupakan bentuk representasi dari keberhasilan pendidikan kewarganegaraan di Singapura, karena pendidikan kewarganegaraan di Singapura sebagai instrumen penguatan posisi PAP di mata masyarakat Singapura. Keberhasilan PAP pada tahun 2015 merajai perpolitikan di Singapura merupakan sesuatu yang lumrah karena PKn merupakan kepanjangan tangan dalam membentuk budaya politik di Singapura.

Tindakan otoriter pemerintah Singapura bukanlah negara otoriter biasa namun lebih kepada negara yang hegemonik ala gramscian (lihat Sim, 2011), dimana rakyat tidak merasa terhegemoni (lihat Kalidjernih, 2010) oleh negara, karena segala kebutuhan ekonomi terpenuhi, bahkan warga negara Singapura tidak peduli akan hal tersebut selama negara memberikan fasilitas dan tempat tinggal maka partai yang berkuasa akan tetap di pilih. Singapura sebagai pengusung ekonomi pragmatis sangat rentan terjadi dekadasi loyalitas, patriotisme dan nasionalisme Singapura. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menjaga agar warga negara muda Singapura memahami sejarahnya, cinta tanah airnya, dan loyal terhadap negaranya. Dominasi politik yang dilakukan PAP sangat mempengaruhi setiap sendi-sendi pendidikan, salah satu sendi pendidikan yang sangat penting adalah guru, guru tak luput dari pengaruh kebijakana pedndidikan yang dibuat oleh penguasa (PAP) hal didukung oleh hasil penelitian Mark C. Baidon & Jasmine B. Y. Sim pada tahun 2006 tentang “*Notions of criticality: Singaporean teachers' perspectives of critical thinking in sosial studies*”, dalam artikel ini penulis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Singapura mempengaruhi pemahaman guru tentang “berfikir kritis”. Kurikulum yang diterapkan pada mata pelajaran *sosial studies* (nama PKn sebelum diganti pada tahun 2010 menjadi *Charater and citizenship Education*, Lihat *Ministry of Education*, 2014) sangat menekan guru untuk tidak berfikir kritis terhadap pemerintah. Hal ini semakin menguatkan hubungan antara politik dan pendidikan di Singapura. Dominasi politik satu partai yang mempengaruhi kebijakan pendidikan kewarganegaraan menjadikan pendidikan kewarganegaraan Singapura sangat menarik

untuk di bahasa sebagai rujukan dinamika pendidikan kewarganegaraan internasional.

Berdasarkan latar tersebut artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru, kurikulum, perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Singapura melakukan proses pembelajaran di tengah-tengah hegemoni dengan kontrol ketat yang dilakukan oleh pemerintah di bawah ideology *People's Action Party* (PAP) di Singapura sebagai salah satu negara pendidikan terbaik di Asia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari jurnal dan buku-buku yang memiliki keterkaitan kajian upaya pemerintah Singapura dalam menghegemoni guru pendidikan kewarganegaraan di Singapura.

Hasil dan pembahasan Hegemoni dalam Pendidikan

Upaya teoritis yang dilakukan oleh seorang Antonio Gramsci merupakan suatu produk pencarian hubungan antara teori dan praktik dalam tradisi marxisme. Salah satu teori Gramsci yang populer yang berlandaskan pemikiran Marxisme adalah teori Hegemoni (Amin, 2014:102; Pramono, 2014:75-78; Kalidjernih, 2010:58).

Hegemoni menurut Gramsci akan berhasil jika terjadi sebuah kesepakatan tanpa paksaan, kesepakatan ini tentu hasil dari proses belajar atau dengan kata lain Hegemoni adalah hubungan edukasional (*education realtionship*). Hubungan ini membentuk *civil society* yang terletak dasar-dasar dari kekuasaan. Disinilah peran lembaga-lembaga sosial ideologis, seperti hukum, pendidikan, mass media, agama (Tilaar, 2003, hlm. 77).

Dalam prinsip hegemoni Gramsci ada dua prinsip yang sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan suatu negara antara lain: 1) Perang posisi (*war position*), 2) demokratisasi kehidupan sosial. Secara sederhana hegemoni Gramsci menyatakan bahwa pendidikan sebagai alata perlawanan hegemoni sekaligus sebagai arena hegemoni itu sendiri. Tilaar (2003:121-122) dalam bukunya "kekuasaan dan pendidikan" menyatakan bahwa pendidikan dan hegemoni sangat erat hubungannya. Proses pendidikan yang dikuasai oleh negara merupakan sarana indoktrinasi untuk melestarikan atau melanggengkan kekuasaan yang ada. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa *the hidden curriculum* tampak dengan jelas betapa suatu kelompok atau

kelas dalam masyarakat memasukkan nilai-nilai ideologinya melalui proses pendidikan, meskipun hal ini melanggar aturan konstitusi sekalipun. Pendidikan akhirnya bukan memperdayakan tetapi membuat pembodohan. Salah satu pendidikan yang rentan terjadi pemasukan ideologi penguasa tau kelompok tertentu adalah pendidikan kewarganegaraan.

Selain Gramsci salah satu tokoh pendidikan dunia yang mengkritik keras tentang hegemoni yang dilakukan oleh negara dalam dunia pendidikan adalah Hendry Giroux. Ia mengemukakan bahwa pendidikan lebih dari sekedar reproduksi kebudayaan untuk memperkuat mereka yang sudah kuat dalam masyarakat dan mempertahankan marginalisasi terhadap mereka yang lemah. Seharusnya sekolah menjadi medan untuk melakukan perlawanan, pergulatan, perjuangan kultural, dan penentangan terhadap hegemoni budaya yang melahirkan stigmatisasi, penindasan, dan pengabain sebaian besar manusia (Palmer, 2015, hlm. 526-527; Haryatmoko, 2010, hlm. 187-190). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sekolah seharusnya menjadi medan reproduksi dan transformasi kebudayaan, bukan mereproduksi budaya semata.

Giroux menawarkan pendidikan kritis radikal dalam melawan hegemoni penguasa yang mengontrol ketat suatu pendidikan. Dimana melalui pendidikan radikal para pendidik dan peserta didik mempertanyakan ideology dan kebudayaan siapa yang direpresentasikan dalam suatu kebijakan pendidikan. Hubungan kurikulum, pendidikan dan sekolah dapat saling bertentangan yang perlu dibongkar agar tidak terus menerus mendapat legitimasi. Oleh sebab itu para pendidik dan peserta didik perlu menyelidiki siapa yang membuat kurikulum, untuk siapa kurikulum di buat dan atas kepentingan apa kurikulum dibuat.

Dalam mengembangkan pendidikan kritis Giroux mengatakan bahwa belajar dan mengajar merupakan sebuah aktivitas politik semata (Palmer, 2015, hlm. 531). Dan sekolah merupakan medan perjuangan untuk memperoleh makna dan kekuasaan. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan intelektual transformative yang menggugah kesadaran pendidik dan peserta didik tentang berbagai permasalahan dan membangun kesadaran pendidik dan peserta didik sebagai agen kritis dalam mempertanyakan kebijakan politik dalam dunia pendidikan.

Hegemoni Ideologi dalam Pendidikan di Singapura

Pendidikan sangat erat kaitnya dengan masalah-masalah ideologi, terutama dalam mengembangkan apa yang dianggap nilai yang sesuai dalam masyarakat dan membangun rasa identitas nasional (Bell & Stevenson, 2006). Dalam hal ini ideologi PAP sebagai penguasa politik dan kebijakan pendidikan di Singapura. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pendidikan bilingual (dua Bahasa) dan pendidikan nasionalnya yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan perubahan perilaku warga negaranya (Sim, 2011). Melalui kebijakan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura maka hegemoni akan berlangsung hingga pengajaran pada level sekolah dan kelas-kelas di seluruh sekolah di Singapura.

Michael Apple (2004) dalam bukunya *“Curriculum and Ideology”* menjelaskan bahwa sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan ekonomi (Hidayat, 2013, hlm. 124). Globalisasi yang terjadi berbagai belahan dunia membuat liberalisme berkuasa di berbagai bidang kehidupan salah satunya dunia pendidikan. Pendidikan sangat erat hubungannya dengan struktur kekuasaan di dalam masyarakat dan negara (Arif, 2014, hlm. 122-123). Negara memiliki peran penting dalam menafsirkan ideologinya melalui arena pendidikan dengan jalan kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*), konflik dan alokasi nilai-nilai otoritatif (*authoritative allocation of values*) (Samsuri, 2011, hlm. 42-43). Tidak bisa dipungkiri pendidikan di Singapura tidak lepas dari pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi sejak merdeka dari Inggris dan lepas dari pemerintahan federasi Malaysia pada tahun 1965 (Tan & Chew, 2008, hlm. 147-148). Intervensi politik pendidikan yang dilakukan negara dalam membuat pendidik (guru) mau tidak mau mengikuti apa yang di instruksikan oleh negara. Begitu juga di Singapura dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, para penguasa menggunakan pendidikan untuk menciptakan kesadaran palsu warga negara sehingga warga negara terhegemoni oleh kekuatan ekonomi dan kesejahteraan yang dibangun oleh penguasa yang berkuasa sehingga tidak kritis dalam menanggapi isu sosial, politik dan ekonomi. Bahkan Soek-Fang Sim (2006) dalam artikelnya yang berjudul *Hegemonic authoritarianism and singapore: Economics, ideology and the asian economic crisis* hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah di Singapura (PAP) membuat rakyat Singapura mendukung penuh PAP bahkan saat krisis tahun 1997 yang melanda

Asia pasifik. Penelitian lain yang menunjukkan bahwa dominasi politik PAP di Singapura merupakan hasil hegemoni secara kontinuitas Kenneth Paul Tan, seorang pengajar di *Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore* pada tahun 2012 tentang *“The Ideology of Pragmatism: Neo-liberal Globalisation and Political Authoritarianism in Singapore”*, dalam artikelnya secara tegas mengatakan bahwa dominasi satu partai di Singapura merupakan hasil ideologis yang dilakukan secara kontinu yang menyebarkan retorika pragmatisme untuk menghubungkan gagasan kesuksesan yang mengesankan untuk menarik modal global masuk ke Singapura, namun disisilain untuk tetap menjaga semua itu maka pemerintah PAP harus menjaga stabilitas politik sehingga kekuasaan tetap terjaga.

Pentingnya pendidikan sebagai instrument pencapaian tujuan politik dan sosial merupakan sesuatu yang lumrah (Sim, 2011, hlm. 223). Sehingga penyediaan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai membangun masyarakat yang dicita-citakan. Pemerintah memiliki tugas membangun warga negara muda kearah masa depan negara yang lebih baik, sehingga sekolah menjadi sangat penting dalam membangun hal tersebut. Sekolah menjadi tempat utama pendidikan kewarganegaraan meskipun hal itu juga bisa di dapatkan di keluarga, media dan komunitas lainnya. Dengan kata lain sekolah tetap menjadi sumber utama pendidikan kependudukan bagi kaum muda dan satu jalan di mana pemerintah dapat mempertahankan tingkat kontrol dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, di Singapura pendidikan adalah instrumen utama untuk pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus untuk menumbuhkan loyalitas nasional, patriotisme, rasa memiliki, dan komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam tujuan pembangunan nasional (Sim, 2011, hlm. 224).

Meskipun guru di Singapura “selalu diminta secara ideologis untuk membentuk identitas tertentu”, namun mereka tetap “pembaca” dari kurikulum dan teks dan praktik pedagogik dan, oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk membuat makna dari tafsir mereka sendiri (Nozaki 2005, hlm. 8). Demikian pula, Thornton (2005, hlm. 10-26) dalam bukunya tentang *“Teaching social studies that matter: Curriculum for active teaching”* mencirikan para guru sebagai kurir instruksional instruksional, yang mencerminkan peran mereka yang terkenal sebagai pengendali dari apa yang diajarkan dan bagaimana hal itu diajarkan di kelas. Penjagaan

gerbang guru menyiratkan bahwa ada banyak kemungkinan pendidikan dalam kurikulum studi sosial. Konsekuensinya, sebuah kurikulum bukan sekadar produk yang dikembangkan oleh para ahli sebagai naskah untuk guru tapi juga sebuah kelas di mana kurikulum yang sama dapat disusun dan diajarkan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan guru menafsirkan bahkan kurikulum yang ditentukan.

Hegemoni Negara dalam Pendidikan di Singapura

Pemerintah Singapura di bawah PAP dalam mempertahankan kekuasaannya menggunakan sistem "*soft authoritarianism*" atau otoritariansime lunak. Dalam sistem ini, biasanya negara-negara ini memerintah atas nama konstitusionalisme namun sering menggunakan undang-undang untuk menekan aktivitas politik dari warga negara. Dalam pemerintahan otoriter lunak, negara membangun sebuah sistem pendidikan untuk mendisiplinkan pemilih (warga negara) daripada membangun warga negara yang kritis dan informstif, hal ini disebabkan adanya ketidakpercayaan pemerintah atas warga negara. Dalam system ini tugas warga negara Singapura pasif, hanya bertugas legitimasi rezim yang berkuasa (pemerintah dibawah PAP), sedangkan tugas negara hanya memberikan keamanan dengan cara menyortir warga negara yang merepotkan atau mengusik pemerintahan, bahkan tak segan-segan menegeksekusi orang-rang yang berlawanan dengan politik penguasa. (Mohamed & Turner, 2013, hlm. 339-340; Ardila, 2014, hlm. 1-11; Imam, 2016, hlm. 1-3). Dalam system ini kewajiban warga negara terhadap negara lebih penting dari pada negara kepada warga negara demi kepentingan nasional suatu negara dalam hal ini negara Singapura.

Partai tindakan rakyat (*People's Action Party*) yang kemudian disingkat PAP merupakan satu-satunya partai yang berkuasa dan memiliki kekuasaan penuh atas kendali pendidikan, ekonomi dan politik di Singapura. Sejak keluar dari federasi Malaysia pada tahun 1965 negara Singapura muda saat itu mulai tertatih-tatih dalam membangun ekonomi karena tidak ada sumberdaya alam yang dikembangkan sehingga hanya dengan ekonomi pragmatis agar Singapura tetap bertahan (Ardila, 2014, hlm. 1-3, Sim, 2005, hlm. 62). Diluar keberhasilan PAP dengan kader-kadernya membangun ekonomi Singapura memiliki masalah tidak kalah penting dimana gejolak poilitik dunia dan sikap pragmatisme

warga negara yang mengancam masa depan generasi penerus di Singapura.

Sistem pendidikan terpusat di Singapura, pengembangan kurikulum dimulai di tingkat pemerintahan tertinggi. Pendidikan kewarganegaraan melalui kendaraan studi sosial pada kurikulum 2001 sampai 2010 adalah kurikulum yang direncanakan dengan cermat dengan tujuan yang digambarkan dengan jelas untuk mereproduksi pandangan elit masyarakat Singapura secara budaya. Atau dengan kata lain kurikulum pendidikan merupakan representasi dari ideology penguasa di Singapura (PAP), sehingga ada kesenjangan besar antara apa yang diinginkan untuk terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine B-Y. Sim dan Murray Print pada 2009 tentang "*citizenship education in Singapore: kontrolling or empowering teacher understanding and practice?*" menunjukkan bahwa guru merupakan pintu terakhir dalam pemerintah dalam membangun pengetahuan melalui pandangan elit-elit atau ideology partai penguasa di Singapura.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen inti dari sistem pendidikan Singapura. Sejak tahun 1997, negara Singapura telah berusaha memasukkan elemen kunci kewarganegaraan ke dalam program unik dan komprehensif yang disebut Pendidikan Nasional atau "*national education*" (NE), yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1997 (Sim, 2001, 2011; Sim & Print 2009; Lee, 2013; Ho, 2010). Tiga tujuan utama pendidikan kewarganegaraan dari sistem pendidikan Singapura adalah: mempromosikan kesetiaan kepada negara Singapura, melestarikan tradisi dan nilai budaya dan rasial yang berbeda, dan memelihara harmoni budaya, agama dan rasial (Singapore Ministry of Education, 2004).

Hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dalam hasil penelitian yang di lakukan oleh Li-Ching Ho pada tahun 2010 tentang "*Don't Worry, I'm Not Going to Report You: Education for Citizenship in Singapore*" hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai dan cita-cita negara secara kritis, hal ini dapat dilihat dari tiga tema kunci yang dominan dalam temuan penelitian yakni, cita-cita nasional tentang kemajuan dan consensus, kosep yang ketat dan yang terakhir sangat kurangnya pendapat atau argumentasi yang berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni negara terus

direproduksi oleh guru sebagai pintu terakhir dalam menjaga kekuasaan pemerintah dan menekan agar warga negara tidak kritis dalam menanggapi isu-isu nasional.

Secara umum hegemoni melalui pendidikan kewarganegaraan di Singapura dapat dilihat dari agenda Pendidikan Nasional “*National Education*” (NE). NE merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di Singapura. Kewarganegaraan dalam konteks Pendidikan Nasional bersifat nasionalistik dan komunitarian yang merupakan interpretasi dari ideologi partai penguasa (PAP) atau lebih dekat dengan tradisi negara republik yang menekankan tanggung jawab dan tugas, dan mengeyampingkan kepentingan individu demi kebaikan bersama dan ranah publik. Ini bertentangan dengan tradisi kewarganegaraan liberal yang menekankan status, Dan hak individu yang terkait dengannya, di mana hak-hak ini dilindungi oleh batas-batas konstitusional kekuasaan pemerintah (Kymlicka, 2002). Pendidikan Kewarganegaraan terlihat dalam pelayanan kepada bangsa, budaya bersama dan nilai-nilai bersama, yang mencerminkan pemerintah mengejar pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi kebutuhan nasional negara Singapura. Persoalannya adalah bagaimana mendamaikan kebutuhan kesetiaan warga negara terhadap rezim yang berkuasa dengan hak partisipasi demokratis yang sama pentingnya. Pendidikan Nasional tidak diajarkan sebagai mata pelajaran spesifik di sekolah-sekolah di Singapura, namun dimasukkan ke dalam kurikulum Melalui mata pelajaran seperti studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan adalah kendaraan utama untuk Pendidikan Nasional (*National education*) kemudian disingkat menjadi NE. studi sosial dan Pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan ke semua sekolah di tingkat atas pada tahun 2001, pada saat itu siswa berusia 15-16 tahun. Ini adalah subjek terpadu yang wajib dan patut diperhatikan, focus studi sosial dan kewarganegaraan adalah upaya pada peningkatan kesadaran akan isu-isu nasional, yang berkaitan dengan sejarah, Pembangunan ekonomi dan sosial Singapura, serta regional dan internasional isu yang berdampak positif pada Singapura (MOE, 2006).

Pemerintah berasumsi bahwa dengan mengetahui perkembangan Singapura, para siswa akan percaya diri untuk menatap masa depan, dan akibatnya lebih partisipatif. Dengan demikian, kurikulum studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan merupakan konstruksi yang

tidak bisa lepas dari politik dan ideologi penguasa (Sim, 2009, hlm. 708-709). Sehingga, yang mencerminkan pandangan dunia tertentu dan ideologi dominan yang melayani kelompok kepentingan tertentu. Pemerintah Singapura melalui *Ministry of education* (MOE) yang kuat dan terpusat, Memiliki konsepsi ideal tentang masyarakat dan kewarganegaraan dan ini harus disampaikan kepada siswa dalam hal pengetahuan dan nilai yang menonjol, untuk membantu mereka menjadi orang-orang yang percaya diri setia dalam seperangkat kebenaran tertentu yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Dan sementara semua pemerintah, dengan tingkat yang berbeda-beda, mengendalikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk mendidik warga masa depan, hanya sedikit negara-negara demokrasi yang menyatakan menggunakan tingkat kontrol seperti yang ditemukan di Singapura salah satu negara yang melakukan kontrol seperti ini adalah Indonesia pada masa Orde baru dengan politisasi pendidikan kewarganegaraan. Dalam mengerakkan kontrol tersebut, pemerintah Singapura percaya bahwa sistem pendidikannya mampu membuat warga negara patuh mengikuti arahnya.

Dalam buku teks pendidikan kewarganegaraan di Singapura sangat menekankan pada prestasi-prestasi yang di peroleh oleh PAP sehingga sangat sulit menemukan kekurangan dan kritik terhadap pemerintah oleh warga negara, bahkan ada konsepsi bahwa pendidikan di Singapura memang harus di tentukan oleh pemerintah terlihat dari ungkapan dalam wacana pendidikan Singapura yakni “*fbater knows the best*” artinya bahwa pemerintahlah satu-satunya yang menegetahui pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh warga negara Singapura (Sim, 2011, hlm. 757-758). Harapan ini belum tentu tercapai, hal ini disebabkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan di sekolah yakni antara Pendidikan Nasional dan praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Hegemoni terus dilakukan oleh pemerintah di sekolah-sekoah, dimana pemerintah PAP menjadikan sekolah-sekolah sebagai sekutu untuk menyusun sistem pendidikan nasional terpadu dari ketentuan etnis yang terpecah dan dipihak secara politis yang diwarisi dari bahasa Inggris. Secara ekonomi, langkah semacam itu juga diperlukan untuk membangun keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk industrialisasi (Sharpe & Gopinathan, 2002). Sistem pendidikan

terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah, menempatkan tangan para penguasa sebagai alat ideologis yang penting. Sim (2011, hlm. 244) menatakan melalui pendidikan warga negara harus diubah menjadi warga negara yang sangat terorganisir dan sangat disiplin, semuanya menarik ke arah yang sama dengan rasa semangat dan pengorbanan pribadi untuk kepentingan nasional. Sejak awal, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menanamkan nilai di sekolah dan kebutuhan ekonomi pendidikan. Secara efektif, warga harus meninggalkan politik dan menyerahkan semua urusan politik pada PAP. Kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) makna sebagai persaudaraan akar rumput, di mana orang-orang berorganisasi untuk saling membantu tanpa memiliki ambisi atau ideologi politik (Sim, 2011, hlm. 244). Akibatnya, kebijakan pragmatis menyebabkan warga yang semakin tidak dilepas yang dicirikan mementingkan diri sendiri dan materialistis, dengan pola pikir umum untuk tunduk pada pemerintah yang berkuasa (dalam hal ini PAP) (Sim, 2011:244-245).

Hegemoni Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Singapura

Dalam kurikulum sistem pendidikan terpusat di Singapura dan kontrol ketat oleh pemerintah, Studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan, sebagai inti Pendidikan Nasional merupakan subjek yang direncanakan dengan cermat dengan tujuan yang jelas untuk mereproduksi pandangan elit masyarakat Singapura. Bagaimana sesungguhnya warga negara Singapura yang idela menurut para elit politik. Hal ini ditransmisikan guru kepada siswa dalam hal pengetahuan dan nilai yang penting untuk membantu siswa menjadi orang percaya dan setia kepada negara. Dalam hal ini guru pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun pengetahuan peserta didik tentang bagaimana manusia Singapura sesungguhnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sim, J. B.Y pada tahun 2011 "*Simple ideological "Dupes" of Nation Governments? Teacher Agency and Citizenship Education in Singapore*" menunjukkan hasil yang menarik, dimana meskipun guru 'selalu diminta secara ideologis untuk membentuk identitas tertentu', namun mereka tetap "pembaca" kurikulum dan teks dan praktik pedagogis oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk membuat makna mereka sendiri. Guru sebagai kurator kurikulum-

instruksional menunjukkan bahwa ada banyak kemungkinan praktik pendidikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Konsekuensinya, sebuah kurikulum bukan sekadar produk yang dikembangkan oleh tangan para elit sebagai naskah untuk guru tapi juga sebuah praktik pembelajaran di kelas dimana kurikulum yang sama dapat disusun dan diajarkan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, hal ini memungkinkan memungkinkan guru memiliki multi tafsir atau bahkan kurikulum ditentukan sendiri oleh guru (Sim, 2011).

Sistem pendidikan dipusatkan di bawah kendali pemerintah, menempatkan guru sebagai alat ideologis yang penting. Pendidikan kewarganegaraan difokuskan untuk menumbuhkan loyalitas nasional, patriotisme, rasa memiliki, dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam tujuan pembangunan nasional. Di bawah pendidikan kewarganegaraan pemerintah ini berfokus pada sosialisasi politik dan moral. Siswa diajar isu-isu masalah nasional seperti kerukunan rasial dan religius, pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, dan peran mereka dalam mendukung proyek nasional, yang menekankan diterimanya *status quo* (Tan and Chew, 2004). Populasi dianggap sebagai warga negara yang sangat terorganisir dan sangat disiplin yang menarik ke arah yang sama dengan rasa semangat dan pengorbanan pribadi untuk kepentingan nasional. Guru di Singapura pada umumnya diharapkan agar tidak menagajar pembelajaran yang membangun kekeritisan kepada siswa karena hal itu akan mengancam stabilitas negara dan hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak tepat dilakukan oleh seorang PNS sehingga keritisan menjadi hal yang sangat rentan dalam pendidikan Singapura. Fakta diatas menunjukkan pemerintah hanya menempatkan guru hanya sebagai alat yang efektif dalam menjaga *satus quo* pemerintah yang berkuasa (Baildon & Sim, 2014, hlm. 402-422).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jasmine B-Y. Sim & Murray Print, pada tahun 2009 tentang "*Citizenship education in Singapore: controlling or empowering teacher understanding and practice?*". Adapun data ini didapat melalui penelitian yang dilakukan selama tiga tahun yang melibatkan 8 guru dari 4 sekolah menengah atas di Singapura. Sapel dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sekolah tempat mengajar, gender, Etnis, latar belakang pendidikan dan lama mengajar.

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan ada tiga karakteristik orientasi pedagogis guru Pendidikan kewarganegaraan di Singapura, *pertama* Guru sebagai pendidik nasionalistik, *Kedua*, Guru sebagai pendidik yang peduli secara sosial, *ketiga*, Guru sebagai pendidik yang berorientasi pada orang atau peserta didik.

a. Guru sebagai Pendidik Nasionalistik

Setengah dari guru studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan yakni, Peter, Vind, Leong, dan Carolyn dapat dianggap sebagai pendidik nasionalistik, meskipun dengan variasi. Bagi mereka, seperti yang dirangkum oleh Leong, 'Kewarganegaraan terikat pada bangsa, jika bangsa ini ada, kita adalah warga negara ... bangsa ini memberi kita identitas kita.' Bangsa ini adalah rujukan utama mereka, dengan tema dominan nasionalisme yang berjalan melalui pemahaman mereka dalam praktek studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Nasionalisme berarti dukungan bagi bangsa, yang oleh, Peter dan Leong, digambarkan dalam hal "membela bangsa, menjaga kedaulatan kita", hal ini dipengaruhi oleh pengalaman wajib militer yang mereka pernah Lewati. Sebaliknya, para wanita melihat dukungan sebagai 'berkontribusi kembali kepada masyarakat', di mana Vind berbicara tentang 'melakukan dengan baik dalam pekerjaan Anda untuk berkontribusi pada ekonomi, dan membantu Singapura bergerak maju.' Para guru memiliki kesadaran nasional yang setara. Pelajaran yang diajarkan adalah 'untuk melahirkan atau mempersiapkan siswa untuk mengetahui tentang negara ini, memahami masa lalu dan tantangan Singapura,' dengan implikasi yang jelas bagi warga negara karena 'ini adalah tanggung jawab kita'.

b. Guru sebagai pendidik yang peduli secara sosial

Sepasang guru, Marcus dan Frida, dapat dicirikan sebagai pendidik yang peduli secara sosial dengan partisipasi sebagai tema yang dominan. Guru berusaha untuk 'secara aktif melibatkan orang-orang di komunitas mereka di mana kehidupan dilewati ... berpartisipasi dalam penyebab dan masalah lokal.' 'Semakin banyak yang berpartisipasi,' Frida mencatat, 'semakin kuat rasa keterikatan dan keterikatan' Society adalah referensi utama mereka, 'Orang-orang yang hidup bersama sebagai sebuah komunitas', dengan 'keprihatinan bersama dan institusi bersama "jaringan hubungan saling ketergantungan" dan penghormatan terhadap

perbedaan.' Hubungan erat antara kewarganegaraan dan masyarakat tersirat di mana anggota terikat oleh rasa komunitas, identitas mereka ditentukan dengan referensi dan berpartisipasi di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, individu bukanlah inti, tapi penting sejauh dia adalah bagian dari masyarakat. Gagasan guru tentang kebaikan bersama dan kesadaran sosial tidak menunjukkan komitmen nasionalistik, namun merupakan ungkapan tanggung jawab terhadap orang lain karena begitulah cara orang bersikap satu sama lain terhadap orang lain.

c. Guru sebagai Pendidik yang Berorientasi pada Peserta didik

Guru yang terakhir yakni, David dan Ying, dapat dicirikan sebagai pendidik yang berorientasi pada peserta didik. Perkembangan pribadi adalah tema yang dominan, fokusnya adalah 'keseluruhan pribadi, dan seumur hidup.' Hal ini berkaitan dengan pengembangan konsep diri dan efektivitas pribadi yang positif, dan kesempatan untuk pertumbuhan individu dan pemenuhan diri. Dalam tipe ini guru memberikan tanggapan kepada negara yang dianggap paternalistik dan otoriter, guru mengatakan "Kami seperti anak-anak yang membutuhkan disiplin melalui undang-undang dan peraturan yang keras, yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan warga agar menyetujui. "Ini untuk kebaikan kita, negara mengatakan, untuk stabilitas ekonomi." Rasa pasif dan tidak berdaya dirasakan oleh warga negara termasuk guru.

Lanjutan dari penelitian ini pada tahun terakhir mengungkapkan bahwa delapan guru pendidikan kewarganegaraan yang dipekerjakan tidak terhegemoni, meskipun mereka adalah pegawai pemerintah dalam keadaan yang sangat terorganisir dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat preskriptif. Sebagai gantinya, empat pendekatan pedagogis diidentifikasi: ekspositori dan sangat terkontrol, rasionalistik dan persuasif, interaktif dan partisipatif, dan konstruktif dan eksperiensial. Keempat pendekatan ini terkait dengan bagaimana guru mengkonseptualisasikan kewarganegaraan. Guru memiliki orientasi yang bervariasi terhadap kewarganegaraan dan sejumlah kewarganegaraan yang disepakati dengan cara yang berbeda dari wacana resmi. Orientasi ini ditandai oleh tiga sikap dominan: nasionalistik, perhatian sosial, dan berorientasi pada orang.

Tidak hanya guru yang diintervensi secara ketat namun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan juga di kontrol ketat oleh pemerintah sehingga materi-materi tersebut dapat merepresentasikan keberhasilan dan kesuksesan Singapura dibawah kekuasaan politik PAP selama bertahun-tahun (Sim, 2009). Terdapat Empat tema luas diidentifikasi dalam konsep pendidikan kewarganegaraan mereka, yaitu rasa identitas, hak dan tanggung jawab, partisipasi dan sejarah nasional.

Simpulan

Guru merupakan gerbang terakhir pemerintah dalam melanggengakan kekuasaannya. Dalam konteks guru di Singapura adalah pegawai negara dan oleh karena itu, menerima apa yang menjadi kebijakn pemerintah. Sebagai penerima, guru diharapkan melakukan apa yang diminta oleh mereka oleh badan pendidikan, kurikulum resmi, dan sekolah. Secara khusus, para guru diharapkan menyampaikan pesan Pendidikan Nasional (*national education*) melalui pengajaran studi sosial, dengan pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pembangunan bangsa. Tujuan kurikulum studi sosial dinyatakan secara eksplisit, materi pelajaran yang ditentukan, dengan materi instruksional yang dikembangkan MOE untuk memastikan kesetiaan warga negara. Namun, para guru bukanlah pemancar pengetahuan eksternal yang dengan mudah dipengaruhi oleh kurikulum nasional meskipun sebagian guru masih menerapkan sesuai dengan instruksikan oleh pemerintah. Ada beberapa guru mengkonseptualisasikan kewarganegaraan dari berbagai sudut pandang, yaitu, *nasionalistik*, perhatian sosial, dan berorientasi pada orang, dengan dua yang terakhir berbeda dari wacana resmi. Akibatnya, serangkaian pendekatan pedagogis terkait dengan sikap nasionalistik, perhatian sosial, dan orang-orang. Masing-masing, mereka adalah ekspositori dan sangat terkontrol, ratifitis, dan pada saat bersamaan bersifat persuasif, interaktif dan partisipatif, dan konstruktif dan eksperensial.

Berdasarkan pemaparan diatas jelas telah membuktikan bahwa, hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah Singapura melalui kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam upaya menjaga *status quo* tidak berhasil seperti apa yang diharapkan. Analisis di atas dari delapan guru hanya 4 guru yang menerapkan sesuai dengan instruksi pemerintah yang tersurat dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Atau

dengan kata lain, hegemoni berupa pengontrolan secara ketat tidak sepenuhnya berhasil. Kedelapan guru tersebut menunjukkan bahwa konseptualisasi kewarganegaraan mereka merupakan bagian integral dari pemahaman tentang apa yang mereka lakukan atas nama pendidikan kewarganegaraan dalam studi sosial. Konseptualisasi mereka bervariasi dan mempengaruhi pendekatan terhadap pendidikan kewarganegaraan, pengalaman yang akan dialami siswa, jenis keterampilan yang akan mereka kembangkan, jenis pesan yang akan mereka terima tentang kehidupan kolektif mereka, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya benar persepsi yang mengatakan guru terhegemoni oleh negara meskipun kontrol ketat dilakukan oleh pemerintah dan begitu juga dengan guru pendidikan kewarganegaraan Singapura meskipun telah mendapat pelatihan dengan baik pada pendidikan kewarganegaraan atau dengan kata lain, tidak semua pendidik atau guru di Singapura terhegemoni oleh kekuasaan PAP dengan penguatan ekonomi sebagai alat legitimasi politiknya. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai refleksi bagi para pendidik atau guru pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia agar tidak begitu saja menerima atau terhegemoni oleh aturan yang dibuat oleh penguas. Akan tetapi, guru harus mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik agar menjadi warga negara muda yang baik.

Referensi

- Amin, M. (2014). Pokok-pokok Pemikiran Antonio Gramsci dan Relevansinya dengan pendidikan. dalam buku pendidikan pos modernism. Yogyakarta: Ar-Ruzmedia.
- Apple, M. W. (2004). *Curriculum and ideology*. New York: Routledge.
- Gopnathan, S. & Bakar, 2013. *Globalization, Curriculum Reform, Vision and Discourses*, sebuah bab dalam buku globalization and the Singapore curriculum from policy and classroom. Singapore: Springer.
- Ardilla, A.F. (2014). Demokrasi semu di Singapura pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew. Dalam *jurnal hubungan internasional Vol 1, No 2*.
- Baildon, M. C. & Sim, J.B.Y. (2009). Notions of criticality: Singaporean teachers' perspectives of critical thinking in sosial

- studies. Dalam jurnal *Cambridge Journal of Education* Vol. 39, No. 4, pp, 407–422.
- Chia, Y.T. (2016). Singapore General Election 2015 and the Role of Citizenship Education. Dalam jurnal *The Round Table*, Vol. 105, No. 2, pp 149–160.
- Djamarah, S.B. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka cipta
- Gopinathan, S & Sharpe, L.(2004). New Bearings for Citizenship Education in Singapore. Bab dalam buku citizenship Education in Asia and Pasific concepts and issues. Hongkong: Springer and Bussines Media.
- Hefner, R, W. (2007). Politik Multikultural. Yogyakarta: Kanisius
- Imam, M.A.H. (2016). Sistem pemerintahan *soft-authoritarian* Singapura di tengah arus demokrasi. Dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 1 no.2, hal 1-5*.
- Kalidjernih,F.K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal Dan Political*. Bandung:Widya Aksara Press.
- Ministry of education Singapore, (2016). *Character and Citizenship Educatin Pre-university*. Singapore: Student development Curriculum Devison Ministry of education Singapore.
- Mohamed, K.N. & Turner, B.S.(2013) Governing as gardening: reflections on soft authoritarianism in Singapore. Dalam jurnal *citizenship studies, volume 17, no,3-4. Pp.339-352*.
- Nozaki, Y., Openshaw, R., & Luke, A. (2005). *Struggles over difference: Curriculum, texts, and pedagogy in the Asia-Pacific*. New York: SUNY Press.
- Palmer, J.A. (2015). *Ide-Ide Brlilan 50 Pakar Pendidikan Kotemporer: Paling Berpengaruh di dunia Pendidikan Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Pramono, M. (2014). Melacak Basis Epistemologi Antonio Gramsci. Dalam bukua Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
- Rupert, M. (2010). *Antonio Gramsci*. Dalam Edniks, J & Vaughan, N.W. Teori-teori Kritis Menentang Pandangan Politik Internasional. Yogyakarta: Baca.
- Samsuri, (2011). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Diantara Pustaka Indonesia
- Sim, J. B.Y (2011). Simple ideological “Dupes” of Nation Governments? Teacher Agency and Citizenship Education in Singapore. Sebuah bab dalam buku *Citizenship Pedagogies in Asia and Pacific*. London New York: Springer.
- Sim, J.B.Y & Print, M. (2005). Citizenship Education and Sosial Studies in Singapore: A National Agenda. Dalam jurnal *International Journal of Citizenship and Teacher Education Vol 1, No. 1, pp 58-73*.
- Sim, J.B.Y & Print, M. (2009). Citizenship education in Singapore: controlling or empowering teacher understanding and practice? Dalam jurnal *Oxford Review of Education Volume 35, no.6, Pp705-723*.
- Sim, J.B.Y. (2011). Sosial studies and citizenship for participation in Singapore: how one state seeks to influence its citizens. Dalam jurnal *Oxford Review of Education Vol. 37, No. 6, pp. 743–76*.
- Sim. J.B.Y & Print. M. (2009). Citizenship Education In Singapore: Kontrolling Or Empowering Teacher Understanding And Practice. Dalam jurnal *British Journal of Educational Studies, ISSN Vol. 57, No. 4, pp 380–399*.
- Sim. J.B.Y & Print. M. (2009). The State, Teachers and Citizenship Education In Singapore Schools. Dalam jurnal *Oxford Review of Education Vol. 35, No. 6, pp. 705–723*.
- Suparlan, (2008). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Tan, K.P (2012). The ideology of pragmatism: neoliberalisation and political authoritarianism in Singapoe. Dalam *Journal of Contemporary Asia Vol. 42, No. 1, pp. 67–92*.
- Thornton, S.J. (2005) *Teaching sosial studies that matter: Curriculum for active teaching*. New York: Teachers’ College Press.
- Tilaar, H. A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera
- Tilaar, H. A.R. (2016). *Kebijakan Pendidikan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pertalian Agama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017

Muhamad Ridwan Effendi ^{a, 1*}, Iqbal Syafrudin ^{b, 2*}

^a Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹ muhamadridwan@unj.ac.id*; ²syarudin@unj.ac.id

*Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Informasi artikel

Diterima:

03-03-2020

Disetujui:

03-04-2020

Kata kunci:

Agama
Politik
Identitas
Aksi
Konflik

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menguraikan tentang hubungan antara agama dan politik yang terjadi di DKI Jakarta dalam kerangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017 lalu sebagai salah satu saluran demokrasi di Indonesia. Melalui metode dan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada serangkaian peristiwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta dengan dinamai "Aksi Bela Islam" oleh kelompok penggerakannya yaitu GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) yang berpengaruh terhadap konstelasi politik saat itu. Artikel ini menunjukkan bahwa Aksi Bela Islam telah menunjukkan keterlibatannya dalam arena politik yang bergejolak, dan proses tersebut telah membentuk watak situasi politik yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, kajian ini pun menunjukkan bahwa proses demokrasi yang tengah berjalan telah memungkinkan munculnya identitas agama dalam Pilkada DKI Jakarta.

ABSTRACT

Religious Relation in DKI Jakarta Election in 2017. This article aims to elaborate on the relationship between religion and politics that occurred in DKI Jakarta within the framework of the 2017 Regional Head Election (Pilkada) as one of the channels of democracy in Indonesia. Through descriptive qualitative methods and approaches, researchers focus their studies more on a series of large-scale demonstration events that took place in Jakarta named "Action of Defending Islam" by its activist group, the GNPF-MUI (National Movement for Guarding Fatwa of the Indonesian Ulama Council) which affects the political constellation at that time. This article shows that the Islamic Defending Action has demonstrated its involvement in the turbulent political arena, and the process has shaped the political situation in the Jakarta Election. Also, this study also shows that the ongoing democratic process has enabled the emergence of religious identity in the DKI Jakarta Election.

Keywords:

Religion
Politic
Identity
Action
Conflict

Copyright © 2020 (Muhamad Ridwan Effendi, Iqbal Syafrudin). All Rights Reserved

How to Cite: Effendi, M.R., & Syafrudin, I. (2020). Pertalian Agama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mimbardemokrasi*, 19(2), 12-27. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14528



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada tahun 2017 lalu, Indonesia tengah disibukan dengan hajat demokrasi 5 (lima) tahunan, yakni pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, salah satu yang cukup menarik perhatian publik adalah Pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta. Hal yang menarik dalam Pilkada DKI Jakarta, bukanlah pada mekanisme

penyelenggaraannya, melainkan pada manuver-manuver politik yang dilakukan para aktor politik dan kontestan peserta pilkada sebagai sebuah media untuk membangun opini publik serta demonstrasi besar-besaran yang terjadi di tengah perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang cukup fenomenal dan mendapat perhatian masyarakat, tak terkecuali masyarakat Internasional.

Demonstrasi besar-besaran yang sudah berlangsung 4 (empat) kali itu merupakan aksi massa terbesar pasca tumbanganya Orde Baru, dan aksi yang dimotori oleh penggeraknya dengan menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Aksi demonstrasi ini menuntut agar aparat hukum segera memproses kasus pidana penistaan agama,² yang menurut fatwa MUI bertanggal 11 Oktober 2016, telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seorang Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai calon petahana pada Pilkada DKI Jakarta, dan bergeser lebih jauh berisi tuntutan pemenjaraan atas ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ratusan ribu orang turun ke jalan. Tak hanya ulama dan umat kebanyakan, tapi ada juga turut hadir dari kalangan artis dan politisi nasional. Puluhan ribu aparat polisi pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi tersebut.

Peristiwa yang oleh penggeraknya dinamai “Aksi Bela Islam” tersebut menarik perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena begitu besarnya massa yang turun ke jalanan ibukota, tapi juga, bagi sebagian orang, karena persoalan lebih dalam menyangkut agama-politik di balik hiruk-pikuk massa demonstrasinya. Di tingkat masyarakat awam, perbincangan terkait hal ini begitu merasuk dan hampir selalu muncul dalam obrolan tiap hari, entah dalam pertemuan langsung, apalagi dalam WAG (*WhatsApp Group*) maupun grup *chat* lainnya. Tak sekedar menjadi pembicaraan massa awam, di tingkat elite, isu ini juga mendorong manuver-manuver para aktor politik, baik yang bertujuan memolitisir isu ini (dan menungganginya untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya) maupun yang hendak meredam eksploitasi kasus penistaan agama maupun “Aksi Bela Islam”.

Selain mengagetkan banyak pihak dengan massa yang demikian besar, “Aksi Bela Islam” yang belakangan populer dengan sebutan aksi 411, 212, 313 ini, tak pelak menyeret hampir sebagian besar umat Islam pada nada-nada retorika yang muncul di sekitar aksi demonstrasi sudah begitu sangat mengerikan. Tuduhan penistaan agama yang ditujukan kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

yang juga sebagai calon gubernur petahana Gubernur yang juga merupakan keturunan Tionghoa beragama Kristen telah bertumpuk dengan pidato-pidato penuh kebencian dengan nada rasis. Bahkan berbagai spanduk berisi materi kekerasan etnis telah terpasang sepanjang masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, seolah mengembalikan ingatan perih tentang kekerasan yang menimpa keturunan Tionghoa pada 1998 silam. Bahkan sejak semula perdebatan ini bagi sebagian pihak dinilai tidak produktif dan tidak menyentuh pada pokok persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia saat ini terkait keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

Pada tataran akan rumput, perdebatan telah berubah menjadi saling caci antar umat Islam terlebih pendukung Habib Rizieq dan Ahok. Para pendukung “Aksi Bela Islam” menuding mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung aksi sebagai perwujudan kurang Islam. Sementara bagi para penolak “Aksi Bela Islam” menganggap aksi massa yang memobilisasi ratusan ribu orang untuk turun ke jalan, alih-alih membela Islam, justru merendahkan Islam dan tak lebih sebagai buang-buang energi umat Islam untuk hal yang tidak substansial dan remeh temeh. Bahkan, lebih jauh, sebagian besar para pengkritik “Aksi Bela Islam” menganggap aksi massa tersebut sebagai bukan metode perjuangan Islam.

Kedua cara pandang inilah yang menurut hemat saya perlu untuk ditanggapi secara serius, sekaligus sebagai ikhtiar mendudukkan persoalan “Aksi Bela Islam” tidak sekedar persoalan teologis, melainkan membacanya sebagai dinamika pertarungan maupun konvergensi kepentingan antar elite politik dalam lanskap politik elektoral DKI Jakarta. Pernyataan Ahok dengan mengutip Surat al-Maidah 51 pada Oktober 2016 lalu telah dieksploitasi sedemikian dalamnya, untuk memunculkan identitas politik masyarakat urban yang menjadikan Jakarta sebagai etalase kemajuan Indonesia.

Meninjau hasil kajian pustaka yang disadur pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian yang dianggap sejenis terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya: *pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Hasbullah, *Agama dan Etnisitas di Pentas Politik*

¹ Gelombang Aksi Bela Islam (selanjutnya disebut ABI) *Pertama*, ABI 1 pada tanggal 15 Oktober 2016; *Kedua*, ABI 2 dikenal Aksi 412 karena dilakukan pada tanggal 4 Desember 2016; *Ketiga*, ABI 3 yang dikenal Aksi 212 karena dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016; dan *Keempat*, ABI 4 yang dikenal Aksi 313 karena dilakukan pada tanggal 31 Maret 2017.

² Ahok dinilai telah melakukan pelecahan terhadap al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, hal ini berawal dari petikan pidatonya saat berkunjung di Pulau Seribu yang menyulut kemarahan ulama dan umat Islam terkait Q.S. al-Maidah ayat 51.

Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada) yang dalam simpulannya diungkapkan bahwa penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam praktik politik praktis seperti Pilkada merupakan media untuk menggiring opini dengan menjadikan simbol agama sebagai isu potensial (Hasbullah, 2011). *Kedua*, jurnal yang ditulis Nur Latifah, *Agama, Konflik Sosial, dan Kekerasan Politik* yang dalam simpulannya lebih menekankan bahwa konflik yang terjadi di Maluku merupakan refleksi pertikaian elite politik sebagai akibat dari adanya ketidakadilan politik yang kemudian menjadi terpolarisasi ke ranah pemeluk agama. *Ketiga*, Tesis karya Muhamad Ridwan Effendi, *Isu-isu Agama dalam Pilkada Kabupaten Purwakarta*, dalam tesisnya dijelaskan bahwa isu-isu agama yang muncul dalam Pilkada Purwakarta terjadi sebagai bentuk perlawanan rivaitas politik dan dampak adanya kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang dianggap tidak sejalan dengan tradisi dan budaya masyarakat Purwakarta (Effendi, 2013).

Meskipun dalam beberapa aspek penelitian di atas terdapat adanya kemiripan, akan tetapi tidak sepenuhnya sama baik dalam judul, latar belakang masalah, tujuan, metodologi, teori dan kesimpulan yang digunakan. Sehingga dalam penelitian ini, mulai dari latar belakang, analisis teori, fokus dan lokusnya pun terdapat perbedaan yang kontras

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, telah menarik minat penulis untuk memahaminya secara lebih sistematis. Dalam penelitian ini, penulis hendak menguraikan aksi yang terkesan bernuansa agama tersebut ada hubungannya hubungannya dengan situasi politik yang tengah terjadi di DKI Jakarta. Sehingga ajuan pertanyaan penelitian ini, adalah apa yang melatarbelakangi munculnya Aksi Bela Islam GNPF-MUI di DKI Jakarta? Dan bagaimana implikasi Aksi Bela Islam GNPF-MUI terhadap kondisi politik DKI Jakarta saat itu?.

Metode

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada peserta Aksi Bela Islam dan kajian dokumentasi sumber-sumber lainnya seperti buku, majalah, koran, dan informasi lainnya seperti *facebok*, *Instagram*, *WhatsApp* yang kemudian di analisis dengan teknik triangulasi data dan teori-teori yang relavan dalam penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

A. Agama dan Politik

Kajian terkait hubungan agama dan politik seakan tidak akan pernah berakhir. Karena kedua-duanya merupakan bagian dari instrument yang penting dalam kehidupan manusia. Secara naluriah, tentunya manusia pasti memiliki agama dan agama itu mempengaruhi kehidupan individu dan social manusianya. Istilah *zoon politicon* (*political animal*) atau binatang yang berpolitik merupakan istilah yang diungkapkan oleh Aristoteles dengan maksud untuk menggambarkan bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa hidup menyendiri dan tidak membutuhkan manusia lainnya terlebih dalam urusannya untuk memepreloh sesuatu yang diinginkan tentunya ia akan memerlukan instrumen lain sebagai medianya, termasuk agama dan politik sekalipun.

Meskipun hubungan agama dan politik itu sangat erat dan saling mempengaruhi, perbincangan terkait keduanya seringkali menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini, paling tidak ada dua pandangan besar yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertolak belakang. *pertama* adalah pandangan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah keduniaan, apakah itu sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Karenanya, antara agama dan persoalan keduniaan tersebut ada kaitan formal. Tentunya bagi orang beragama, argumen ini tidak pantas kiranya memisahkan persoalan-persoalan dunia dari agama. Dan *kedua* adalah pandangan bahwa bukan saja agama itu berbeda dengan persoalan keduniaan, tetapi antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali, dan karenanya harus dipisahkan. Perdebatan seperti itu biasanya diikuti dengan munculnya penilaian-penilaian yang sifatnya *judgmental* kepada masing-masing pendukung pandangan di atas. Mereka yang mendukung pandangan yang pertama sering diasosiasikan sebagai pemeluk agama yang skriptualis atau fundamentalis. Sedangkan mereka yang mendukung pendapat yang kedua biasanya dihubungkan dengan sikap hidup sekuler (Effendy, 2000).

Namun tidak semua pernyataan bahwa agama dan politik memiliki keterkaitan seperti yang dibenarkan oleh sebagian pihak di atas tadi, karena bagi beberapa orang di antaranya ada pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada keterlibatan agama dalam politik praktis, pendapat ini menganggap bahwa politik memiliki wilayah yang berbeda, bahkan berseberangan dengan agama (Kahmad, 2011). Karenanya

agama merupakan persoalan pribadi (*Private*), sedangkan politik adalah hal lain di luar urusan agama dan bersifat publik (umum).

Seperti apa yang telah diungkap di atas, peran an agama dalam kehidupan ini memberikan dampak yang nyata bagi perubahan sosial masyarakat. Agama dianggap sebagai fenomena sosial yang selalu menarik bagi penyelidikan keilmuan. Maklum saja, agama bukan hanya merupakan kebutuhan psikologis manusia. Agama juga bukan gejala keilahian yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis belaka. Agama juga suatu lembaga sosial yang mempunyai fungsi sosial dan kiranya juga mempunyai asal-usul sosial pula (Sindhunata, 2006). Agama bukan hanya gejala adikodrati tetapi juga gejala kodrati. Menurut Sindhunata agama memang suatu *institution divina*, yang menyimpan keilahian, kesucian, misteri, bahkan irasionalita, yang tak dapat begitu saja diterangkan secara ilmiah dan rasional. Namun sebagai *institution humana*, agama dapat juga dikupas dan diterangkan secara ilmiah dan rasional (Sindhunata, 2006).

Terlepas dari perkara keterlibatan agama dalam pengaruh lingkungan tersebut, artikulasi agama pun dimaknai memiliki peran aktif dalam hal politik. Berbicara tentang politik, pengertiannya selalu diasosiasikan dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, konflik, partai politik atau upaya-upaya yang ditempuh perseorangan maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara. Karena itulah, istilah politik sesungguhnya merangkum pengertian yang luas.

Sebagaimana inventarisasi makna politik yang diungkapkan Ramlan Surbakti (Subekti, 1999). *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama; *Kedua*, politik sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan; *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum; dan *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Diskursus agama dan politik, khususnya menyangkut pengelolaan kekuasaan sebenarnya telah berkembang sejak abad tengah. Smith membagi pemikiran agama dan politik tersebut secara dikotomis ke dalam tipologi *religio-political*

power organik di satu pihak dan sekuler di lain pihak. Para eksponen perspektif organik, mengklaim perlunya penyatuan agama dan kekuasaan karena jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan. Sementara itu eksponen perspektif sekuler cenderung mengklaim perlunya pemisahan antara agama dan kekuasaan, antara lain dimaksudkan untuk menjaga “keparipurnaan” agama itu sendiri (Smith, 1985).

Perkembangan pemikiran interelasi antara agama dan politik juga masuk dalam diskursus intelektual muslim kontemporer. Dalam hal ini muncul eksponen intelektual muslim yang memilih menjadi penganut perspektif organik, dan ada pula yang memilih perspektif sekuler. Oleh karena itu, tidak ada klaim yang bersifat tunggal atau hanya ada satu perspektif dalam Islam. Pemisahan peran agama dan Negara, menurut Swidler misalnya hanya representasi dari pemikiran Kristen. Sementara dalam Islam berlaku penyatuan agama dan Negara. Adapun dalam kalangan Yahudi cenderung ambigu, meskipun pandangan Swidler ini dapat diperdebatkan, sebab seperti dikatakan Davis, Yahudi lebih menerpakan penyatuan agama dan Negara atau politik, sebagaimana mereka menggunakan agama untuk menjustifikasi klaim atas tanah Tepi Barat jalur Gaza sebagai hadiah Tuhan (Maliki, 2010).

B. Konflik Sosial dan Politik Identitas

Pertautan agama dan politik pun menjadi kontroversi bagi sebagian kaum agamawan, di satu pihak menganjurkan keterlibatan agama dalam politik sebagai wujud keyakinan bahwa agama merupakan ajaran universal yang tidak menutup kemungkinan bahwa dengan berpolitik merupakan bagian dari salah satu ibadah sosial yang harus dijalankan (Muhubbin, 2012), di lain pihak adanya larangan keterlibatan agama dalam politik, dikarenakan politik adalah wilayah yang berbeda, bahkan berseberangan dengan agama sehingga agama harus steril dari warna-warni politik.

Terlepas adanya kontroversi yang mempertautkan antara agama dan politik dewasa ini, nampaknya dapat dilihat dari adanya pemanfaatan agama sebagai sebuah isu dalam politik yang menimbulkan dampak serius dan melahirkan sederet konflik sosial di masyarakat yang berujung pada tindakan fundamentalisme. Sebagai sebuah contoh fenomena Pilkada yang terjadi di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu, seperti Pilkada Pilgub Jakarta yang syarat

akan pemanfaatan agama sebagai media propaganda dalam mempengaruhi massa yang diwujudkan dengan keterlibatan berbagai simbol, aktor dan *statement* yang berhubungan dengan agama.

Aksi pemanfaatan agama sebagai media politik dinilai sebagai senjata mematikan bagi mayoritas masyarakat beragama, pasalnya secara umum masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama, terlebih mayoritas penduduknya beragama Islam. Corak keagamaan yang dipraktikkan dalam aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan politik didasarkan pada ortodoksi *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Ortodoksi tradisi nilai keagamaan tersebut dijadikan sebagai sikap hidup bagi masyarakat yang dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang beragama Islam.³

Kasus Ahok yang kemudian merembet ke dalam persoalan Aksi Bela Islam itu merupakan sebuah gambaran keberhasilan politik identitas dalam memenangi sebuah kompetisi politik. Keberhasilan politik identitas yang digaungkan beberapa elit politik yang meskipun di sebagian pihak menyebutkan bahwa Aksi Bela Islam dianggap murni sebagai bentuk protes dan penegakan hukum atas kasus Ahok dan bukan sebagai aksi yang dilandasi kepentingan politik. Meskipun demikian, potret yang terjadi beberapa simbol dalam politik identitas terkait SARA pun muncul.

Langkah politik identitas yang terjadi pada aksi dan kasus tersebut dirasa dimanfaatkan oleh sebagian pihak elite politik guna mendapatkan popularitas dan elektabilitas pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan momentum tersebut.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud politik identitas menurut Widayanti (2009) adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama.

Kendatipun demikian, realitas sepanjang kasus itu terjadi politik identitas memang tengah terjadi dan bahkan masih sangat diminati oleh elit politik untuk memenangkan kompetisi politik. Identitas pembeda mereka salah satunya adalah agama.

Pemanfaatan identitas sebagai saluran politik tentunya akan memberikan dampak terhadap stabilitas sosial, dan ketiaknya tidak terkontrol maka akan melahirkan konflik sosial di masyarakat secara luas. Konflik sosial itu muncul sebagai langkah fundamental dalam menyerukan hak dan keinginan politiknya secara terbuka, meskipun hasil akhirnya akan berhasil atau bahkan *chaos*.

Menurut Horace M. Kallen, fundamentalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum (Karyono, 2003). *Pertama*, fundamentalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak.

Kedua, fundamentalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam fundamentalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Kaum fundamentalis berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. Dan *ketiga*, kaum fundamentalis memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum fundamentalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjerus pada kekerasan.

Perubahan sosial, memang sering ditempuh melalui gerakan fundamental disertai kekerasan yang ternyata kemudian melahirkan sejarah perlawanan dalam bentuk revolusi sosial fundamental. Revolusi sosial itu didasarkan pada ideologi sekuler (Maliki, 2010). Di samping adanya perlawanan atau revolusi sosial yang berangkat dari ideologi sekuler, maka di sisi lain muncul perlawanan atau revolusi sosial yang digerakkan oleh sebuah keyakinan keagamaan. Agama dalam pengertian tradisional memang menarik perhatian kepada sistem keyakinan, nilai

³ Meskipun informasi ini menggambarkan sebagian corak keagamaan yang dianut masyarakat Jakarta, setidaknya dapat digunakan untuk memahami realitas politik

masyarakat Jakarta. Hasil wawancara dengan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jakarta (FKDM) Jakarta, Dr. H. Anang Abdul Razak, M.Pd.

dan motivasi kehidupan yang berbeda dengan sistem nilai yang dibangun masyarakat sekuler. Sistem nilai itu diinternalisasi oleh pemeluknya dan sebagian toleran tetapi sebagian yang lain kemudian mendorong lahirnya cara-cara penyelesaian fundamental bahkan dengan kekerasan atas nama agama. Mereka yang mencari solusi dari krisis sosial dengan cara-cara fundamental dan mengatasnamakan “agenda suci” itulah yang sering dikenal sebagai gerakan fundamentalisme agama (Twiss, 1997).⁴

Ketika agama secara empiris dihubungkan dengan persoalan sosial-kemasyarakatan hendaknya disertai dengan kesediaan untuk meletakkannya dalam perspektif yang menekankan pada dimensi isi, meskipun dalam perjalanannya akan sering ditemukan ketegangan-ketegangan antara wilayah agama dan sosial kemasyarakatan termasuk politik. Bahkan dalam kaitannya dengan hal ini, Mohamad Natsir pernah memberi cap *lâ dîniyyah* (sekuler) terhadap ide-ide sosial-politik yang tidak bersumber dari ajaran agama (Twiss, 1997).

Ketika agama dekat dengan gerakan-gerakan fundamentalisme, peran dan fungsi agama menjadi kerdil bahkan tidak sejalan dengan cita-cita awal agama itu sendiri untuk memberikan kedamaian dan ketenangan batin bagi setiap pemeluknya. Seolah-olah agama menjadi senjata bagi mereka untuk melakukan gerakan-gerakan dakwah yang sifatnya memaksakan ummat lain untuk ikut dan taat pada agama yang dianutnya. Hal semacam ini didasari dengan dalih semangat “jihad” atau tegaknya “kerajaan Tuhan” di muka bumi. Hal ini merupakan dampak dari adanya sikap *eksklusif* (Grose, 1998) dalam beragama.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dewasa ini sebenarnya bukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, akan tetapi *Ghazwah al-Fiqri* atau tantangan pemikiranlah yang sedang kita hadapi saat ini. Sebab persoalan yang ditimbulkan oleh bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya ternyata bersumber dari pemikiran. Di antara tantangan pemikiran yang paling serius saat ini adalah dibidang pemikiran keagamaan. Tantangan yang sudah lama kita sadari adalah tantangan internal yang berupa kejumudan, fanatisme, taklid buta, dan sebagainya. Begitu pun dengan tantangan eksternal yang kerap

memunculkan perselisihan paham dan bentrokan antar agama, yang jelas tantangan tersebut digawangi dengan munculnya sikap dan cara berpikir fundamentalisme-literalis bagi oknum pemeluk agama.

Munculnya ragam gerakan fundamentalisme dewasa ini yang dimotivasi keyakinan agama atau akidah, seperti yang terjadi pada agama katolik dan protestan. Selain lahir dalam situasi konflik, gerakan fundamentalisme agama juga diawali dengan pemahaman mereka terhadap teks-teks suci keagamaan secara harfiah (*literal*) (Grose, 1998). Epistemologi agama bagi mereka yang fundamentalis selalu dipahami bersifat konfliktual, sehingga secara mental mereka merasa dalam bahaya dan siap mati untuk perang melawan musuh yang berbeda keyakinan atau agama.

Pandangan ini tetap hidup dalam kelompok sempalan beberapa agama dan semuanya berakar pada fundamentalisme dalam penghayatan agama. Secara teoritis, fundamentalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, dan keinginan dari komunitas tertentu agar dunia ini diubah dan ditata sesuai dengan doktrin agamanya. Karena itulah, bentuk-bentuk fundamentalisme agama yang dipraktikkan oleh sebagian umat beragama seharusnya tidak sampai menghadirkan ancaman bagi masa depan kehidupan.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa selama manusia ada maka agama pun akan tetap terus eksisten dalam kehidupannya, terlepas adanya interpretasi akan adanya berbagai pendapat dan sikap orang terhadap agama, yang jelas peranan agama dalam perkembangan dewasa ini masih tetap hidup dan tradisi yang dilahirkannya terus dijaga dan dibela oleh pemeluknya dari zaman ke zaman. Bahkan tidak sedikit ada yang membela dengan cara “mengangkat pedang dan/atau menanam bom” sekalipun.

Dalam setiap ekspresi keagamaan seseorang pasti memiliki titik diversitas, hal ini memungkinkan mereka memiliki frame berpikir yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang membentuk, sehingga di antara mereka ada yang memiliki kecenderungan berpikir eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme ataupun universalisme. Fenomena ini tidak dapat

⁴ Kata fundamentalisme pertama kali digunakan pada tahun 1920 dipakai untuk menyebut suatu pemeluk agama yang taat, yang menunjukkan pada suatu gerakan di dalam kekristenan yang ingin menjaga dan memurnikan kesempurnaan Alkitab, sembari tidak sabar menunggu

kedatangan Yesus kembali. Dalam kerangka kesempurnaan Alkitab itulah mereka mengkritik dan melawan banyak aspek kehidupan modern seperti pluralisme, konsumerisme, materialism dan penekanan pada persamaan laki-laki dan perempuan..

dipungkiri, mengingat dalam konteks Jakarta, persoalan agama menjadi primadona semenjak orientasi kepemimpinan di Jakarta mengangkat isu-isu kebudayaan lokal yang secara perlahan mampu membuka kran konflik masyarakat agama di Jakarta.

Dalam tatanan teologis, begitu banyak anjuran untuk membangun kohesi sosial. Pada tataran sosiologis, Parsons misalnya mengatakan bahwa agama secara universal dipandang sebagai komponen utama dalam integrasi sistem nilai. Dengan kata lain, agama menjadi sebuah energi besar dalam cita-citanya membangun integrasi sosial. Dengan dasar pemikiran tersebut, jika digunakan perspektif Durkheim, maka agama dijadikan sebagai sumber pembentukan keyakinan yang mengikat kehidupan bersama dalam ritual dan pengalaman keagamaan yang sakral (Maliki, 2010). Turner pun menyatakan *religion is a social cement, binding individuals and social group into a communal order* (Turner, 2012).

Namun dalam banyak kasus yang terjadi adalah justru konflik keagamaan yang muncul. Nilai agama tidak tertransformasikan sebagai energi positif justru sebaliknya seakan menjadi faktor *political liability* atau ongkos politik yang besar (Maliki, 2010). Melihat yang terjadi di Jakarta khususnya di mana konflik terjadi antara agama dan pemerintah, yakni ketika pemerintah sangat kuat di bawah kepemimpinan Gubernurnya (Red; Ahok). Kekerasan antar agama dan bahkan juga konflik kekerasan terjadi dalam satu denominasi agama yang sama. Melihat hal demikian, akar konflik teologis maupun sosiologis agama tidaklah memuat pesan dan tata nilai kolektif yang dibutuhkan masyarakat sebagai modal sosial dikarenakan pola pemahaman atau konstruk manusia terhadap agama tidak utuh.

Munculnya sejumlah gerakan atau tindakan fundamental mengatasnamakan agama di Jakarta pun sebenarnya tidak lepas dari respon mereka terhadap perkembangan struktural ekonomi politik yang terjadi selama ini. Mereka memandang modernisasi ekonomi dan politik yang terjadi tidak memungkinkan tumbuhnya partisipasi secara plural.

Dalam merespon tekanan struktural tersebut sebagian memang memilih jalan akomodasionis, sebagian lagi reformis, dan sebagian lagi memilih jalan fundamentalis. Fundamentalisme agama dimaknai sebagai perlawanan atas tekanan refresif yang mengancam sumber-sumber eksistensial ekonomi, politik maupun keagamaan mereka (Turner, 2012).

Pasca adanya desentralisasi dan terbukanya kran otonomi daerah, banyak sekali semangat pembaharuan di berbagai aspek termasuk dalam wilayah agama dan politik praktis pemilu (Ahmad Suaedy, 2007). Semenjak berlakunya otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, Pemilu di sejumlah daerah di Indonesia selalu disertai dengan sejumlah kecemasan akan munculnya konflik. Demikian pula dalam pilkada Jakarta. Ada beberapa penyebab mengapa masyarakat memanfaatkan penyelenggaraan pemilu sebagai tempat memunculkan kekecewaan terbuka, dan bahkan memunculkan konflik yang menggunakan tindakan kekerasan. Dalam hal ini kita menggunakan penjelasan Robert T. Gurr (1974) mengenai teori deprivasi relatif. Masyarakat yang terkena pengaruh deprivasi relatif akan mudah tergoda untuk melakukan tindakan kekerasan, dan menggunakan instrumen apa saja yang dianggap dapat mendukungnya (Maliki, 2010). Kampanye dengan mobilisasi massa, adalah instrumen yang paling bagus untuk mengekspresikan kekecewaan. Sesuai dengan karakteristik massa yang "anonym", hilang rasa tanggung jawab dan kesadaran pribadi, maka pada saat seperti itu akan dengan mudah muncul solidaritas perkwanan yang sensitif dan emosional (Maliki, 2010).

Munculnya sejumlah gerakan atau tindakan fundamental mengatasnamakan agama di Indonesia pun sebenarnya tidak lepas dari respon mereka terhadap perkembangan struktural ekonomi politik yang terjadi selama ini. Mereka memandang modernisasi ekonomi dan politik di negeri ini tidak memungkinkan tumbuhnya partisipasi secara plural. Depolitisasi agama telah terjadi di mana-mana, bahkan berlangsung sedemikian intensif sampai pada tataran pelanggaran penggunaan sejumlah simbol keagamaan di ranah publik. Depolitisasi agama itu akan berimplikasi kepada peminggiran masyarakat agama dalam aspek kehidupan yang luas, termasuk dari kehidupan ekonomi.

Dalam merespon tekanan struktural tersebut sebagian memang memilih jalan akomodasionis, sebagian lagi reformis, dan sebagian lagi memilih jalan fundamentalis. Fundamentalisme agama dimaknai sebagai perlawanan atas tekanan refresif yang mengancam sumber-sumber eksistensial ekonomi, politik maupun keagamaan mereka (Maliki, 2010). Dalam penelitiannya terhadap perilaku masyarakat di kawasan kumuh Bulak Banteng, Surabaya, Fachry Ali melihat adanya tindakan brutalisme atau kekerasan ekonomi yang

dilandasi semangat “agenda suci” keagamaan mereka. Bahkan dalam penelitiannya itu telah terjadi konflik komunal masyarakat agama (Aly, 1996). Maka tidaklah mengherankan jika doktrin agama mengajarkan untuk menebar kasih sayang (*afsus salam*) dan kasih untuk sesama (*love thy neighbor*), tetapi mereka tak segan terlibat dalam praktik kekerasan, tentu mengatasnamakan sebuah “agenda suci” (Smith, 1985).

Dengan demikian, realitas objektif dalam hal tertib sosial atau kehidupan masyarakat, apapun bentuknya, merupakan hasil refleksi manusia dalam memahami agama yang diyakini. Pemahaman atas nama agama seperti itu didasarkan kepada pandangan Peter L. Berger yang menyatakan bahwa agama melahirkan makna stabil dan berfungsi sebagai langit suci (*sacred canopy*) yang senantiasa digunakan aktor untuk mengorganisasikan dan menata struktur kehidupan (Berger, 1991). Dan bagi masyarakat yang berada dalam puncak pelapisan sosial, agama acapkali tidak dipahami sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan, melainkan lebih mudah dimengerti dan dipraktikkan menjadi sebuah instrumen legitimasi bahkan dominasi. Agama tidak dijadikan sebagai payung suci terkait erat dengan urusan dan kehendak manusia berkuasa melainkan dipraktikkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan tersebut.

C. Dinamika politik masyarakat beragama

Dalam permasalahan “Aksi Bela Islam” yang terjadi pada serangkaian peristiwa demonstrasi beberapa tahun lalu 2016, 2017, terlihat berbagai organisasi kemasyarakatan Islam seperti FPI, MMI, HTI, PII, PUI, HMI dan lainnya sebagainya. Meskipun GNPf-MUI telah menempuh jalur hukum, namun gerakan sosial pada “Aksi Bela Islam” tetap menjadi semacam kelompok garis depan dan keras dalam menuntun proses hukum kasus penistaan agama yang terjadi. dengan aksi demonstrasi yang mendorong berbagai unsur aparatur negara agar berperan aktif melakukan kebijakan sesuai moral dan tegas dalam penegakan hukum. Bahkan dalam “Aksi Bela Islam” tersebut, GNPf-MUI dinilai mampu memobilisasi massa Islam dari berbagai kelompok Islam dan lainnya. Massa Islam dari berbagai daerah Indonesia berangkat ke Jakarta untuk Aksi Bela Islam tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, GNPf-MUI terutama peserta “Aksi Bela Islam” jika dalam pembagian kelompok beragama yang dilakukan William James, antara jiwa sehat (*healthy mindedness*) dan jiwa yang sakit (*sick soul*).

Pengikut aksi ini memiliki kecenderungan penuh gairah, terlibat, bersemangat tinggi, dan meluap dengan vitalitas di mana terlihat saat dilakukan demonstrasi. Ciri lain optimistis, bahagia dan spontan, dari kasus “Aksi Bela Islam” yang dilakukan, terlihat pengikut aksi ini dengan lantang dan percaya diri (optimis) menyatakan penista agama harus dihukum, selain itu terlihat dalam “Aksi Bela Islam”, banyak pengikut aksi yang mengaku menangis terharu (bahagia) saat melakukan aksi ini, ditambah setelah ditetapkannya penetapan tersangka kasus penistaan agama, sekalipun belum dipenjarakan.

Lebih lanjut, pembedaan yang dibuat oleh James menciptakan kecenderungan (*trend*) dalam menafsirkan agama sebagai bentuk-bentuk institusional atau kelembagaannya. Dalam penafsiran ini dibedakan dua kelompok penganut agama. Kelompok pertama adalah para penganut agama yang menghayati agama secara formal dan berdasarkan kebiasaan. Kelompok kedua adalah para penganut agama yang memandang agama, tepatnya iman, sebagai keterlibatan yang disadari.

Dalam pandangan ini, “Aksi Bela Islam” yang tergabung dalam GNPf-MUI termasuk dalam kategori kelompok penganut agama yang memandang agama, tepatnya iman sebagai keterlibatan yang disadari. Namun, dalam permasalahan agama intrinsik dan agama ekstrinsik terutama pada permasalahan “Aksi Bela Islam” yang dilakukan, GNPf-MUI cenderung berada dalam kategori agama ekstrinsik saat permasalahannya mengarah ke politik, karena jelas tujuan aksi ini harusnya bukan agenda politik. Terlepas dari bagaimana prinsip dan misi yang diusung GNPf-MUI, permasalahan ini akan memperlihatkan GNPf-MUI termasuk ekstrinsik saat dimana aksi ini dibarengi motif tujuan (orientasi) atau agenda politik. Walaupun memang dalam membahas agama ekstrinsik dan agama intrinsik, setidaknya akan ada dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan nilai yang ada dalam agama. Saat kepentingan pribadi di atas kepentingan nilai agama saat itulah disebut agama ekstrinsik, begitupun sebaliknya saat kepentingan pribadi di bawah kepentingan nilai agama maka disebut agama intrinsik.

Dalam “Aksi Bela Islam” yang dilakukan terlihat aksi ini disusupi orientasi politik sebagaimana setelah Aksi Bela Islam II (411) pada 4 November 2016, intelijen Polri dan TNI telah mendeteksi bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran lanjutan (“Aksi Bela Islam III”) yang diselenggarakan oleh GNPf-MUI pada 2

Desember 2016 (212) telah disusupi dengan agenda terselubung untuk melakukan aksi makar terhadap pemerintah Republik Indonesia (H.T, 2016). Bahkan sebelumnya dalam aksi 4 November 2016 diikuti politikus bernama Fahri Hamzah, yang pada saat itu berstatus sebagai wakil ketua DPR RI, ikut berorasi, yang mana dalam orasinya diduga berisi penghasutan, yakni memberitahukan cara menjatuhkan Presiden Joko Widodo, lalu menuding presiden telah melanggar hukum berkali-kali (Martahan Sohuturon, 2016). Dari hal tersebut menjadi semakin terbukti adanya orientasi politik dalam “Aksi Bela Islam” yang dilakukan, ditambah dengan pemberitaan di media massa ditangkapnya orang-orang yang diduga akan melakukan makar dengan memanfaatkan “Aksi Bela Islam”, menjelang aksi bela Islam III (212) pada dini hari tanggal 2 Desember 2016 oleh pihak kepolisian (Anonymous, 2016b).

Orientasi politik dalam “Aksi Bela Islam” semakin lebih jelas, dimana di dalam situs web resmi FPI, dimuat sebuah artikel yang menyatakan “*Ingat...Ingat...!!! Partai pendukung Ahok haram dipilih di seluruh NKRI karena mendukung penista agama*” (Anon, 2016). Terlihat bagaimana organisasi ini terlibat dalam kampanye terselubung menjelang pilkada DKI Jakarta 2017, yang mana Ahok saat itu ikut mencalonkan menjadi gubernur dalam pilkada DKI Jakarta.

Selain itu, mencermati sikap keagamaan yang dilakukan para demonstran, dapat disimpulkan bahwa sikap dari organisasi ini termasuk bersikap prasangka (*prejudice*). Diketahui saat-saat sebelum “Aksi Bela Islam II dan III” di media sosial terjadi banyak ajakan, isu, provokasi ataupun hasutan untuk mengikuti ataupun menolak aksi bela Islam yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam akun twitter Habib Rizieq dari FPI menganjurkan perusahaan, kantor dan sekolah untuk diliburkan agar pegawai dan pelajar ikut aksi tersebut. Dan juga dalam situs resmi FPI yang menyuarakan untuk “Aksi Bela Islam” dalam bentuk brosur artikel yang berisi “*GNPF-MUI, Seruan Jihad Konstitusional Bela Agama & Negara, Ikutilah !!! Aksi Bela Islam II “Ayo Penjarakan Ahok !!!” Karena Menista Agama, Menodai al-Qur’an, Melecehkan Ulama, Menghina Umat Islam, Ini Bukan Aksi SARA & politik Pilkada tapi ini Aksi Penegakan Hukum, Waktu: Jum’at 4 November 2016 Shalat Jum’at di Istiqlal, Long march: Dari masjid Istiqlal ke Istana Presiden RI, catatan..... Waspadai Pengembosan Aksi Hati-Hati Provokasi*” (Anonymous, 2016a).

Situasi politik ini sebenarnya memberi banyak peluang dan harapan. Peluang bagi lahirnya figur-figur Islam yang diharapkan sekaligus tampilnya gagasan Islam seperti yang diinginkan.

Perbincangan kaitan antara agama dan berbagai macam persoalan keduniaan termasuk politik sering menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini, paling tidak ada dua pandangan besar yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertolak belakang. Yang pertama adalah pandangan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah keduniaan, apakah itu sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Karenanya, antara agama dan persoalan keduniaan tersebut ada kaitan formal. Tentunya bagi orang beragama, argumen ini tidak pantas kiranya memisahkan persoalan-persoalan dunia dari agama. Yang kedua adalah pandangan bahwa bukan saja agama itu berbeda dengan persoalan keduniaan, tetapi antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali, dan karenanya harus dipisahkan. Perdebatan seperti itu biasanya diikuti dengan munculnya penilaian-penilaian yang sifatnya *judgmental* kepada masing-masing pendukung pandangan di atas. Mereka yang mendukung pandangan yang pertama sering diasosiasikan sebagai pemeluk agama yang skriptualis atau fundamentalis. Sedangkan mereka yang mendukung pendapat yang kedua biasanya dihubungkan dengan sikap hidup sekuler (Effendy, 2000).

Namun tidak semua pernyataan bahwa agama dan politik memiliki keterkaitan seperti yang dibenarkan oleh sebagian pihak di atas tadi, karena bagi beberapa orang di antaranya ada pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada keterlibatan agama dalam politik praktis, pendapat ini menganggap bahwa politik memiliki wilayah yang berbeda, bahkan berseberangan dengan agama (Kahmad, 2011). Karenanya agama merupakan persoalan pribadi (*Private*), sedangkan politik adalah hal lain di luar urusan agama. Menurut Bahtiar Effendy bagi mereka yang mendukung atas pandangan bahwa agama tidak dipisahkan dari persoalan keduniaan baik sosial, budaya, maupun politik diasosiasikan sebagai pemeluk agama yang skriptualis atau fundamentalis, sedangkan mereka yang mendukung pendapat bahwa agama sama sekali tidak memiliki keterkaitan dan karenanya harus dipisahkan adalah mereka yang memiliki sikap hidup sekluer.

Namun yang ingin ditekankan adalah bahwa agama bukanlah sesuatu yang pada dasarnya bersifat pribadi melainkan publik. Seperti yang

dikemukakan sosiolog terkemuka Robert N. Bellah sebagai agama sipil dan Jose Casanova yang menyebutkan sebagai sesuatu yang *civic* (publik) atau *deprivatized* (tidak bersifat pribadi). Dengan demikian, secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrument Illahiah untuk “memahami” dunia. Secara *omnipresent* agama mampu “hadir di mana-mana” melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya. Dan begitu pula secara sosiologis, tidak jarang agama pun menjadi faktor penentu dalam proses transformasi dan modernisasi kehidupan.

Dalam kurun waktu yang panjang, keterkaitan agama dan politik menjadi persoalan yang menarik, bahkan *interplay* antara agama dan politik juga semakin mengental. Seperti yang dilihat oleh beberapa sosiolog, hubungan antara agama dan politik kini tengah bergerak ke “kanan”, seperti halnya di Spanyol, Brazil dan Amerika Serikat menurut Richard Falk sebagai “*politically engaged spirituality*” merupakan fenomena yang sedang berkibar (Kahmad, 2011). Pertalian agama dengan politik seperti ini tidak terjadi dalam bentuknya yang konstruktif, sebagian bisa terjadi karena terekspresikan dalam pola-pola simbolistik dan formalistik. Karenanya menurut Bahtiar Effendy hal ini dapat menimbulkan konflik atau ancaman dan bukan rahmat.

Hubungan antar variabel politik dan agama inilah yang kemudian menjadi perhatian publik, karena banyak variabel agama dan politik ini secara bersama-sama diperankan oleh sejumlah tokoh dan pemuka agama (Muhtadi, 2008). Ketika hubungan keduanya terjadi dalam masyarakat yang memiliki sensitifitas agamanya tinggi, maka suhu politik menjadi semakin panas. Sejumlah kasus yang berkaitan dengan fenomena pemanfaatan agama sebagai saluran potensial dakwah politik yang diperankan para tokoh agama. Persoalan yang berkenaan dengan person sosial politik pemuka agama tersebut dapat menjadikan isu agama sebagai salah satu bentuk saluran potensial komunikasi politik (Muhtadi, 2008).

Banyak orang menanggapi isu dan saluran komunikasi alternatif dengan cara yang berbeda-beda. Pandangan politik semacam ini mendapat penolakan dari model klasik warga demokratis yang menyimpulkan bahwa ketika orang menanggapi isu: (1) orang lebih cenderung menanggapi komunikasi dan merumuskan atau mengubah pandangan mereka jika isunya relatif baru, tak berstruktur atau jauh dari mereka; (2)

komunikasi mengenai isu lebih efektif pada isu sampingan ketimbang isu pokok, semakin penting isu itu bagi seseorang maka semakin besar kemungkinan opini orang itu tetap stabil dalam menghadapi argumentasi yang bertentangan; (3) komunikasi mengenai isu sebagai isu lebih kecil kemungkinan efektifnya dibandingkan dengan komunikasi mengenai personal sebagai isu (Nimmo, 2010).

Tidaklah mengherankan juga ketika banyak kegiatan keagamaan yang bernuansa politik diadakan hanya sekedar untuk menarik simpati suara masyarakat beagama sebagai pemilih, seperti pada kegiatan peringatan hari besar keagamaan, aktivitas pengajian dan sebagainya. Keterlibatan elite politik dalam memainkan peran agama dirasa mampu meningkatkan popularitas, serta akseptabilitas atau kelayakan untuk diterima dengan cara menyentuh sisi emosional umat beragama dengan maksud agar apa yang diinginkan dapat terwujud (Kahmad, 2011). Strategi semacam ini dinilai ampuh untuk mendongkrak suara pemilih yang dalam kategori belum rasional (Muchlis, 2008), karena masyarakat Jakarta sebagai pemilih masih memiliki sensitivitas agama, sehingga mudah diajak jika menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan agama.

Harus diakui, persoalan “Aksi Bela Islam” tidaklah sederhana yang kita duga. Bukan karena sulitnya melihat relasi antara aktor penggerak aksi dengan elit politik yang mempunyai kepentingan dibaliknya. Melainkan, karena makin kaburnya peta kelompok-kelompok Islam yang terlibat di dalam kegaduhan ini. Dengan ini tidak bisa dikatakan bahwa para pendukung aksi massa sebagai “Islam Fundamentalis Sunni” karena dikomandoi oleh FPI. Karena buktinya, tidak sedikit yang terlibat dalam aksi adalah mereka yang biasa dikelompokkan ke dalam Islam moderat seperti NU.

Bahkan, banyak kyai dan santri NU yang terlibat di dalamnya. Berada pada posisi ini, misalnya, Kyai Ma'ruf Amin. Selain menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), beliau juga menjabat sebagai Rais Am PBNU yang merupakan pucuk tertinggi dalam struktur PBNU. Atau kiai Salahudin Wahid, pengasuh pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Bagaimana kita akan mengkategorikan kedua aktor tersebut? Apakah bisa disebut sebagai Islam fundamentalis karena turut menyerukan perjuangan “Aksi Bela Islam” atau sebagai Islam Moderat karena keduanya orang penting di

lingkungan NU, yang oleh banyak pengamat Islam Indonesia dianggap sebagai representasi Islam Moderat? Maka, pada kasus “Aksi Bela Islam”, kategori-kategori yang sudah mapan seperti fundamentalis, moderat, intoleran, toleran, demokratis dan anti demokrasi menjadi sangat kabur dan tidak lagi terang batasannya.

Meski demikian, jika dipetakan secara sederhana posisi dominan antar kelompok Islam yang terlibat dalam pro dan kontra “Aksi Bela Islam” setidaknya ada dua: *Pertama*, Islam Politik sebagai pendukung utama aksi. Mereka menganggap apa yang sedang diperjuangkannya sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) yang harus ditanggung oleh semua kaum muslim. Bahkan, salah satu argumen para kyai dan santri yang berafiliasi pada NU, yang terlibat dalam “Aksi Bela Islam” mendasarkan perjuangannya pada pernyataan pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, yang kurang lebih menganjurkan umat Islam untuk turut membela agama Islam dan sekuat tenaga berusaha menangkis atau menolak orang yang menghina al-Quran dan sifat-sifat Allah.

Pernyataan tersebut akan menjadi sangat problematis jika dipahami secara harfiah. Seandainya dipahami secara substansial, maka “Aksi Bela Islam” sebagaimana yang tengah berlangsung tak akan pernah terjadi. Bukankah kita sendiri, umat Islam, yang justru seringkali menghina al-Quran karena tidak mampu mengamalkannya dalam praktik hidup sehari-hari secara total dan konsekuen? Mungkin, apa yang sedang diperjuangkan dalam “Aksi Bela Islam” tidaklah substansial, bahkan berpotensi besar mereduksi ajaran Islam mengenai kemanusiaan yang bernilai universal. Namun kita juga tidak boleh naif dengan menganggap aksi semacam ini sesuatu yang homogen. Semua pihak yang terlibat di dalamnya membawa kepentingannya masing-masing dengan perekat utamanya adalah dugaan penistaan agama.

Kedua, Islam Moderat, sebagai penolak utama aksi. Penilaian Islam Moderat pada aspek teologis, dalam melihat “Aksi Bela Islam” meskipun tepat, sayangnya masih terjebak pada penilaian esensialis. Melalui cara pandang semacam ini, Islam Moderat tidak bisa melepaskan diri dari prasangka yang dibangunnya sendiri yaitu bahwa setiap aksi massa, apalagi ketika diusung oleh pihak yang terlanjur dilabeli sebagai Islam fundamentalis, otomatis akan terjadi kerusuhan, atau berefek negatif secara sosial dan politik. Maka wajar jika kita dapati

tanggapan mereka terhadap aksi massa cenderung alergi dan sinikal.

Praktik penggunaan isu-isu agama dalam politik sangat bervariasi, baik simbol, tempat, maupun *statement* yang digunakan. Dalam konteks ini, penggunaan isu agama dalam kampanye dilandasi keyakinan bahwa masyarakat akan memberikan pilihan politiknya kepada pasangan calon yang yang memiliki kualitas keberagaman yang baik dan benar. Untuk itu, setiap pasangan calon berupaya mencitrakan dirinya sebagai yang agamis, bahkan kalau perlu memanipulasinya (Kahmad, 2011). Betapa pun politik mampu memainkan peran agama dalam kehidupan masyarakat, politik akan terus melahirkan pertentangan atau ketidaksepakatan. Hanya saja temperatur pertentangan tersebut kadang melemah kadang menguat, tergantung dinamika politik, di mana tingkah laku pihak yang berkuasa terhadap lawan politiknya sangat menentukan suhu pertentangan tersebut (Mintarja, 2011).

Selain itu, masih banyak penggunaan isu-isu agama dalam perhelatan politik Pilkada Jakarta, baik secara simbol atau pun *statement* yang digunakan setiap pasangan calon. Jika digunakan perspektif teori dramaturgi, perilaku politik setiap pasangan calon dapat dilihat dari sebagai drama sehingga tindakan manusia bergantung pada waktu, tempat dan audiensi yang dihadapi (Kahmad, 2011). Praktik kampanye yang dilakukan melalui aktivitas keagamaan misalnya, menjadikannya sebagai wahana *front stage* tempat para pasangan calon akan berhadapan dan dilihat oleh masyarakat agama, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tuntutan peran (*expectation and role*) yang dimainkan. Sementara di luar momen kampanye (*back stage*) para pasangan calon bisa keluar dari citra dan skenario yang dimainkan dalam setiap kampanye (Kahmad, 2011).

D. Analisis Hasil; Latar Belakang dan Dampak Aksi Bela Islam

Fenomena “Aksi Bela Islam” yang terjadi pada momentum Pilkada DKI Jakarta dewasa ini, menunjukkan adanya dinamika atau pun gelombang gerakan sosial masyarakat beragama. Jika menggunakan perspektif sosiologi dapat memudahkan dalam pembahasan ini. Pasalnya, perspektif ini mencoba mendalami tentang hakikat dan berbagai sebab terjadinya keteraturan pola pikiran dan tindakan manusia yang berulang-ulang sebagai bagian dari anggota suatu kelompok masyarakat (Kahmad, 2011). Salah satu di antara yang berkaitan dengan pola pikir dan tindakan manusia tersebut adalah faktor

keagamaan, politik dan budaya mereka dalam sistem sosial. Untuk memulai pembahasan tersebut, perlu melihat konteks struktural-historis dari kemunculan aksi tersebut dan profil sosiologis itu sendiri.

Sosiologi agama (Hidayat, 2012)⁵ secara khusus memfokuskan pada kajian tentang perilaku masyarakat beragama, bukan hanya pada kebenaran ajaran agamanya saja. Sosiologi agama menyelami alam pikiran penganut agama yang dikajinya tanpa harus mengidentifikasi dirinya dengan agama yang dikajinya (Kahmad, 2011). Di samping itu, memahami sosiologi agama berarti menciptakan suatu risalah tentang agama di dunia modern (Turner, 2012). Pemahaman makna yang diberikan dalam bidang ini adalah pemahaman masyarakat tertentu pada sistem agamanya sendiri yang mencakup hubungan agama dengan struktur sosial, dan hubungan agama dengan aspek budaya, bukan agama, seperti magi, sains dan teknologi. Salah seorang yang memberikan sumbangannya dalam bidang sosiologi agama ini adalah Emile Durkheim, yang menempatkan masyarakat pada posisi utama atau yang sakral sedangkan di luar hal masyarakat adalah profan. Durkheim mengklaim, tanpa adanya masyarakat, maka tak satu pun yang akan muncul dalam kehidupan kita, termasuk agama (Pals, 2011).

Berbeda halnya dengan sosiologi politik, menurut Tom Bottomore dalam *Political Sociology* (1979) menyebutkan bahwa sosiologi politik selama ini mengkaji “power” atau kekuasaan dengan berbagai konsepnya yang beragam, termasuk perhatiannya yang hampir sama seperti otoritas, pengaruh, kekuasaan dan atau kekerasan. Lebih lanjut Bottomore memaknai sosiologi politik sebagai perdebatan tentang peran Negara dan relasinya dengan kewargaan (*civil society*) dan determinasi dalam transformasi masyarakat menuju demokrasi (Maliki, 2010). Di samping itu, dalam kaitan dengan relasi politik dan agama, sosiologi politik juga mengkaji transformasi masyarakat melalui pendekatan sekuler, organik dan yang memilih melakukan diferensiasi antara sekuler dan organik (Maliki, 2010). Menurut Kuntowijoyo, Islam sendiri mengakui adanya diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial (Kuntowijoyo, 1991).

Objek kajian sosiologi politik terbelah antara mereka yang memfokuskan kepada transformasi

masyarakat dengan memilih jalan revolusi industri seperti halnya yang diikuti oleh Pareto dan Mosca dan Perspektif Marxian yang memilih menekankan kepada pentingnya analisa klas dalam sebuah formasi sosial, dan kajian sosiologi politik dengan memilih fokus kajian revolusi demokrasi. Bottomore memiliki kecenderungan bahkan tertarik pada pentingnya stabilitas dan mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan perubahan, sebagaimana dapat diikuti dalam pemikiran Durkheim, atau Huntington dalam politik (Maliki, 2010). Akan tetapi, ada pula sosiolog yang memberikan pandangan bahwa justru instabilitas dan perubahan diabaikan adalah tema yang tidak bisa dielakkan dari proses transformasi politik di masyarakat macam apapun.

Betapapun agama dan politik memiliki wilayah kerja masing-masing, tetapi keduanya hidup dalam sosio-kultur masyarakat yang menjadikan keduanya sebagai bagian yang sulit untuk dihapuskan. Dalam pengalaman sejarah manusia, sekali-kali pernah kita jumpai ketidakharmonisan antara berbagai kegiatan budaya manusiawi. Bahkan sebaliknya, sering kali terjadi pertarungan terus menerus antara berbagai kekuatan yang saling bertentangan. Misalnya pemikiran ilmiah bertentangan dan mendepak pemikiran mistis, begitu pun ketika mencapai puncak etis dan teoritisnya, agama perlu mempertahankan kemurnian cita-citanya, menentang sesuatu yang bukan terlahir dari rahimnya, termasuk politik dan khayalan yang melingkupi mitos. Antagonisme semacam ini tidak seutuhnya dibenarkan, karena bagi sebagian pendapat menyatakan bahwa sejatinya agama merupakan hal yang senantiasa bersentuhan dengan lingkungan sosial seharusnya menjadikan apa yang ada di luar dirinya sebagai bagian integral dari suatu agama. Demikian agama tidak lagi menjadi persoalan privat yang hanya sekedar melakukan proses ritual vertikal semata, tetapi diperlukan ritual-ritual horizontal yakni dalam persinggungannya dengan dunia sosial termasuk persoalan politik.

Selama persentuhannya dengan politik, agama senantiasa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dari banyaknya orang-orang atau masyarakat yang beragama terlepas agama apa yang mereka anut atau

⁵ Agama secara gramatikal adalah tidak kacau, lebih lengkap menurut Wuraish Shihab dalam kata pengantar buku Agama Punya Seribu Nyawa, mendefinisikan agama sebagai hubungan manusia dengan satu kekuatan yang

jauh melebihinya dimana manusia patuh kepada kekuatan itu yang kemudian makna “kekuatan” ditekankan pada Sang pencipta alam, yakni Tuhan.

percaya menurut keyakinannya itu. Semisal di Indonesia, agama Islam menjadi agama mayoritas penduduknya. Tentu hal semacam ini tidak dapat dilepaskan dari besarnya pengaruh yang diberikan Islam bagi bangsa Indonesia, dan juga proses transformasi politik dalam memasyarakatkan Islam di tanah Indonesia ini. Akan tetapi apakah keuntungan yang didapatkan agama dalam memainkan percaturan politik tersebut berdampak nyata pada perilaku politik seseorang dalam menjadikan agama sebagai basis atau spirit perubahan sosial dengan jalan untuk mendapatkan keinginan bagi para pemangku kepentingan politik.

“Aksi Bela Islam” adalah sebuah kenyataan. Peristiwa tersebut menyegarkan kembali imajinasi politik bangsa bahwa gerakan Islam di Indonesia saat ini masih menunjukkan eksistensinya, sekalipun berada pada posisi yang tertekan dalam partai politik. Termasuk yang maujud ke dalam rentetan aksi massa yang terjadi di tengah kondisi politik DKI Jakarta saat ini yang begitu panas. Salah satu hal yang menjadi alasan munculnya gerakan sosial ini ialah ketika identitas agama mereka terusik. Umat hanya mudah terbakar emosi ketika seorang non-Muslim menghina ayat al-Quran dan akan merasa paling beriman ketika menuntut keadilannya dengan turun mengaliri jalanan bersama ribuan umat sesamanya yang diperintahkan oleh sebuah fatwa yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Guncangan “Aksi Bela Islam” telah membuat banyak kalangan harus saling bertemu, berunding dan menegosiasikan kesepakatan, mulai dari soal aksi harus berjalan damai, tentang tuntutan hukum penodaan agama harus tuntas, hingga ditangkisnya sejumlah orang yang kena tuduhan makar. Hal ini yang kemudian mendorong Presiden Joko Widodo mengunjungi Prabowo Subianto, mantan musuhnya saat pemilihan presiden 2014, dalam rangka mengurangi kemungkinan ketegangan yang bakal terjadi selama aksi tersebut. Sementara itu, para tokoh senior TNI berspekulasi kemungkinan akan kekhawatiran lahirnya “*Arab Spring*”, ini merujuk pada demonstrasi besar yang berlangsung di Timur Tengah yang mampu menurunkan rezim penguasa. Sedangkan analisis lain mengingatkan kemungkinan “Aksi Bela Islam” tersebut disusupi oleh para simpatisan ISIS.

Identitas politik kini menemukan suasana baru yang bertarung dan beradu kekuatan dengan memanfaatkan aksi massa. Bahkan banyak analisis yang melihat ini sebagai gerakan yang

harus diakui hasil dari kumpulan situasi konflik sosial yang kompleks. Hal ini bias saja disebabkan karena telah meningkatnya intoleransi dan ekstrimisme agama yang dibiarkan merajalela oleh pemerintah, dengan asumsi ketakutan akan “*Islamic backlash*” (pukulan balik dari kekuatan Islam). Atau sebagaimana yang diargumentasikan oleh ahli lain, bahwa “Aksi Bela Islam” hanyalah kasus elit politik yang memobilisasi massa sebagai bagian dari strategi menjelang Pilkada (An, 2016).

Sandaran “Aksi Bela Islam” tersebut adalah penghinaan, hujatan dan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Predikat sandaran ini dianggap yang layak didengungkan untuk merebut simpati massa yang selama ini dianggap memilih pasif dan diam. Setidaknya, “Aksi Bela Islam” telah menunjukkan kekuatan untuk menumbuhkan kesadaran keagamaan yang meyakini bahwa mayoritas itu bukan sebuah angka statistik tapi kumpulan massa yang bisa digerakkan.

Pilar kekuatan yang terjadi pada peristiwa ini menjadi diperhitungkan ketika aparat mulai berusaha menegosiasikan bahkan mencegah mobilisasi melalui berbagai cara. Larangan dari ulama maupun pimpinan ormas ternyata tak cukup manjur, bahkan himbauan dan larangan dari kepala daerah juga tak mempan. Larangan tak hanya berhasil ditangkis, tetapi juga meningkatkan antusiasme massa untuk ikut terlibat. Lautan massa pada “Aksi Bela Islam” tersebut telah menciptakan banyak kisah “ajaib” yang mampu mempererat keyakinan atas apa yang mereka harapkan. Harapan pada pemerintah untuk menghukum Ahok hingga menuntut pemerintah untuk mendengar aspirasi mereka. Meskipun yang paling membuat bangga tidak lain adalah keyakinan baru bahwa kekuatan massa Islam tidak sekecil yang diduga. Ibarat ranting yang kini berusaha membuat pohon dengan melipat gandakan kesadaran atas keunggulan Islam dan bahkan mempercayai Islam sebagai perekat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang semenjak dulu tetap bersaing dengan banyak ide-ide politik lainnya.

Apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta saat ini adalah agama dipakai sebagai alat kepentingan politik untuk menjegal salah satu pasangan calon Gubernur. Sekalipun belakangan ini banyak himbauan tentang “jangan bawa-bawa agama” atau “jangan gunakan agama” semakin mudah kita temukan dalam berbagai frasa. Bahkan setelah Ahok resmi menjadi cagub (calon gubernur) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), frasa yang paling

ramai diucapkan dari himbauan itu adalah “jangan gunakan Islam sebagai alat politik.”

Bukan hanya para pendukung Ahok saja yang menggunakan himbauan ini untuk menjawab orang-orang yang menentang Ahok lantaran beragama Kristen. Beberapa penentang Ahok pun turut menggunakan himbauan semacam ini. Ali Taher, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung pasangan Agus-Silvy, misalnya, meminta Ahok “jangan menyalahgunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik.”. Artinya, himbauan ini dapat digunakan oleh siapa pun yang menganggap lawannya *off-side* dalam urusan agama dan politik. Persoalannya, bagi gerakan-gerakan Islam tertentu garis *off-side* ini tak pernah ada.

Sebagaimana dicatat oleh (Kumar, 2012), sejak awal abad ke 20, muncul gerakan Islam bertujuan politik mengembalikan supremasi Islam dari gerusan kolonialisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh muslim seperti Hasan Al-Bana dan Abul Ala al-Maududi. Gerakan yang kemudian di kenal sebagai Islam Politik ini sejak lama telah berada di Nusantara, menjadi bagian dari apa yang telah di pahami sekarang sebagai Islam Nusantara itu sendiri dan bisa melihat mereka ada dalam “Aksi Bela Islam” sebagai salah satu kekuatan dominan.

Ada banyak prasangka-prasangka tidak sehat yang dilancarkan terhadap gerakan Islamis. Salah satu yang paling sering dikemukakan di media sosial atau spanduk di jalanan adalah himbauan “tidak menggunakan Islam untuk politik”, himbauan ini sama halnya dengan menghimbau “jangan gunakan oksigen untuk bernapas”. Kondisi yang terjadi pada “Aksi Bela Islam” dianggap bahwa gerakan ini tidak pas dengan kondisi nusantara dan harus diasingkan ke Timur Tengah. Padahal ini merupakan pandangan yang sama membingungkannya, yang menganggap semua kekerasan berasal dari Arab dan harus dikembalikan ke Arab, ada pula prasangka merendahkan yang menganggap setiap “Aksi Bela Islam” tersebut merupakan kerumunan pengangguran yang mengharap nasi bungkus.

“Aksi Bela Islam” yang dilakukan oleh sejumlah elemen gerakan Islam, sepertinya semakin mengkonfirmasi penilaian tersebut. Gabungan dari berbagai ekspresi politik, mulai dari sentimen etno-religius yang puritan hingga

rasis-sektarian, kekecewaan politik, politik patronase elit, hingga ekspresi kelas, bercampur baur menjadi satu dan sulit terbedakan satu sama lain. Di sisi lain, peristiwa “Aksi Bela Islam” itu sebagai pertarungan antara “umat Islam” dengan “penguasa yang dzalim” atau, lebih parahnya lagi, “Cina Kafir”.

Kecenderungan kultural dari motif tersebut sering dieksploitasi oleh kalangan elite politik dan tokoh agama yang terlibat dalam Pilkada. Maka tidaklah mengherankan ketika banyak kegiatan keagamaan yang bernuansa politik diadakan hanya sekedar untuk menarik simpati suara masyarakat beagama sebagai pemilih, seperti pada kegiatan peringatan hari besar keagamaan, aktivitas pengajian dan sebagainya. Keterlibatan elite politik dalam memainkan peran agama dirasa mampu meningkatkan popularitas, serta akseptabilitas atau kelayakan untuk diterima dengan cara menyentuh sisi emosional umat beragama dengan maksud agar apa yang diinginkan dapat terwujud (Kahmad, 2011). Strategi semacam ini dinilai ampuh untuk mendongkrak suara pemilih yang dalam kategori belum rasional (Muchlis, 2008), karena masyarakat Jakarta sebagai pemilih masih memiliki sensitivitas agama, sehingga mudah diajak jika menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan agama.

Sebagai masyarakat yang beragama, masyarakat Jakarta tidak dapat melepaskan segala bentuk perilakunya dari baju kebesaran yang disebut dengan “agama”. Meminjam istilah Muammar Qadhafi yang dikutip oleh Endang Mintarja, bahwa peranan agama dalam kehidupan bernegara dapat menjadi landasan hukum nasional (Mintarja, 2011). Senada dengan ungkapan Benton Johnson, bahwa hal semacam ini dapat dilihat sebagai pertanda bangkitnya kesadaran kolektif masyarakat akan arti penting agama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik Negara itu, karena agama dianggap dapat memberikan motivasi, dorongan dan stimulan bagi perubahan sosial yang diharapkan (Effendy, 2000). Demikian pula secara sosiologis, kadar keberagamaan masyarakat memiliki pengaruh pada perilaku politik masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena semakin agama itu diyakini dengan keyakinan yang benar oleh penganut karakter seseorang akan “berwarna agama” lebih kental (Kahmad, 2011).⁶ Maka jika menggunakan analisa perspektif

⁶ Dalam praktiknya, agama diapresiasi oleh masyarakat secara berbeda, berikut tipe-tipe masyarakat dan agama

menurut Dadang Kahmad diantaranya : *Tipe Pertama*, masyarakat yang terbelakang dan nilai sakral termasuk

Durkheim, maka agama dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan keyakinan yang mengikat kehidupan bersama dalam ritual dan pengalaman keagamaan yang sakral (Maliki, 2010). Meskipun pendapatnya ini tidaklah diamini secara mutlak, tetapi pesan yang disampaikan Durkheim menjadi salah satu *Grand Theory* dalam sistem perubahan sosial suatu masyarakat.

Simpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, mulai pengumpulan hingga interpretasi data lapangan, kesimpulan penelitian ini mengajukan beberapa kesimpulan berkaitan dengan pokok tentang pemahaman masyarakat tentang keterkaitan agama dan politik dalam dinamika Pilkada Jakarta.

Dari hasil temuan penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, “Aksi Bela Islam” menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gerakan Islam di Indonesia saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas politik bangsa, sekalipun berada pada posisi yang tertekan dalam partai politik. Termasuk yang maujud ke dalam rentetan aksi massa yang terjadi di tengah kondisi politik DKI Jakarta tersebut.

Salah satu hal yang menjadi alasan munculnya gerakan sosial “Aksi Bela Islam” tersebut ialah ketika salah satu identitas agama Islam diusik yakni ketika seorang non-Muslim (Ahok) dianggap telah menghina ayat al-Quran sehingga menyulut umat Islam yang dengan mudah terbakar emosinya dan mereka menuntut keadilannya dengan turun mengaliri jalanan bersama ribuan umat sesamanya yang diperintahkan oleh sebuah fatwa yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Kehadiran agama dalam realitas politik seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta ini, terdapat dua pandangan masyarakat tentang ada atau tidaknya isu-isu agama yang dijadikan alat politik bagi para kandidat. Sebagian kecil ada di antara mereka yang menilai bahwa isu-isu yang dijadikan para kandidat dalam kampanye politik

cenderung tidak menggambarkan adanya penggunaan atas nama agama.

Alasan yang mereka gunakan karena kebanyakan masyarakat yang memperlakukan kasus penistaan al-Quran yang dilakukan Ahok sebagaimana yang sering dialamatkan oleh umat Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi hal itu terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat akan budaya dan seni itu sendiri, pernyataan semacam ini terutama banyak diungkapkan oleh masyarakat kalangan non-muslim, sekalipun di antara muslim itu sendiri ada yang berpendapat serupa.

Meskipun adanya pro kontra tentang penggunaan isu-isu agama dalam Pilkada, senyatanya isu-isu yang digunakan oleh para kandidat bersama tim suksesnya telah membawa implikasi tersendiri bagi masyarakat Jakarta. Masyarakat sering kali dihadapi dengan pertentangan sosial sebagai dampak dari perilaku politiknya baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis, maka tidak heran munculnya beragam konflik horisontal yang berlatarbelakang masalah Pilkada Jakarta.

Kedua, Secara garis besar kehadiran agama dalam aksi demonstrasi bernuansa agama tersebut akan selalu disertai dengan dua muka (*Janus-face*). Secara inhern, agama memiliki identitas yang eksklusif, partikularis dan primordial. Tetapi agama juga kaya akan identitas yang bersifat inklusif, universalis dan mengatasi (*transcending*). Sehingga penggunaan isu yang berlandaskan agama merupakan salah satu bukti untuk menjustifikasi bahwa agama dan politik tidak dapat dilepaskan, keduanya saling mengisi satu sama lain, meskipun di antara agama dan politik memiliki ciri yang dapat membedakan keduanya.

Penggunaan isu yang berlandaskan agama merupakan salah satu bukti untuk menjustifikasi bahwa agama dan politik tidak dapat dilepaskan, keduanya saling mengisi satu sama lain, meskipun di antara agama dan politik memiliki ciri yang dapat membedakan keduanya. Di antara isu-isu agama yang digunakan dalam Pilkada Jakarta tersebut bisa berupa penggunaan simbol

dengan populasi yang lebih banyak pula. Dalam tipe ini agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak memberikan dukungan yang sempurna terhadap aktivitas sehari-hari. *Tipe Ketiga*, masyarakat industri dan sekuler. Ciri yang menonjol dalam masyarakat tipe ini adalah ditandai oleh kompleksitas organisasi keagamaan yang terpecah dan bersifat majemuk juga sudah terbiasa menggunakan metode empirik berdasarkan penalaran dan efisiensi dalam merespons permasalahan kemanusiaan. *Tipe Keempat*, percampuran antara tipe masyarakat di dunia modern.

masayarakat kecil, terisolasi dan terbelakang. Tipe masyarakat ini menganut agama yang sama, karenanya keanggotaan mereka dalam masyarakat dan dalam kelompok keagamaan adalah sama. Bagi tipe ini agama tidak semata-mata sebagai suatu dukungan terhadap adat istiadat, tetapi sampai pada tingkat tertentu yang merupakan sistem tingkah laku atau tandingan terhadap sistem yang sudah disahkan. *Tipe Kedua*, masyarakat praindustri sedang berkembang yang memiliki karakter tidak terisolasi, berubah lebih cepat, daerahnya lebih luas

keagamaan, *statement*, tokoh dan tempat yang digunakan oleh para kontestan dan konstituen politik yang terjadi di Jakarta.

Terlepas daro adanya pro dan kontra tentang penggunaan isu-isu agama dalam Pilkada, senyatanya isu-isu yang digunakan oleh para kandidat bersama tim suksesnya telah membawa implikasi tersendiri bagi masyarakat Jakarta. Terutama langkah tersebut telah membentuk identitas politik baru yang mampu menggring opini massa untuk mengambil bagian terhadap sikap politiknya. Bahkan dampak lainnya, masyarakat sering kali dihadapi dengan pertentangan sosial dari perilaku politiknya baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan tempat mereka tinggal, maka tidak heran memunculkan beragam konflik horisontal yang terjadi saat itu dan dilatarbelakangi perbedaan pandangan atas sikap dan realitas politik Pilkada Jakarta.*

Referensi

- Ahmad Suaedy, D. (2007). *Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia*. The Wahid Institute.
- Aly, F. (1996). *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Kebaruan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*. Risalah Gusti.
- An. (2016). *Menuju Islam bergerak yang Hakiki*. [Http://Islambergerak.Com/](http://Islambergerak.Com/).
<http://islambergerak.com/2016/12/menuju-bela-islam-yang-hakiki>
- Anon. (2016). *Haram Pilih Partai Pendukung Ahok*. [Www.fpi.or.id](http://www.fpi.or.id).
www.fpi.or.id/2016/haram-pilih-partai-pendukung-ahok.html?m=0
- Anonimous. (2016a). *ikutilah-aksi-bela-islam*. www.fpi.or.id/2016/10/ikutilah-aksi-bela-islam-ii-ayo.html?m=0
- Anonimous. (2016b). *Kapolri: Penangkapan Terduga Pelaku Makar sudah di-setting sebelum aksi 212*. [Www.okezone.Com](http://www.okezone.com).
www.okezone.com/read/2016/12/05/337/1558969/kapolri-penangkapan-terduga-pelaku-makar-sudah-di-setting-sebelum-aksi-212
- Berger, P. L. (1991). *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. LP3ES.
- Effendi, M. R. (2013). *Isu-isu Agama Dalam Pilkada Purwakarta*. UIN SGD Bandung.
- Effendy, B. (2000). *Re-Politisasi Islam; Pernakab Islam berhenti Berpolitik?* (A. S. Sudajat (ed.)). Mizan.
- Grose, G. B. (1998). *Tiga Agama Satu Tuhan; Sebuah Dialog* (S. I. Astuti (ed.)). Mizan.
- Hasbullah. (2011). *Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada)*. *Ushuludin*, XVII(2), 170.
- Hidayat, K. (2012). *Agama Punya Seribu Nyawa*. Noura Book.
- H.T, D. (2016). *Ada Agenda Makar, Polri Larang Demo 2511 dan 212*. www.kompasiana.com/danielht/ada-agenda-makar-polri-larang-demo-2511-dan-212_5832e44faf7e61a5048b4573
- Kahmad, D. (2011). *Sosiologi Agama; Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas*. Pustaka Setia.
- Karyono, R. (2003). *Fundamentalisme Dalam Kristen- Islam*. Kalika Press.
- Koentowijoyo. (1991). *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*. Mizan.
- Kumar, D. (2012). *Islam Politik Sebuah Analisis Marxis*. Indo Progress.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Politik; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. UGM Press.
- Martahan Sohuturon. (2016). *Fabri Hamzah dilaporkan ke Polisi terkait orasi di demo #411*. [Www.Cnnindonesia.Com](http://www.cnnindonesia.com).
www.cnnindonesia.com/nasional/20161111194623-12-172126/fabri-hamzah-dilaporkan-ke-polisi-terkait-orasi-di-demo-411/
- Mintarja, E. (2011). *Politik Berbasis Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, C. (2008). *Membenahi Manajemen Pemilu*. KPUD Tasikmalaya.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia; Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Remaja Rosdakarya.
- Mhubbin. (2012). *Politik Kiai Versus Politik Rakyat; Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiai*. Pustaka Pelajar.
- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Remaja Rosdakarya.
- Pals, D. L. (2011). *Tujuh Teori Agama-agama*. Ircisod.
- Sindhunata. (2006). *Kambing Hitam; Teori Rene Girard*. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, D. E. (1985). *Agama dan Modernisasi Politik; Suatu Kajian Analitis* (M. Hussein (ed.)). Rajawali Press.
- Subekti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Turner, B. S. (2012). *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer* (I. R. Munzir (ed.)). Ircisod.
- Twiss, J. K. dan S. B. (1997). *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*. Interfidei.

Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Animasi terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo

Eliya Hakiki Nur Sugini^{a, 1*}, Abdul Basit^{a, 2}

^a Program Studi PPKn FKIP Universitas Panca Marga, Probolinggo

¹ Elliyahakikinursugini@gmail.com; ²abdulbasitupm@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

11-03-2020

Disetujui:

04-04-2020

Kata kunci:

Pengaruh
Media Pembelajaran
Berbasis Animasi
Minat Belajar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo. Penggunaan media pembelajaran berbasis animasi diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peneliti ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis korelasional. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan nonProbability Sampling dimana sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin yang berjumlah 45 peserta didik. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert's yang berupa Angket yang berisi 10 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Teknis pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan angket. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung sebesar -35.206 dan t table sebesar $(-)$ $1,68$. Jadi hitung $(-35.206) > t$ tabel 1.68 atau signifikan $0,000 <$ dari $0,05$ maka dengan demikian terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin. Berarti H_0 : di tolak dan H_a : diterima. Yang artinya ada pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo.

ABSTRACT

The effect of animation-based learning media on students' interest in learning.

This research aims to find out the effect of the use of animation-based learning media on the learning interest of students in grade VII Alimuddin Islamic High School in Probolinggo regency. The use of animation-based learning media is expected to help the learning process and improve student learning outcomes. This study used the research method namely quantitative research with correlation analysis. While the sample taking technique used Sampling where the sample used was grade VII Alimuddin Islamic High School non Probability Sampling, which amounted to 45 students. The research instrument in this research damaged the likert scale with Angket inserts 10 questions with 4 questions. Data collection techniques use archivist based observation and angkets. Research obtained in this study indicates that this calculation t is uncountable -35.206 and t table calculation $(-)$ $1,68$. So calculate $(-35.206) > t$ table 1.68 or significant $0,000 <$ from $0,05$ So there is the animated learning media influence over class learners interest in grade VII Alimuddin Islamic High School. Meaningless H_0 : rejected and H_a : received. Which means that there,s an animated learning media influence over class learners interest in grade VII Alimuddin Islamic High School Probolinggo Regency.

Keywords:

Influence
Animation
Based Learning Media
Learning Interests

Copyright © 2020 (Eliya Hakiki Nur Sugini & Abdul Basit). All Rights Reserved

How to Cite: Sugini, E. H. N., & Basit, A. (2020). Pengaruh Media Pembelajaran berbasis Animasi terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mimbardemokrasi*, 19(2), 28-31. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14616



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Media pembelajaran dalam sistem pendidikan sangat di perlukan dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik sampai menuju pada perubahan yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pendapat Kosasih (2014) media pembelajaran yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk memberikan pesan. Tujuan dari memberikan pesan dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan si pelajar dalam aktivitas belajar. Sedangkan menurut Daryanto (2013) media pembelajaran merupakan media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa media pembelajaran yaitu bahan pembelajaran yang dapat membantu komunikasi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan penelitian maka, peran guru sebagai pengembang ilmu sangat besar untuk memilih, melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efisien bagi peserta didik. Salah satunya dengan menciptakan media pembelajaran yang menarik seperti media animasi untuk peserta didik.

Sari dan Samawi (dalam Djamarah dan Zain, 2006, hlm. 124) berpendapat bahwa penerapan media animasi dalam pembelajaran dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih aktif belajar dan perhatiannya berpusat pada materi. Animasi memiliki fungsi yang tersendiri dalam bidang pendidikan khususnya dalam menumbuhkan kualitas pembelajaran. Penggunaan media animasi dalam proses pembelajaran dapat membuat manfaat yang positif atau kualitas tertentu.

Berdasarkan pada waktu peneliti melakukan observasi di SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo, peneliti mengamati peserta didik kelas VII. Ada beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti, diantaranya pada waktu pembelajaran yang dilakukan guru dalam menggunakan media cenderung monoton dalam sistem pembelajaran yang penyampaiannya hanya satu arah, kemudian ditunjang dengan kurang partisipasi dari peserta didik, pembelajaran cenderung membosankan, peserta didik terlihat pasif, materi yang sulit dimengerti dan peserta didik masih banyak melakukan kegiatan lain seperti mengobrol. Sehingga peserta didik tidak dapat menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Berdasarkan

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Animasi terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo”.

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo dan memiliki tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis korelasional dimana dimana pengujiannya menggunakan sampel t/test. Sampel t/test salah satu bagian dari komparasi (Compare Means). Kegunaan dari sample t/test ialah untuk mengujian terhadap dua sampel yang saling berhubungan sehingga disebut sampel berpasangan. (Priyastama, 2017, hlm. 88).

Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan non-Probability Sampling dimana sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin yang berjumlah 45 peserta didik. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert's yang berupa Angket yang berisi 10 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Teknis pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan angket.

Hasil pengumpulan data diperoleh melalui interview kepada informan, yaitu kepala sekolah, 19 guru dan 45 peserta didik. Setiap informan diberikan pertanyaan berbeda sesuai dengan peran yang dilakukan di sekolah. Peneliti juga melakukan observasi langsung ke lingkungan sekolah seperti wilayah kerja guru, kantor, ruang kelas, toilet dan halaman sekolah. Cara ini ditempuh dengan maksud peneliti dapat melakukan observasi langsung di sekolah. Pengumpulan data memerlukan dukungan dari studi dokumen terutama untuk memotrek, maka peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti profil sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah, data personil sekolah, data peserta didik, keadaan sarana dan prasarana sekolah.

Keseluruhan data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Untuk langkah pekerjaan sampel paired t/test dengan menggunakan SPSS yang pertama buka aplikasi SPSS kemudian aktifkan variabel view kemudian isi kolom yang tersedia, langkah kedua setelah itu kita klik data view, langkah ketiga klik menu analyze, pilih compare means, klik paired sampel, kemudian Pada layar pindahkan nilai hasil angket media pembelajaran dan nilai hasil angket minat belajar harian (Priyastama, 2017, hlm. 89).

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil uji data dengan menggunakan paired samples test di atas, diperoleh t hitung sebesar -35.206 dan t table sebesar (-) 1,68. Jadi hitung $(-35.206) > t$ tabel 1.68 atau signifikan $0,000 < \text{dari } 0,05$ maka dengan demikian terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar. Maka ditemukan pengaruh yang penting antara variabel independen media pembelajaran (X) terhadap variabel dependen minat belajar (Y). Berarti H_0 : di tolak jadi dan H_a : di terima. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima artinya ada pengaruh media pembelajaran berbasis animasi terhadap minat belajar peserta didik kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo

Dalam hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Menurut Anwar Zahwan Muhammad (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh penerapan media pembelajaran berbasis animasi terhadap kemampuan koneksi matematika di MTS Negeri 2 Kota Cirebon dengan memperoleh persamaan regresi yaitu 38.336 dan koefisien regresi sebesar 0.482. t hitung menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel atau $4.408 > 2.024$, maka H_0 : ditolak dan H_a : diterima.

Sedangkan Menurut Setiawan Budi Andhika (2014) hasil penelitiannya terdapat pengaruh penggunaan media animasi terhadap hasil belajar rencana anggaran biaya di SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan memperoleh hasil rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 46.54 dan hasil rata-rata pretest kelas eksperimen sebesar 48.39. dari hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar pada mata pelajaran rencana anggaran biaya (RAB) yang menggunakan media animasi. Hal ini dibuktikan dengan t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil data dari penelitian yang dilakukan di SMP Islam Alimuddin Kabupaten

Probolinggo yang jumlah sampel penelitiannya adalah 45 siswa, adapun variabel penelitian yakni variabel X yaitu nilai angket tentang minat belajar peserta didik sedangkan variabel Y nilai hasil belajar peserta didik. Tata cara mendapatkan nilai X dengan membagikan angket yang memuat soal tentang media pembelajaran sedangkan cara mendapatkan nilai Y dengan membagikan angket yang memuat soal minat belajar.

Dimana setiap menjawab soal angket tersebut diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui hasil angket media pembelajaran dan minat belajar peserta didik. Dalam angket tersebut terdapat 10 soal dengan 4 pilihan jawaban (sesuai lampiran). Kriteria jawaban yang ada pada angket tersebut, apabila peserta menjawab Selalu (S) maka mendapatkan skor 4, Sering (SR) maka mendapatkan skor 3, Kadang - Kadang (KK) maka mendapatkan skor 2, Tidak Pernah (TP) maka mendapatkan skor 1

Kemudian keseluruhan data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Untuk langkah pekerjaan sampel paired t/test dengan menggunakan SPSS yang pertama buka aplikasi SPSS kemudian aktifkan variabel view kemudian isi kolom yang tersedia, langkah kedua setelah itu kita klik data view, langkah ketiga klik menu analyze, pilih compare means, klik paired sampel, kemudian Pada layar pindahkan nilai hasil angket media pembelajaran dan nilai hasil angket minat belajar harian (Priyastama, 2017:89). Maka hasil dari penghitungan menggunakan aplikasi SPSS sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Nilai Paired Samples Statistics.

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	MEDIA	22.58	45	2.028	.302
	MINAT	34.87	45	2.801	.418

Mean atau nilai rata-rata adalah nilai terpusat dimana semua nilai sampel di bagi dengan jumlah sampel. Sampel media mean diperoleh 22.58 dengan jumlah N 45 Std. deviation 2.028, Std. error mean 0.302. Std deviation adalah suatu nilai keragaman satu populasi. Sampel minat diperoleh mean 34.87 dengan jumlah N 45 Std. deviation 2.801 Std. error mean 0.418. Std. Error Mean Adalah nilai standart deviasi dibagi akar jumlah Sample yaitu 0.418.

Tabel 2 Hasil Nilai Paired Samples Correlations.

Paired Samples Correlations				
		N	Corr	Sig.
Pair 1	MEDIA & MINAT	45	.570	.000

Correlation adalah teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dimana *correlation* memperoleh 0,570

Tabel 3 Interpretasi koefisien korelasi dengan menggunakan pedoman.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai tingkat korelasi yang didapat sebesar 0.570 yang artinya SEDANG.

Tabel 4 Hasil Nilai Paired Samples Test.

Paired Samples Test									
		Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair	Variables				Lower	Upper			
1	MEDIA - MINAT	12.289	2.342	.349	-11.585	12.992	-35.206	44	.000

Dari hasil pengujian Paired Samples Test :

- Jika $\alpha = 0,05$ lebih kecil atau sama dengan nilai Sig. atau ($\alpha = 0,05 \leq \text{sig}$), Maka H_0 diterima dan H_a di tolak.
- Jika $\alpha = 0,05$ lebih besar atau sama dengan nilai sig. atau ($\alpha = 0,05 \geq \text{sig}$), Maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Jadi t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasannya tentang “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Animasi terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo” dapat

peneliti simpulkan, ada Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Animasi terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo. Nilai keragaman minat belajarnya itu heterogen karena minat lebih besar dari pada media. Jadi dapat ditetapkan bahwa hipotesis diterima artinya ada Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Animasi terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Islam Alimuddin Kabupaten Probolinggo.

Referensi

- Muhamad, Anwar Zahwan. (2015). *Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Animasi Terhadap Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Di Mts Negeri 2Cirebon*. Diakses 6 Agustus 2019
- Baharudin, & Wahyudi, Esa Nur. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Daryanto. (2013). *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kosasih, Engkos. (2014). *Strategi Belajar dan pembelajaran*. Bandung: YramaWidya.
- Muslimin, Muhammad Ikhwanul. (2017). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video Animasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas II SD. *E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan* Vol VI. Diakses 19 April 2019.
- Priyastama, Romie. (2017). *Buku Sakti Kuasi SPSS*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia
- Sari., & Samawi. (2014). Pengaruh Penggunaan Media Animasi Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Slow Learner. *Jurnal P3lb* Volume 1, Nomor 2. Diakses 19 April 2019.
- Setiawan, Budi Andhika. (2014). *Pengaruh Penggunaan Media Animasi Terhadap Hasil Belajar Rencana Anggaran Biaya di SMK Negeri 3 Yogyakarta*. Diakses 6 Agustus 2019

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal

Sri Rahayu Pudjiastuti^{a, 1*}

^a Pasca Sarjana STKIP Arrahmaniyah Depok, Indonesia

¹ yayu.pudjiastuti@gmail.com

*Korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

28-03-2020

Disetujui:

10-04-2020

Kata kunci:

Internalisasi
Nilai-nilai Pancasila
Paham Radikal

Keywords:

Internalisation
Pancasila Values
Radical
Understanding

ABSTRAK

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberi kontribusi pemikiran, gagasan dan strategi dan upaya dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mencegah perkembangan paham radikal. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang dilihat secara komprehensif integral. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; kondisi internalisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah; lemahnya sistem pendidikan, resistensi terhadap ideologi Pancasila, kurangnya keteladanan pemimpin, dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara; penguatan sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menangkal penyebaran paham-paham radikal.

ABSTRACT

Pancasila Values Internalisation to Prevent Radical Ideology. This descriptive research aims to contribute thoughts, ideas and strategies and efforts to internalize the values of Pancasila to prevent the development of radical understanding. This writing uses a descriptive method that is seen as a comprehensive integral. The results showed that the current conditions of internalizing Pancasila values were; weak education system, resistance to the ideology of Pancasila, lack of exemplary leaders, and the increasing negative influence of external values that are not in accordance with Pancasila. The internalization of Pancasila values is done by; strengthening the education system, enhancing national identity and character, increasing the commitment of national leaders, increasing understanding of Pancasila values in daily life to increase the deterrence of negative influences through education, outreach and cooperation. This study concludes that the internalization of the values of Pancasila can increase community awareness in counteracting the spread of radical ideas.

Copyright © 2020 (Sri Rahayu Pudjiastuti). All Rights Reserved

How to Cite: Pudjiastuti, S. R. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 32-39. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14788



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Persebaran paham radikal dan intoleran memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia, hal ini dapat membahayakan, karenanya harus segera mengambil langkah untuk dapat menangkalnya. Menurut lembaga kajian Leimena Institute, bahwa paham radikal sudah masuk ke sekolah-sekolah dan mempengaruhi siswa-siswa (BBC.com, 2017). Tidak terinternalisasinya pendidikan Pancasila, berdampak buruk pada pemahaman guru dan siswa mengenai bagaimana hidup dalam masyarakat yang multikultural. Kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat minim dalam mengkaji multikulturalisme. Hal ini karena materi Pancasila tidak diinternalisasikan dalam kehidupan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat (Napitupulu, 2017). Ancaman terhadap ideologi kebangsaan semakin nyata, hal ini diiringi dengan menguatnya kelompok radikal dan garis keras yang mulai menyebarkan paham-paham radikal untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia di mana bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Apalagi terdapat partai politik yang merangkul dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok garis keras tersebut (Suparman, 2017).

Menurut kepala BNPT, penyebaran paham radikal dan intoleran sudah terjadi secara sistematis. Paham ini diajarkan kepada anak-anak di lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Suparman, 2017). Hal ini disebabkan karena rendahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada sekelompok masyarakat dan generasi muda (Sumardjoko, 2017). Banyak generasi muda kita yang mengabaikan isi Pancasila baik secara harfiah maupun maknawi. Fenomena lain yang menunjukkan telah bergesernya atau melemahnya ideologi Pancasila adalah dengan melihat dari banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang telah direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri karena Perda ini tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila (Detik, 2015).

Banyak produk hukum dan tindakan penegakkan hukum yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang tersirat dengan belum dirasakannya keadilan serta rendahnya nilai moral dan akhlak di masyarakat. Selain itu, kasus-kasus korupsi yang banyak menjerat para penyelenggara negara menjadi suatu contoh buruk yang dipertontonkan kepada masyarakat sehingga dapat melunturkan rasa cinta dan

nasionalisme masyarakat kepada NKRI. Dari fenomena-fenomena berkembangnya paham radikal yang terjadi di ranah publik, menunjukkan akan semakin lemahnya internalisasi dari nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat maupun penyelenggara negara, khususnya pada nilai-nilai praksis Pancasila yang ditunjukkan dengan semakin mudarnya toleransi sosial dan seringnya terjadi konflik horizontal yang berdimensi keagamaan.

Dengan melihat fenomena dan fakta yang telah diuraikan, maka formulasi pokok masalah adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila belum terselenggara dengan baik sehingga tidak dapat menangkal penyebaran paham radikal secara optimal. Untuk itu perlu dirumuskan konsepsi untuk lebih mengoptimalkan upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Menurut Kalidjernih (2010) internalisasi adalah penanaman perilaku, sikap dan nilai seseorang yang didapatnya dalam proses pembinaan, belajar dan bimbingan, di mana siswa yang belajar dapat diterima sebagai bagian, yang mengikat diri mereka dalam nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Humannira, 2016).

John Finley Scott (1971) menyatakan bahwa internalisasi melibatkan suatu ide, konsep dan tindakan yang mengalir dalam pikiran kita dengan mengalami pergerakan dari luar menuju pikiran sebagai suatu kepribadian. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadi internalisasi (Humannira, 2016). Hal ini berarti, internalisasi adalah proses yang dilakukan berkali-kali di dalam meniru tindakan seseorang, hingga akhirnya keadaan ini menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan, hingga nilai tersebut diyakini menjadi pandangan dan tindakan moral seseorang. Untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, harus diiringi dengan upaya dari luar masyarakat yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan, keteladanan serta contoh perilaku yang mendukung dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai tersebut dapat dengan mudah terinternalisasi dalam diri masyarakat.

Dalam teori habitus dijelaskan bahwa, habitus adalah disposisi yang menjadi dasar kepribadian seseorang. Wujud disposisi bisa berupa sikap, kecenderungan dalam

mempersepsi, merasakan, bertindak dan berpikir yang dibatinkan individu berkat kondisi obyektif keberadaan seseorang. Konsep habitus dalam revolusi mental bisa dilaksanakan bila masyarakat dengan kehendak kuat dan kebebasannya berjuang keluar dari determinisme mindset lama; mentalitas menerabas, kebiasaan korupsi, dan lemahnya etos kerja.

Teori Giddens (1989) menjelaskan bahwa dialektika hubungan antara agent dan struktur sosial merupakan habitus yang akan menerjemahkan arah orientasi sosial. Seperti halnya perubahan habitus butuh modalitas dan sistem, demikian pula perubahan struktural menurut Giddens juga membutuhkan perubahan modalitas (kerangka penafsiran, fasilitas, norma). Dalam struktur sosial, terkandung aturan-aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformatif, tindakan kolektif diorganisir sebagai bagian dari sistem sosial.

Penanaman nilai-nilai bila mau efektif harus memperhitungkan tiga prinsip terbentuknya karakter; pertama, karakter dibentuk oleh apa yang kita lakukan, bukan oleh yang kita katakan, ketahuilah atau yakini; kedua, setiap pilihan atau keputusan membantu mengarahkan akan menjadi orang semacam apa; ketiga, karakter mengandaikan keberanian bertindak tepat, meski menyadari penuh resiko. Tiga prinsip itu merupakan cara bagaimana mekanisme pembentukan habitus dipancing untuk bekerja. Hanya saja dalam pembentukan habitus selalu dikaitkan dengan kelas sosial atau lingkungan budaya/tradisi tertentu. Dalam konteks ini, habitus tidak bisa direduksi menjadi hasil dari teori *behaviorisme*. Maka salah satu pilar pembentukan karakter adalah *displaying character*, yaitu perwujudan karakter dalam praktek proses belajar-mengajar yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik secara individual (pendidikan, pejabat struktural, karyawan, mahasiswa, orang tua), maupun praktek lembaga (*core values*, kode etik dan peraturan-peraturan).

Metode

Dalam penulisan ini menggunakan metode konseptual analisis yang didukung data sekunder dan studi literatur. Pendekatan untuk menganalisis data berdasarkan perspektif kepentingan nasional, integratif serta analisisnya adalah multidisiplin sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Bahan-bahan yang dikumpulkan dengan metode tersebut dilihat

secara komprehensif integral tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perkembangan paham radikal. (Pudjiastuti; 2019).

Hasil dan pembahasan

a) Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila; (1) lemahnya sistem pendidikan; temuan dalam penelitian yang dilakukan MAARIF Institut dalam beberapa hal bersifat menguatkan beberapa penelitian terdahulu mengenai adanya benih-benih radikalisme yang menasar anak muda, utamanya pelajar SMA. Demikian juga dengan SETARA Institut yang pada Juni 2008 melakukan survei mengenai pandangan generasi muda terhadap persoalan kebangsaan, pluralitas dan kepemimpinan nasional (Setara Institut; 2008). Yang mana dalam survey tersebut, gejala fundamentalisasi agama pada generasi muda diukur melalui persetujuan pada hadirnya peraturan daerah berbasis agama, setidaknya 56,1% menyetujuinya. Sementara 36,2% menyatakan tidak.

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), dibawah pimpinan Bambang Pranowo pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, menjelaskan 50% siswa setuju tindakan radikal. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom (<http://www.bbc.com>; 3 Oktober 2017). Hal ini tentu menjadi perhatian semua pihak, terutama yang meyakini bahwa fundamentalisasi keagamaan adalah simtom awal bagi pandangan keagamaan yang dalam taraf tertentu menjadi pembenar bagi tindakan intoleran dengan menggunakan argumen keagamaan serta melanggar terhadap kebebasan beragama yang terkandung dalam nilai-nilai religiusitas pada sila pertama Pancasila.

Sikap anti nasionalisme juga pernah ditemukan di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ada sekolah dan aparat sipil negara menyatakan tidak mau hormat pada sang saka merah putih dan lagu Indonesia Raya. Salah seorang murid SMP mengaku tidak tahu lagu Indonesia Raya, tidak hapal Pancasila, karena tak pernah diajarkan oleh guru di sekolahnya (Satriawan, 2011). Temuan berbagai lembaga riset ini telah menyadarkan kita bahwa krisis

kebhinekaan yang termanifestasi melalui menguatnya fundamentalisasi di kalangan anak muda semakin memprihatinkan (Muhammad & Pribadi, 2013). Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ketika bangsa dan negara ini menaruh harapan yang tinggi dari generasi muda dalam kaitan dengan nasionalisme ke Indonesiaan sebagai negara bangsa.

(2) Resistensi terhadap ideologi Pancasila; Berbagai fenomena saat ini menunjukkan betapa nilai-nilai Pancasila mengalami erosi dan degradasi. Bahkan ketua fraksi PKB di MPR Lukman Edy menyatakan, ada sekitar 50 juta rakyat Indonesia anti Pancasila. Beliau mengatakan “paling tidak sekitar 50 juta rakyat Indonesia anti-Pancasila. Angka ini tentu mengejutkan tapi ini memang hasil dari survei secara acak dari berbagai institusi” (Fajar, 2011).

Hasil survei BPS menyebutkan 27% rakyat Indonesia tidak perlu Pancasila. Bahkan penelitian seorang Profesor UIN menyatakan 28% setuju radikalisasi, dan lembaga kajian di Jakarta menyebutkan 10% pemuda Indonesia menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara. Angka sebesar ini seharusnya dijadikan peringatan buat Indonesia, dan sekaligus seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah (Fajar, 2011). Tidak dapat di pungkiri kalau saat ini timbul pendiskriditan Pancasila, bahkan orang beranggapan tidak ada manfaatnya membicarakannya, sebab khawatir akan dianggap ingin menghidupkan kembali Orde Baru. Dari fenomena bidang politik, pimpinan politik masih terlihat mementingkan kompetisi mengenai jabatan dan kekuasaan sehingga tidak jarang yang menghalalkan segala cara untuk menang, tidak lagi menegakkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Resistensi generasi muda terhadap Ideologi Pancasila dapat dilihat dari penurunan internalisasi nilai-nilai tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebut bagi beberapa komponen bangsa/generasi muda dianggap tidak populer dibandingkan nilai-nilai luar yang mereka anggap cocok untuk dijadikan nilai tertentu pada diri mereka. Bahkan pada beberapa hal, nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai nilai yang identik dengan Orde Baru sehingga setiap hal yang berbunyi Pancasila akan dianggap sebagai bangkitnya Orde Baru. Saat ini pada kenyataannya penanaman nilai-nilai Pancasila hanya sebatas pada diajarkan/tidak ada

dalam kurikulum pendidikan, namun tidak pada tataran dihayati apalagi diimplementasikan.

(3) Kurangnya keteladanan pemimpin; Pemimpin belum dapat bersikap seperti pamong dalam memberikan asah, asih, asuh kepada rakyat yang dipimpinnya, dan kemampuan seperti itu hanya bisa dicapai apabila pemimpin benar-benar mehami dan mengimplementasikan hakikat nilai-nilai luhur Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi yang terus mendera para elite politik dan penyelenggara dan penyelenggara negara, berkontribusi dalam menciptakan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan sosial yang menjadikan semakin suburnya lahan radikalisme internasional berkembang. Radikalisme juga terpicu dengan adanya pandangan perlakuan tidak adil baik secara prosedural maupun distributif yang dilakukan oleh negara barat dibawah pimpinan Amerika Serikat dengan lembaga ekonomi dan politiknya yaitu; IMF, World Bank, dan WTP. Dari sisi ketidakadilan internasional PBB tidak adil karena lebih memihak negara-negara dibelahan bumi bagian utara yang menerapkan standar ganda dalam hubungan mereka dengan Israel dan sangat berbeda perlakuan mereka terhadap negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam (Ancok, 2015).

(4) Pengaruh negatif meningkat; Globalisasi adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan adanya pertukaran cara pandang, pemikiran, serta aspek budaya terhadap dunia. Globalisasi dapat dilakukan dengan melewati batas-batas negara sehingga globalisasi memiliki dampak negatif bangsa dan negara karena banyak masyarakat Indonesia sudah melupakan Pancasila, bahkan menyebut lima sila dalam Pancasila sudah tidak bisa, apalagi mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (<http://halra.com>; 10 Agustus 2017). Pada perkembangan era teknologi saat ini, berbagai benturan, pergeseran, menggoyah nilai-nilai budaya bangsa berdasar Pancasila selalu terjadi. Pengaruh-pengaruh negatif tersebut banyak datang melalui media internet.

Dari sisi pengguna, angka mengejutkan terlihat dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Lembaga Polling Indonesia (LPI) yang mengungkapkan bahwa angka pengguna internet Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai angka 132,7 juta pengguna atau setara 51,7% dari populasi penduduk sebesar 256,2 juta jiwa. Angka

tersebut melonjak dari tahun 2014 yang jumlahnya hanya 88,1 juta, angka ini masih akan terus bertambah mengingat ketersediaan perangkat, fasilitas, serta sarana prasarana penunjang internet yang masih terus menerus berkembang. Dari hasil lembaga riset internasional "*We Are Social*" menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat satu dunia dengan pertumbuhan 51% dikategori *Growth In Internet User* melampaui Amerika, China serta negara lain di dunia (<http://wearesocial.com>; 2 Oktober 2017).

Angka penyalahgunaan internet masih saja terjadi. Maraknya berbagai kasus penipuan, pornografi dan pelecehan seksual, meningkatnya judi online dan transaksi narkoba melalui sosial media serta kasus kampanye hitam melalui internet juga turut menambah daftar dampak buruk internet yang mengundang perhatian banyak pihak. Pencurian akun sosial media, rekening bank online dan virtual money juga sedang marak, selain itu kasus kejahatan didunia maya bahkan telah sampai pada pengrusakan dan pencurian portal atau situs penting milik pemerintah. Munculnya *cyberbullying* melalui jejaring sosial yang beredar dikalangan remaja dan anak-anak usia di bawah umur termasuk hal penting mengerikan sebab dapat mengganggu perkembangan psikologi dan kepribadian yang bersangkutan. Dari aspek sosial dan moral, dampak negatif yang paling mungkin akan terjadi adalah menurunnya kedalaman sosial, tergerusnya rasa kebersamaan dan gotong royong atau nilai kesetaraan pada sila ketiga Pancasila. Sifat-sifat masyarakat saat ini cenderung individualis dan dorongan untuk selalu ingin mendapatkan pujian orang lain dapat mengancam para pengguna internet mayoritas adalah remaja, generasi penerus bangsa.

b) Implementasi internalisasi Pancasila

Dalam tulisan ini, penulis memotret kondisi yang terjadi saat ini menggunakan nilai-nilai keyakinan intrinsik yang menjadi panduan dasar. Nilai-nilai keyakinan intrinsik ini merupakan sebuah *national living road map* yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa Pancasila, karena nilai-nilai keyakinan intrinsik tersebut menjadi jiwa dan nafas kehidupan dari kelima sila yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai keyakinan intrinsik ini adalah nilai religiusitas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Lemhanas, 2015). Jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kelima

nilai keyakinan intrinsik ini sudah menjadi pandangan dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia sehari-hari, sekaligus menjadi sebuah keyakinan dasar ideologis yang membedakannya dengan ideologi bangsa-bangsa lain di dunia. Kelima nilai dasar tersebut juga merupakan nilai-nilai keagungan dari keberadaan masyarakat negara bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan sosial yang mengantarkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

c) Nilai-nilai internalisasi Pancasila yang mampu menangkal paham radikalisme

Nilai-nilai internalisasi Pancasila yang diharapkan mampu menangkal paham radikalisme; (1) menguatnya sistem pendidikan, pendidikan merupakan salah satu komponen saja dari berbagai komponen bangsa. Pendidikan agama secara khusus, menjadi bagian dari pendidikan nasional yang diamanatkan dalam UU No.20 tahun 2003, dan karenanya di akui oleh negara, seperti disebutkan: jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan agama dirumuskan dalam PP No. 55 tahun 2007. Pendidikan memberi pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, serta ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang diterapkan melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran strategis dan penting dalam melestarikan, meningkatkan, dan mentransformasikan nilai-nilai ideologi dan nasionalisme negara kepada generasi muda (Bunyamin,2008). Model internalisasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya di sekolah dengan menggunakan berbagai model yang berbeda dalam setiap pembelajaran seperti model ceramah, diskusi, pemecahan masalah, jigsaw, audio visual, studi kasus dan permainan peran. (Wiratomo, Wahono, & Kristiono, 2017)

(2) Penerimaan terhadap ideologi pancasila; temuan dalam pemetaan yang dilakukan MAARIF Institut dalam beberapa hal bersifat menguatkan beberapa penelitian terdahulu mengenai adanya benih-benih radikalisme yang menasar anak muda, utamanya pelajar SMA. Sekedar menyebut pada tahun 2008, Farha Ciciek melakukan penelitian dalam konteks serupa. Demikian juga dengan SETARA Institut

yang pada Juni 2008 melakukan survei mengenai pandangan generasi muda terhadap persoalan kebangsaan, pluralitas dan kepemimpinan nasional yang mana dalam survey tersebut, gejala fundamentalisasi agama pada generasi muda diukur melalui persetujuan pada hadirnya peraturan daerah berbasis agama, setidaknya 56,1% menyetujuinya. Sementara 36,2% menyatakan tidak.

Hal ini tentu menjadi perhatian semua pihak terutama yang meyakini bahwa fundamentalisasi keagamaan adalah simtom awal bagi pandangan keagamaan yang dalam taraf tertentu menjadi pembenar bagi tindakan intoleran dengan menggunakan argumen keagamaan. Lebih lanjut fakta ini cukup mencengangkan manakala ditilik dengan kaca mata konstitusi republik ini. Peraturan berbasis agama adalah kontradiksi yang nyata. Seperti dikutip dalam laporan SETARA Institut berikut; persetujuan kaum muda atas perda syariah adalah bentuk kontradiksi demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika Pancasila dan UUD 1945 diyakini menjadi dasar terbaik penyelenggaraan negara, kontradiksi-kontradiksi semacam ini, di mana terdapat kehendak melakukan totalisasi kebenaran di dalam wadah yang tunggal atas nama agama, seharusnya tidak muncul, karena Pancasila telah secara akomodatif mengakui keberagaman Indonesia. Fakta sosio-historis kebangsaan Indonesia adalah plural. Temuan-temuan berbagai lembaga riset ini telah menyadarkan kita bahwa krisis kebhinekaan yang termanifestasi melalui menguatnya fundamentalisasi di kalangan anak muda semakin memprihatinkan (Muhammad & Pribadi, 2013). Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ketika bangsa dan negara ini menaruh harapan yang tinggi dari generasi muda dalam kaitan dengan nasionalisme ke Indonesiaan sebagai negara bangsa.

Globalisasi telah membawa perubahan bagi bangsa dan negara (Rosenau, 1990), yaitu perubahan negara yang terpusat pada negara kebangsaan, kepada dunia yang majemuk (Hall, 1990). Begitu juga yang dikatakan Kenichi Ohmae (1995) globalisasi dapat membawa kehancuran bagi negara dan bangsa. Presiden RI ke IV Susilo Bambang Yudoyono mengatakan bahwa diperkampungan global tetap diperlukan kehadiran rumah tangga negara kebangsaan. Begitu juga peringatan Bung Karno menyangkut nasionalisme Indonesia yang harus hidup dalam

taman sarinya internasionalisme, sebaliknya hal tersebut tidak akan bisa hidup subur apabila tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Oleh karena itu, generasi muda sebagai tulang punggung bangsa harus peduli dengan nasionalisme ke Indonesiaan.

(3) Keteladanan dari pemimpin; keteladanan merupakan salah satu modal dasar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan keteladanan yang dimiliki para pemimpin menjadi sarana untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang menjadi modal pokok bangsa ini, tidak saja ekonomi dan politik, tapi keteladanan para tokoh bangsa ini. Dengan keteladanan, dapat dilakukan perubahan secara cepat dengan tidak menimbulkan dampak. Keteladanan menjadi dasar adanya perubahan. Keteladanan menjadi panglima utama, karena nya pemerintah harus dapat menjadi teladan. Keteladanan pemerintah terlihat dari berbagai hal, yaitu dari perilaku hidup sederhana. Aparatur negara dapat memiliki sikap sederhana dan tidak memamerkan kemewahan, hal ini salah satu wujud perilaku yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dapat di terapkan pada kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara sehingga para pemimpin nasional dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda penerus bangsa.

(4) Pengaruh negatif dapat ditangkal; nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moralitas dan etika bangsa Indonesia akan dapat diimplementasikan secara murni dan konsekwen oleh generasi muda apabila nilai-nilai yang tertera dalam dasar negara Pancasila dapat dan telah dipahami secara menyeluruh. Dengan memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu kesatuan yang utuh, maka diharapkan dapat mengembangkan kesadaran generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

Pemahaman yang mendalam yang kemudian secara konsisten diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari akan dapat membangun kekuatan dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang senantiasa mencerminkan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kondisi tersebut, nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjadi budaya di dalam pelaksanaan kehidupan praksis oleh generasi muda Indonesia tersebut,

diharapkan dapat menjadi filter terhadap pengaruh budaya global sehingga budaya global yang positif dapat diadopsi dan sekaligus dapat memperkaya nilai-nilai praksis Pancasila, sedangkan budaya global negatif akan ditolak atau ditinggalkan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terus hidup di dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, di mana semua itu juga merupakan cerminan dari budaya hukum masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah paham radikal adalah; (1) penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila pada dunia pendidikan sehingga terwujud manusia berkualitas yang religius dan memiliki keyakinan adanya sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial.

(2) Peningkatan jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi. (3) Peningkatan komitmen pemimpin bangsa dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan keteladanan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. (4) Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan berpengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mencegah perkembangan paham radikal dapat disimpulkan sebagai berikut; Nilai-nilai Pancasila belum teraktualisasi dengan baik sehingga belum dapat menangkal penyebaran paham radikal, tidak optimalnya pendidikan Pancasila, adanya penolakan terhadap ideologi Pancasila, kurangnya keteladanan dari pemimpin nasional, dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Strategi yang diterapkan adalah; penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan

internalisasi nilai Pancasila pada dunia pendidikan sehingga terciptanya manusia yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial. Peningkatan jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi. Peningkatan komitmen para tokoh bangsa dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan keteladanan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Referensi

- Aini, Nur. (2017, 26 Juli). Survei BNPT: 39 Persen Mahasiswa Tertarik Paham Radikal. *Republika*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/26/otonj7382-survei-bnpt-39-persen-mahasiswa-tertarik-paham-radikal> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB
- Ancok, D (2015). *Ketidakadilan sebagai sumber radikalisme dalam agama: Suatu Analisis berbasis teori keadilan dalam pendekatan psikologi*. *Jurnal Psikologi Indonesia*.
- BBC.com. (2017, 7 April). Bagaimana meredam paham radikal di Indonesia?. *BBC.com News Indonesia* <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39494134> diakses pada 18 September 2017 pukul 17.00 WIB
- Detik. (2015, 23 Februari). Mendagri: Tak Sesuai Pancasila, 100 Perda Bermasalah Dikembalikan. *Detik.com* <http://news.detik.com/berita/2840131/mendagri-tak-sesuai-pancasila-100-perda-bermasalah-dikembalikan> diakses 17 Juni 2017 pukul 18.20 WIB
- Fajar, Danang. (2011, 25 Oktober). Survey BPS menyatakan 27 persen Rakyat Indonesia merasa tidak memerlukan Pancasila. 50 Juta Rakyat Indonesia Anti-Pancasila. *Skala*. <https://skalanews.com/berita/nasional/umum/99246-50-juta-rakyat-indonesia->

- antipancasila diakses pada tanggal 10 Agustus 2017
- Giddens, A. (1989). *Social theory of modern societies: Anthony Giddens and his critics*. Cambridge University Press.
- Hall, Edward T. & Hall, Mildred R. (1990). *Understanding Cultural Differences*. Garden City, NY: Intercultural Press.Inc.
- Hall, S. (1990). Globalization and ethnicity. In Anne McClintock, Aamir Mufti, & Ella Shohat. (Eds), *Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives*. University of Minnesota Press.
- Humannira, Raden Regia. (2016) *Proses Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Banten Pada Mahasiswa Yang Terdaftar Dalam Organisasi Kedaerahan (studi deskriptif di organisasi kedaerahan Perhimpunan Mahasiswa Banten Bandung)*. Skripsi(S1), FKIP UNPAS.<http://repository.unpas.ac.id/13175/BAB%202.pdf> diunduh pada 18 September 2017
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus studi kewarganegaraan: perspektif sosiologikal dan politikal*. Widya Aksara Press.
- Lemhanas, *Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila*, Jakarta; 2015.
- Maftuh, Bunyamin. (2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal UPI.Kajian Filosofi,teori, kualitas dan manajemen pendidikan. Vol.II No.2 Juli 2008.
- Muhammad, W. A., & Pribadi, K. K. (2013). Anak muda, radikalisme, dan budaya populer. *Jurnal Maarif*, 8(1), 132-53.
- Napitupulu, Ester Lince. (2012, 31 Mei). Pengabaian Pendidikan Pancasila Berdampak Buruk.*Kompas.com*.
<http://nasional.kompas.com/read/2-12/05/31/1916552/Pengabaian.Pendidikan.Pancasila.Berdampak.Buruk> diakses pada 18 September 2017 pukul 18.00 WIB
- Ömae, K. I., & Ohmae, K. (1995). *The end of the nation state: The rise of regional economies*. Simon and Schuster.
- Pudjiastuti, Sri Rahayu,. (2019). *Penelitian Pendidikan*.Media Akademi.
- Rosenau, J. N. (1990). *Turbulence in world politics*.
- Rosenau, J. N. (1995). Governance in the twenty-first century. *Global governance: A review of multilateralism and international organizations*, 1(1), 13-43.
- Satriawan, Yudha. (2011, 9 Juni). Anak Sekolah dan PNS di Karanganyar Tolak Hormat Bendera. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/pns-dan-anak-sekolah-tolak-hormat-bendera-123578729/94215.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB
- Scott, J. F. (1971). *Internalization of norms*. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall
- Setara Institut. *Berpibak dan Bertindak Intoleran (Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008)*, Jakarta; 2008.
- Sindonews. (2016, 12 Mei). Sejarah Munculnya Radikalisme. *Sindo.new*.
<https://nasional.sindonews.com/read/1107997/14/sejarah-munculnya-radikalisme-1463048982> diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 17.00 WIB
- Sumardjoko, Bambang. (2017, 4 Desember). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Kini. *Sindonews.com*.
<https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18/aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646> diakses pada 17 Juni 2017 pukul 18.05 WIB
- Suparman, Mana. (2017, 11 Maret). Radikalisme Mengancam, Umur NKRI Diprediksi Tinggal 25 Tahun. *Berita Satu*.
<http://www.beritasatu.cpm/nasional/418762-radikalisme-mengancam-umur-nkri-diprediksi-tinggal-25-tahun.html> diakses pada 17 Juni 2017 pukul 17.30 WIB
- Wijayaka, Bernadus. (2017, 7 Mei). Kepala BNPT: Penyebaran Paham Radikal di Kampus Sudah Mengkhawatirkan. *Berita Satu*. <http://.beritasatu.com/hukum-kepala-bnpt-penyebaran-paham-radikal-di-kampus-sudah-mengkhawatirkan.html> diakses pada 17 Juni 2017 pukul 18.00 WIB
- Wiratomo, G. H., Wahono, M., & Kristiono, N. (2017). Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila oleh Guru PPKn Jenjang SMP di Kota Semarang. *Integralistik*, 28(2), 119-130.

Pemanfaatan Media Visual dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yulita Pujilestari ^{a, 1*}, Afni Susila ^{b, 2}

^a Dosen PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Indonesia

^b Alumni Prodi PPKn, Universitas Pamulang, Indonesia

¹ dosen00442@unpam.ac.id *; zafnychan86@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

04-03-2020

Disetujui:

17-04-2020

Kata kunci:

Penggunaan Media Visual Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pembelajaran

Keywords:

Visual Media Utilization
Civic Education
Learning

ABSTRAK

Media visual yaitu alat peraga yang dipakai guru dalam peoses belajar mengajar sehingga dapat di nikmati oleh siswa melalui penglihatan atau panca indra mata. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, Tangerang Selatan. Subjek penelitian ini adalah siswa satu orang guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan tiga orang siswa kelas X Akuntansi. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan (1) antusiasme siswa dalam belajar mata pelajaran masih membutuhkan perhatian, tak lepas dari kendala baik kondisi kelas, maupun waktu belajar. Oleh karena itu guru harus mampu mengendalikan kelas agar keadaan kelas kembali terkendali dan siswa dapat belajar dengan konsentrasi, guru harus mampu membaca situasi kelas dengan baik. (2) Media visual dapat mempermudah guru dalam memberikan materi alam pembelajaran, media visual menampilkan gambaran konkret suatu materi, media visual juga dapat memusatkan motivasi siswa dalam belajar dan siswa mudah mengerti materi pelajaran, serta merangsang keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (3) Media visual dapat memberikan gambaran nyata suatu materi karena bukan hanya menampilkan teks, namun juga terdapat gambar, gerak, animasi yang menarik bagi siswa sehingga media visual agar dapat meningkatkan keinginan belajar mengajar siswa.

ABSTRACT

Visual media utilization in civic education learning. Visual media are visual aids used by the teacher in teaching and learning so that they can be enjoyed by students through vision or the five senses. This research is a descriptive qualitative research. The study was conducted at SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, South Tangerang. The subjects of this study were students of one teacher of Pancasila and Citizenship Education subjects and three students of class X Accounting. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. This research resulted in (1) the enthusiasm of students in learning subjects still requires attention, not free from constraints both in classroom conditions and learning time. Therefore, the teacher must be able to control the class so that the classroom situation is back in control and students can learn with concentration, the teacher must be able to read the class situation well. (2) Visual media can facilitate teachers in providing natural learning material, visual media display concrete images of a material, visual media can also focus student motivation in learning and students easily understand subject matter, and stimulate student activity in learning Pancasila and Citizenship Education. (3) Visual media can provide a real picture of a material because it not only displays text, but there are also images, movements, animations that are interesting for students so that visual media can increase the desire to learn and teach students

Copyright © 2020 (Yulita Pujilestari & Afni Susila). All Rights Reserved

How to Cite: Pujilestari, Y., & Susila, A. (2020). Pemanfaatan Media Visual dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 40-47. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14334



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Setiap proses pendidikan tujuan utamanya agar menciptakan lulusan atau keluaran yang baik. Untuk menuju kesuksesan pendidikan untuk berpendidikan, itu harus melalui berbagai proses dan sistem yang baik. (Sanjaya, 2006) Proses atau sistem yang tersebut didalamnya yaitu proses belajar mengajar, sumber belajar, evaluasi dan alat. Bagian atau komponen didalamnya adalah yang termasuk guru, siswa, bahan atau bahan belajar dan media & alat pembelajaran. Kehadiran adalah komponen penting yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar oleh seorang guru. Profesionalisme dan keterampilan guru begitu mempengaruhi hasil kegiatan belajar mengajar. Itu karena ketercapaian dalam proses belajar mengajar faktor yang paling mempengaruhi adalah guru. Maka bisa dikatakan tugas guru yaitu memberikan materi pelajaran kepada siswa lewat komunikasi dan interaksi. Proses pembelajaran yang tepat didukung oleh keadaan belajar yang tenang dan tertib tidak terlepas peran dari seorang guru. Keterkaitan komunikasi diantara siswa dan guru dapat dengan baik bekerja.

Komponen selanjutnya adalah siswa dalam kehadiran proses belajar mengajar. Siswa yaitu orang yang belajar dalam hubungan sosial dalam bentuk prosedur belajar mengajar. Proses pembelajaran terjadi dengan rangsangan dan respon antara seseorang dan lingkungannya, selanjutnya maksud dari belajar-mengajar yaitu mekanisme kompleks yang dialami oleh setiap orang dalam hidupnya. Karena itu, pembelajaran bisa terjadi kapan saja. Suatu tanda seseorang sedang belajar yaitu perbuatan yang dikarnakan oleh perubahan tingkat keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan komponen yang berpengaruh untuk mendukung efektivitas pembelajaran lebih lanjut adalah pada penggunaan media saat dalam pembelajaran. Berkaitan adanya komunikasi dan media pembelajaran sangat membantu dalam implementasinya. Pemakaian media pembelajaran yang cocok dengan materi pembelajaran akan dapat membangkitkan minat baru dan keinginan, menghasilkan stimulasi dan motivasi proses belajar mengajar dan ini membawa pengaruh signifikan pada psikologi siswa. (Sukmadinata, 2004) Setiap rencana pembelajaran harus diatur dan dilakukan secara sistematis sehingga siswa dapat memusatkan perhatian mereka. Rencana pembelajaran direncanakan berdasarkan pada kebutuhan perilaku siswa diharapkan bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam rencana ini bisa dikatakan bahwa media sudah sepantasnya tidak hanya dilihat sebagai bantuan bagi guru untuk mengajar, namun sebagai sarana untuk memberikan pesan dari sebagai pemberi pesan kepada penerima pesan. Media ini bisa digunakan oleh guru namun yang lebih penting bisa dipakai oleh siswa. Oleh karenanya, sebagai presenter dan distributor pesan-pesan media bisa mewakili guru yang memberikan informasi secara jelas, akurat dan menarik.

Media visual bisa membangkitkan minat belajar pada siswa karena dapat menghubungkan materi yang dipelajari oleh siswa dengan keadaan aslinya pada dunia nyata. "Media visual merupakan alat bantu mengajar yang dipakai guru dalam proses pembelajaran yang bisa dinikmati oleh siswa melalui visi atau panca indera."

Media visual dikatakan mampu menampilkan, hal-hal nyata dari fenomena yang dipelajari. Dengan memakai media visual ini, siswa tidak hanya membayangkan fenomena dalam pembelajaran yang dipelajari, guru bisa lebih mudah menunjukkan apa yang dimaksud dan apa yang akan disampaikan.

Pada kesempatan ini peneliti ingin meneliti penggunaan media visual dalam pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dikenal untuk pelajaran yang cenderung tidak menarik bagi siswa, stereotip ini terus berkembang dari generasi ke generasi.

Dari masalah yang timbul dari *stereotype* tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu adanya solusi bagi tenaga pendidik untuk menciptakan *image* baru yang lebih baik untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang penting didalam membentuk sebuah warga negara yang hidup untuk selaras dengan pancasila dan UUD 1945 (Hamidi & Lutfi, 2010). Dalam penggunaan media visual diharapkan akan menambah semangat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hamalik dalam Arsyad (2008) menjelaskan media komunikasi merupakan alat komunikasi untuk memperlancar dan mendapatkan hasil yang maksimal dala berkomunikasi.

Setelah itu, Asnawir & Usman (2002) mengatakan bahwa, media adalah alat penyaluran pesan sehingga bisa merangsang prasaan, pikiran,

dan ketertarikan siswa hingga bisa termotivasi terjadinya jalannya belajar pada dirinya.

Selanjutnya bisa dikatakan bahwa media yaitu alat yang bisa dipakai untuk menyalurkan informasi yang berhubungan dengan pembelajara supaya materi yang berikan bisa diterima oleh siswa dengan baik.

Kemudian menurut Djamarah dan Zain (2002) media adalah sumber belajar dan dengan mengutip Winataputra (2001) menggabungkan sumber belajar menjadi lima kategori, adalah manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam lingkungan dan media pendidikan.

Dilihat dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa media pembelajaran yaitu media alat untuk menggapai tujuan pembelajaran tersebut, alat tersebut berupa buku, koran, majalah, televise, radio dan lain sabagainya, termasuk perbuatan yang dapat di contohkan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Dalam proses belajar media merupakan salah satu hal penting sebagai pendukung untuk memberikan pesan pembelajaran kepada peserta didik, karena media pembelajaran merupakan sebuah alat atau perangkat yang di perlukan oleh guru untuk menyampaikan informasi berupa ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya.

Media adalah alat yang wajib ada ketika kita ingin memperlancar pekerjaan. Setiap orang pasti menginginkan pekerjaannya bisa menyelaraskan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Media adalah alat penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.

Pemakaian media pembelajaran yang tepat juga merupakan strategi guru dalam meberikan pembelajaran kepada peserta didik, media berkaitan dengan dengan sumber belajar dalam arti luas sumber belajar bisa berupa pesan, alat (media), teknik, dan lingkungan. Bisa diartikan bahwa media pembelajaran bisa memudahkan sebagai alat yang dipakai guru dalam proses pembelajaran, media dalam melakukan sesuatu seperti halnya dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

Alasan yang pertama berkaitan dengan manfaat pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: Metode yang digunakan dalam mengajar akan lebih bervariasi, bukan hanya menggunakan metode ceramah yang bisa menimbulkan rasa bosan kepada siswa, Bahan pembelajaran bisa menumbuhkan semangat siswa sehingga siswa termotivasi untuk menguasai tujuan pembelajaran, pembelajaran bisa lebih nyaman dan dapat memnangkitkan motivasi belajar siswa, Peserta didik akan lebih

termotivasi dalam pembelajaran, karena akan banyak kegiatan yang dilaksanakan seperti melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.

Karena siswa terlebih anak-anak masih berpikir konkrit, semua yang disampaikan oleh guru harus dijelaskan dengan memperlihatkan apa yang sedang dijelaskan, lalu media visual adalah sumber belajar yang didalamnya terdapat pesan yang diciptakan agar terkesan dalam bentuk kombinasi teks, foto, gerak, dan animasi yang diselaraskan dengan usia siswa.

Media visual ini sesuai untuk memberikan tujuan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. Media visual bisa diartikan sebagai media pemberi pesan antara gagasan dan fakta secara, kuat, jelas dan terpadu, melalui kombinasi menyampaikan kata-kata dan gambar. Poster yaitu penyatuan diantara tulisan dan gambar dalam satu ruang lingkup yang menginformasikan mengenai satu atau dua ide pokok, poster seharusnya diciptakan dengan gambaran dekorasi dan huruf yang nyata dan jelas, Karikatur dan kartun yaitu garis yang dicoret dengan simpel yang mengarahkan kepada suatu hal yang penting. Sedangkan kartun ide utamanya yaitu mengupload rasa lucu dan kesan utamanya yaitu senyum dan tawa. Kesan pesan dan humor yang disampaikan dari karikatur dan kartun mengakibatkan pesan yang diberikan awet dalam ingatan anak.

Media adalah sarana untuk menumbuhkan salah satu aktivitas belajar mengajar. Oleh karna itu diperlukan dalam memilihnya harus cermat dan tepat agar bisa dipakai secara tepat guna.

Ada empat fungsi media visual, menurut Levied dan Lents dalam Arsyad (2008) yaitu: Fungsi atensi media visual yaitu inti, yang mengarahkan dan membawa perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang berhubungan dengan makna visual yang nmenyertai atau ditampilkan teks isi materi pelajaran. Dengan media gambar yang diproyeksikan lewat overhead projector bisa menarik siswa pada mata pelajaran sehingga semakin besar untuk mengingat pelajaran, temuan-temuan yang diungkapkan oleh peneliti mengenai fungsi kognitif media visual mengenai lambang visual atau gambar mempermudah pencapaian tujuan untuk mengingat dan memahami informasi atau pesan yang terdapat dalam gambar, Fungsi afektif media visual bisa tampak dari tingkat kenyamanan siswa ketika sedang belajar dan membaca teks yang bergambar, Fungsi kompensatoris media visual yang menyampaikan konteks untuk dapat

mengerti teks yang lemah dalam membaca untuk menggunakan informasi dalam teks dan bisa mengingat kembali.

Dari keempat fungsi yang diambil Levied dan Lentz, dapat disimpulkan media visual penting dalam proses belajar. Sehingga dengan memakai media visual bisa meningkatkan semangat belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai selain itu dipakai media dalam pembelajaran guru bisa membagi pesan kepada siswa yang lebih baik. Dengan belajar langsung serupa itu pastinya termasuk proses belajar yang bermanfaat, karna dengan suatu tersebut kemungkinan persepsi kesalahan akan bisa dihindari. Pemakaian media pembelajaran juga bisa menayangkan objek yang membantu terlalu besarnya yang tidak mungkin bisa ditampilkan di dalam kelas.

Media pengajaran akan membantu proses belajar siswa dalam pengajaran yang dapat dianggap bisa membantu untuk motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar yang akan dicapai. Adapun manfaat dalam memakai media pembelajaran visual dalam proses belajar mengajar, antara lain: Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya menggunakan metode ceramah yang bisa membuat siswa menjadi bosan, Bahan pengajaran lebih nampak jelas artinya sehingga siswa bisa memahaminya. Dan bahan ajar dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pengajaran bisa menumbuhkan perhatian siswa sehingga yang bisa meningkatkan semangat belajar, Siswa bisa lebih banyak melaksanakan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan dan lain-lain, Kualitas hasil belajar bisa ditinggikan apabila integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran bisa member pesan elemen-elemen pengetahuan melalui cara yang tersusun dengan baik, spesifik dan jelas.

Lainnya manfaat media pembelajaran visual juga memiliki pengaruh yang sangat penting bagi terlaksananya proses belajar mengajar. Peran media pembelajaran visual dalam proses belajar mengajar dapat dilihat sebagai berikut: Alat untuk menyampaikan bahan pengajaran ketika guru memberikan pelajaran. Dari sini media dipakai oleh guru untuk penjelasan materi verbal tentang bahan pengajaran, Alat untuk menyelesaikan masalah dalam belajar diteliti lebih dalam oleh para siswa dalam proses belajarnya, Sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut terdapat bahan bahan yang harus dipelajari para siswa baik individual maupun kelompok, kelompok. kelompok ini akan banyak membantu tugas guru dalam proses belajar mengajar.

Dalam proses belajar mengajar, pemakaian media pembelajaran yang selaras dengan materi pembelajaran yang akan diberikan bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa yang berujung pada meningkatkannya prestasi belajar siswa. Kesamaan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran visual, dengan materi pembelajaran maka akan meringankan pemakaian media pembelajaran tersebut. Tetapi, apabila pemakaian media pembelajaran tersebut tidak selaras dengan materi pembelajaran, maka akan menimbulkan penghambat media pembelajaran.

Dalam menggunakan media pembelajaran visual untuk kecakapan guru, yakni:

a. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung didalam pemakaian media pembelajaran visual diakibatkan keunggulan media pembelajaran visual dengan media pembelajaran lain. Dibawah ini ada beberapa factor pendukung pemakaian media pembelajaran visual, yakni: Media pembelajaran visual mempunyai keunggulan bisa menayangkan gambaran nyata tentang benda atau kejadian. Sehingga siswa bisa lebih mengerti materi pelajaran karena melihat secara langsung, Media pembelajaran visual mempunyai kemampuan untuk menampilkan gambaran yang bisa dilihat dengan jelas oleh siswa sehingga member kemudahan bagi guru dalam memberikan materi yang diberikan oleh guru pada siswa, Media pembelajaran visual siswa bisa menunjukkan motivasi karena tampilannya yang menarik, Media pembelajaran visual bisa membantu siswa dengan gampang membandingkan dua benda yang berbeda sifat, bentuk, ukuran dan warnanya, Media pembelajaran visual mempunyai kemampuan tersendiri. Sehingga bisa menyuguhkan kembali obyek-obyek atau kejadian dengan berbagai perubahan (memanipulasi) selaras dengan keinginan yang dibutuhkan oleh siswa.

b. adapun Faktor penghambat penggunaan media pembelajaran visual, yaitu antara lain: Tidak semua pokok bahasan mata pelajaran bisa diterangkan dengan menggunakan suatu media pembelajaran visual, Tidak semua lembaga pendidikan memiliki kelebihan dalam menyediakan perangkat atau peralatan media pembelajaran visual. Hal ini disebabkan untuk menjalankan media ini perlu keterampilan dan sarana yang khusus. Masih sering terjadi penafsiran-penafsiran dalam pesan-pesan visual tidak bisa dihindari. Seorang guru dalam mempergunakan pesan-pesan visual harus

berhati-hati tanpa penjelasan sebelumnya karena akan mengakibatkan kekeliruan kepada siswa.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan yaitu sudah tugas seorang guru untuk mengambil keputusan, dalam menentukan penggunaan media pembelajaran visual dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa. harus diingat bahwa pembelajaran media ini memiliki hal positif jika dilihat dengan media pembelajaran yang lainnya. Namun keunggulan itu tidak berarti apa-apa ketika guru tidak bisa menyesuaikan media materi yang disampaikan dalam pembelajaran, sehingga akan mengakibatkan hal buruk pada proses belajar mengajar yang dijalankan

Metode

Borg dan Gall (1996) seperti yang di kutip pada Moleong (2007), menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang bisa menciptakan data deskriptif yang berupa kata-kata berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menciptakan kesimpulan data yang didalamnya ada rinci, lain menghasilkan data yang berupa angka-angka. Dilihat dari segi prosedur dan pola yang telah dijalani oleh peneliti, penelitian ini pada jenis ini tergolong penelitian kualitatif.

Sesuai dengan definisi tersebut di atas, Kirk dan Miller (1986) dalam Moleong (2007), mendefinisikan mengenai penelitian kualitatif merupakan cara tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dengan pengamatan pada manusia baik dalam lingkungannya maupun dalam dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti hal-hal sosial dari perspektif partisipan, partisipan yaitu individu atau kelompok yang diajak berwawancara, di dalam observasi, diminta menyampaikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Sehingga bisa diterangkan mengenai penelitian kualitatif yaitu termasuk penelitian yang menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi pada obyek penelitian maka menghasilkan data yang menerangkan secara lengkap mengenai obyek penelitian.

Selain itu pola penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu pola deskriptif. Pola ini merupakan penelitian yang “hanya bisa melukiskan keadaan obyek atau persoalannya dan tidak di maksudkan untuk menarik atau mengambil kesimpulan yang berlaku umum”. Menurut teori penelitian, pola deskriptif itu ada

dua sifat, yaitu bersifat eksploratif dan bersifat developmental. Tetapi dalam penelitian ini memakai pola deskriptif eksploratif yaitu, “bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena”. Selanjutnya yang bisa dirangkum adalah penelitian ini memakai pola deskriptif eksploratif, bahwa pola penelitian yang menerangkan secara lengkap mengenai peristiwa atau status fenomena obyek penelitian dan tidak mencari kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun kesimpulan yang diambil yaitu suatu gambaran objek yang terjadi pada saat penelitian.

Pola deskriptif ini dipakai untuk mengkaji permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Pemakaian media pembelajaran visual dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat.

Pemilihan informan yaitu selaras dengan kerangka penelitian ini sehingga pemilihan objek sesuai dengan tujuan untuk meneliti mengenai Penggunaan Media Visual pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu guru dan siswa SMK Muhammadiyah 1 Ciputat.

Pada informan penelitian kali ini informasi yang diambil oleh peneliti adalah guru PPKn (yang meliputi guru kelas X) dan peserta didik.

Metode Pengumpulan Data dengan Metode Observasi yaitu dalam metode ini, peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung. Posisi peneliti dalam metode ini yaitu sebagai pengamat sekaligus sebagai pencatat atau pelaku langsung dari observasi yang dilakukan, Metode Wawancara/*Interview*. Menurut Gunawan (2013) wawancara yaitu suatu percakapan pada suatu problem tertentu, ini yaitu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu disebut dengan Wawancara Terstruktur dipakai sebagai teknik pengumpulan data, ketika peneliti atau pencari data telah tau dengan jelas mengenai informasi apa yang bisa didapat. Maka dari itu wawancara dalam melaksanakan pengumpul data sudah membuat instrument berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan dan Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas yaitu dimana peneliti tidak memakai sebuah pedoman wawancara yang diterapkan berupa garis-garis besar pada permasalahan yang bisa ditanyakan, Metode Dokumentasi tersebut dan dipakai dalam melakukan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan profil sekolah, sarana dan prasarana, aturan menelaah dan kedisiplinan

konteks sosial yang bisa menerangkan subyek atau obyek yang diteliti agar mendapatkan informasi yang maksimal.

Hasil dan pembahasan

Penelitian kualitatif memiliki prosedur yang harus di jalani, berikut ini merupakan adalah prosedur yang di harus laksanakan dalam penelitian kualitatif :

1. Menetapkan Fokus Penelitian

syarat penelitian kualitatif berdasarkan pada logika berfikir induktif maka pelaksanaan penelitiannya bisa bersifat sangat fleksibel, penelitian kualitatif harus melewati prosedur penelitian yang ada. Sama dengan penelitian kuantitatif, hal pertama yang dijalankan sebelum memulai seluruh tahap penelitian kualitatif yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang di batasi oleh sebuah permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian, pertanyaan penelitian yaitu tentang hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dan hal yang akan di cari jawabannya dalam penelitian tersebut.

2. Menentukan Setting dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif setting yaitu hal yang telah ditentukandan sangat penting pada saat mentukan fokus penelitian. Setting dan subyek penelitian sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal penelitian. Setting penelitian ini memberi kelompok yang akan diteliti dan melihat kondisi fisik dan sosial subyek penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menemui kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat untu mengajukan permohonan penelitian di sekolah tersebut dan menyerahkan surat permohonan pengajuan untuk penelitian yang telah di tanda tangani oleh kepala program studi Pkn Universitas Pamulang dan pihak sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat menyetujuinya. Peneliti menemui guru Pkn untuk mendiskusikan penelitian yang akan di lakukan, mempersiapkan bahan ajar, media visual yang akan digunakan dan persiapan lainnya.

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini bisa lewat observasi, wawancara mendalam yang diadakan oleh peneliti dalam kurun waktu bulan Agustus 2018. Seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam yaitu guru Pkn dan siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, Tangerang Selatan. Peneliti menjalankan wawancara dengan guru Pkn dan beberapa siswa kelas X Akuntansi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yang disebut juga dengan informan.

Cogan (2007) menyatakan bahwa *civic education* adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para generasi muda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan *citizenship education* mencakup pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah bisa melalui keluarga, organisasi keagamaan atau melalui media massa. Dengan demikian istilah *citizenship education* mengandung implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan *civic education* yang distruktur di sekolah formal. (Wahab & Sapriya, 2007)

Antusiasme siswa dalam belajar pada mata pelajaran masih kurang, karena ada beberapa problem, salah satu penyebabnya yaitu karena jam pelajaran pada jam terakhir, sehingga semangat yang kurang dalam belajar. Dalam hal ini guru sangat berpengaruh penting mengatasi masalah kebosanan siswa seperti pengemasan materi yang menarik, memberikan joke atau games pada saat siswa mulai terlihat bosan, dalam hal ini guru di tuntutan untuk membaca situasi kelas agar proses belajar bisa berjalan dengan lancar dan pelajaran pun dapat di terima dengan baik oleh setiap siswa.

Pada pembelajaran yang menggunakan media visual, siswa dilatih untuk dapat mengingat, mengungkapkan kembali pengetahuan, membandingkan dan mengambil keputusan. Dalam proses belajar mengajar siswa dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas melalui kegiatan yang dilakukan sehari-hari. "Siswa menyusun kalimat berdasarkan gambar yang sudah tersedia. Siswa menemukan konsep-konsep baru sehingga mereka menjadi lebih paham dan bersemangat dalam belajar karena mereka mengalaminya sendiri.

Penggunaan Media Visual Dalam Pembelajaran Pkn di SMK Muhammadiyah I Ciputat, tentang peran penggunaan media visual dalam pembelajaran Pkn yaitu sebagai berikut. Peran media visual dalam pembelajaran selain membantu guru dalam menyampaikan pelajaran juga membuat siswa lebih aktif dalam belajar, karena media visual itu menarik seperti halnya power point, dengan tampilan gambar, warna, jadi lebih real bukan sekedar bercerita namun ada contoh konkritnya, pada intinya media visual itu menarik perhatian siswa, jadi sangat membantu di dalam berjalannya proses pembelajaran

Media visual adalah salah satu media pembelajaran yang bersifat efektif karena media visual dapat memberikan sebuah kesan yang nyata bagi para peserta didik pada saat mempelajari suatu materi, sehingga siswa tertarik

untuk belajar, selain itu media visual juga membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah di pahami karena dikemas berupa teks dan sebuah gambar.

Hal tersebut diatas sesuai dengan manfaat media visual dalam pembelajaran yaitu menarik perhatian siswa, membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran, siswa dapat lebih aktif, dan berakhir pada kualitas hasil belajar.

Meningkatkan keinginan belajar siswa merupakan hal yang begitu penting dalam pembelajaran, karena hal ini bersangkutan dengan penerimaan siswa bagi materi yang di sampaikan oleh guru.

Media visual menarik perhatian siswa sehingga meningkatkan rasa keinginan tahanan siswa terhadap pelajaran yang disampaikan, karena konkrit jadi pelajaran yang di sampaikan mudah untuk di mengerti, karena dapat dilihat secara langsung berupa teks, gambar, gerak, animasi, jadi merangsang siswa untuk memperhatikan, sehingga dalam proses belajar siswa terpusatkan perhatiannya terhadap pelajaran karena bantuan media visual ini, terlebih pada zaman sekarang, anak-anak kan sudah mengenal hp yang biasanya menampilkan gambar, dan terlihat bahwa mereka betah banget memegang hp berjam-jam karena menarik untuk di lihat, begitu juga media visual dalam belajar, terutama pada pelajaran pkn yang muatannya berupa teori, media visual sangat membantu. Media juga harus di sesuaikan dengan materi pelajaran, tidak semua materi pada pelajaran dapat di menggunakan media visual. Penggunaan media visual dalam pembelajaran Pkn memotivasi siswa untuk belajar dan siswa lebih mudah diarahkan karena perhatiannya terpusat terhadap pembelajaran dan mudah juga memahami apa yang kita sampaikan.

Media visual dapat menumbuhkan keinginan belajar siswa pada pembelajaran Pkn. Penggunaan media visual dalam pembelajaran Pkn merupakan sebuah tuntutan agar siswa bisa memiliki keinginan dalam belajar, karena Pkn yang akrab dengan image pelajaran yang membosankan, dengan penyajian materi menggunakan sebuah media visual akan bisa menumbuhkan keinginan belajar siswa karena praktis dan mudah di pahami.

Media mempunyai pengaruh penting dalam proses pembelajaran, meningkatkan dunia pendidikan menuntut guru mengupgrade media pembelajaran yang bisa dipakai dalam proses belajar mengajar selaras dengan kebutuhan

peserta didik. Media visual yaitu media yang bisa dipakai dalam proses belajar mengajar, terutama pada pembelajaran Pkn. Berdasarkan hasil wawancara tersebut terhadap informan, yaitu guru mata pelajaran Pkn dan siswa SMK Muhammadiyah 1 Ciputat.

Antusiasme siswa dalam pembelajaran adalah yang penting dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran Pkn, antusiasme siswa yang kurang dalam belajar Pkn dapat terjadi karena faktor lingkungan seperti kondisi kelas dan waktu pembelajaran dilaksanakan, untuk itu guru harus memiliki kreatifitas untuk membuat suasana baru agar belajar yang kondusif sehingga siswa antusias dalam belajar. Dengan mengemas pembelajaran dengan menarik agar siswa antusias untuk mengikuti pelajaran.

Pemakaian media begitu penting dalam proses pembelajaran PKn, peran penggunaan media visual dalam pembelajaran yaitu memberikan sebuah kesan nyata bagi siswa pada saat belajar. Media visual membantu guru dalam memberikan materi dalam pembelajaran dengan mudah di pahami. Hal tersebut sesuai dengan manfaat media visual itu sendiri yaitu, menarik perhatian siswa, memudahkan guru dalam memberikan materi, membuat semangat siswa untuk aktif, dan berakhir pada kualitas hasil belajar.

Media visual menumbuhkan keinginan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Pkn, dengan uraian yang konkrit yang terdapat pada media visual, dengan contoh yang nyata terhadap suatu materi yang dipelajari dalam Pkn, maka akan meningkatkan rasa keingin tahanan siswa terhadap pembelajaran PKn, dan siswa dapat lebih mudah diarahkan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa media visual memiliki sebuah peran untuk menumbuhkan keinginan belajar siswa dalam pembelajaran Pkn, memberikan motivasi agar aktif belajar, guru diberi kemudahan dalam menyampaikan materi dalam proses belajar. Pemilihan media yang tepat perlu di perhatikan oleh tenaga pendidik sehingga memberikan kesan positif terhadap peserta didik.

Simpulan

Antuusiasme siswa dalam belajar pada mata pelajaran Pkn di SMK Muhammadiyah masih memerlukan perhatian hal itu terjadi tak lepas dari kendala baik kondisi kelas serta situasi maupun waktu belajar yang membuat menurunnya antuusiasme siswa diantaranya adalah kebosanan siswa dalam belajar. Dalam hal ini guru harus bisa

mengendalikan kelas agar kondisi kelas selalu kembali kondusif dan siswa mampu belajar dengan konsentrasi, guru harus mampu membaca situasi dan kondisi kelas dengan baik.

Pemakaian media visual dalam pembelajaran PKn memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran, karena media visual yang menampilkan, gambaran materi yang real terhadap astusisme dipelajari oleh siswa di kelas tentunya sangat membantu dalam proses pembelajaran. pemakaian media visual sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu guru dan siswa dalam proses aktivitas pembelajaran. Media yang dipakai berupa power point dengan tampilan warna dan materi yang dikemas dengan menarik sehingga penggunaan media visual sudah terlaksana dengan baik.

Media visual dapat memberikan gambaran nyata suatu materi media visual bukan hanya tampilan teks, namun juga terdapat gambar, gerak dan animasi, hal ini memberikan kesan bagi siswa, sehingga media visual ini dapat membangkitkan keinginan siswa dalam belajar, dan perhatian siswa terpaku pada pembelajaran selain itu media visual juga lebih simpel dan mudah di pahami oleh siswa. Image mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang cenderung membosankan dapat teratasi dengan adanya penggunaan media visual ini.

Referensi

- Arsyad, Azhar. (2008). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asnawir, B. U., & Usman, M. B. (2002). *Media pembelajaran*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Cogan, J., & Derricott, R. (Eds.). (2014). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Routledge.
- Djamarah., & Zain. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gall, M. D., Borg, R. W., & Gall, P. J. (1996). *Educational research: An instruction*. New York, White Plains: Longman.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Kirk, J., Miller, M. L., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and validity in qualitative research* (Vol. 1). Sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Landasan Psikologi proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahab, Abdul Aziz., Sapriya. (2007). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2001). *Model-model pembelajaran inovatif*. Jakarta: PAU.

Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif

Reja Fahlevi ^{a, 1*}, Darul Huda Mustaqim ^{b, 2}

^a Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

¹ reja.fahlevi@ulm.ac.id*; ²zhudha27@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:

10-04-2020

Disetujui:

26-04-2020

Kata kunci:

Kolaborasi
Kabinet Zaken
Kabinet Koalisi
Kabinet Efektif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari formulasi kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi dalam rangka membentuk kabinet yang efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan mencari referensi teori yang relevan sesuai dengan kajian riset ini. Ada empat macam bentuk kolaborasi yang ditawarkan di dalam penelitian ini di antaranya; (1) harus ada kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi, (2) adanya pembagian kekuasaan atau *power sharing* yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli, (3) perlu penegasan Presiden kepada partai politik untuk memberikan kader terbaiknya yang memiliki keahlian dibidangnya untuk duduk sebagai menteri, (4) Kabinet Zaken bisa di pilih oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Jadi bentuk Kolaborasi (1) bisa diisi 50% dari kalangan ahli profesional (non parpol), 50% dari kalangan parpol. (2) bisa 30% dari kalangan ahli profesional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang sesuai bidang akademik dan kerjanya. (3) Pos-pos menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dijabat oleh menteri yang berasal dari kalangan ahli profesional non parpol.

ABSTRACT

Collaboration zaken cabinet and coalition cabinet in the formation of an effective cabinet. This research supports the search for collaboration formulations between the zaken cabinet and the coalition cabinet in an effective cabinet framework. The research method used in this study is a comparative method by finding relevant theory references in accordance with this research study. There are four types of collaboration offered in this study above (1) there must be agreement on a platform and a joint political agenda between the parties that are in the coalition, (2) there is a division of power or the division of power that is related freely received by each party coalition partners and experts, (3) the president must be affirmed for political parties to provide the best cadres who have expertise in their fields to sit as ministers, (4) the zaken cabinet can be chosen by the president opened by experts in their respective fields. So the Collaboration form (1) can be filled 50% from professional experts (non-political parties), 50% from political parties. (2) 30% can be from non-political professional experts, 70% from political parties that are suitable in the academic field and competition. (3) Ministerial posts discussing non political party profession experts.

Copyright © 2020 (Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim). All Rights Reserved

Keywords:

Collaboration
Zaken Cabinet
Coalition Cabinet
Effective Cabinet

How to Cite: Fahlevi, R., & Mustaqim, D.H. (2020). Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 48-54. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14939



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Sebuah organisasi di dalamnya merupakan kumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang disatukan karena memiliki visi dan misi yang sama. Di dalamnya perlu sinergi untuk semua organ-organ dalam mencapai visi dan misi organisasi tersebut.

Berhasil tidaknya sebuah organisasi itu tergantung dari beberapa faktor, di antaranya adalah pemimpin, anggota dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini organisasi itu kita bayangkan adalah sebuah negara (pemerintah). Dalam arti sempit yang disebut sebagai pemerintah ialah Presiden dan jajaran kabinetnya yang kemudian dikenal dengan lembaga Eksekutif. Presiden merupakan pemimpin organisasinya dan menteri kabinet ialah para pembantu atau anggotanya dalam organisasi itu. (Martini, 2015, hlm. 35).

Kabinet merupakan suatu badan yang terdiri dari para pejabat negara yang dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, yang merupakan bagian penting dari cabang Eksekutif. Kabinet juga bisa dikenal dengan istilah-istilah lain yakni Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, istilah itu tentu tergantung pada sistem pemerintahan yang dipakai suatu negara serta tergantung dari siapa yang menjadi kepala Eksekutif. Bisa presiden atau perdana menteri yang kedudukannya sebagai pimpinan Kabinet. Di beberapa negara, yang menggunakan sistem *Westminster*, kabinet secara kolektif menentukan kebijakan dan arah taktis pemerintah terkhusus mengenai legislasi yang disetujui parlemen. Di negara-negara yang berasas atau menganut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, kabinet memiliki fungsi sebagai dewan penasihat sekaligus yang membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam tataran ini, presiden memperoleh pendapat dan nasihat dari menteri untuk digunakan dalam menentukan keputusan di masa mendatang. Peran kedua pejabat yang masuk kabinet adalah untuk mengurus badan-badan atau departemen-departemen pemerintah di Amerika Serikat dikenal dengan departemen eksekutif federal. (Castelvecch, 2008, hlm. 231).

Banyak negara yang salah satunya adalah Negara yang menggunakan sistem *Westminster*, menteri-menteri kabinet yang berasal dari sebagian anggota legislator dan mereka tetap bekerja di legislator sambil bekerja pula di kabinet. Di dalam sistem presidensial, legislator yang ditunjuk untuk menjadi anggota kabinet

harus berhenti dari legislator bila mereka berkenan diangkat menjadi menteri. Selain itu oposisi juga hakikatnya boleh diangkat menjadi menteri. Namun ada beberapa hal yang menjadi persyaratan seperti anggota kabinet yang berasal dari oposisi juga tidak boleh merangkap sebagai legislator.

Jumlah menteri kabinet di setiap negara tentulah berbeda-beda, kendati biasanya jumlah menteri berkisar sepuluh sampai dua puluh menteri. Banyak penelitian menemukan bahwa korelasi antara tingkat pembangunan suatu negara dan ukuran kabinetnya. Hampir rata-rata negara yang lebih maju, ukuran kabinetnya lebih kecil. Di Indonesia dalam catatan historiografi sejarah bangsa Indonesia setidaknya sudah ada 40 Kabinet yang dibentuk sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Kabinet pertama dibentuk pada 2 September 1945.

Dalam kajian sejarah ketatanegaraan di Indonesia istilah kabinet zaken tentulah bukan hal yang asing. Hal ini dikarenakan ketika pada tanggal 25 Maret 1957 Presiden Soekarno menunjuk Soewirjo untuk membentuk kabinet baru yang diisi oleh para ahli yang berasal non partai politik namun berkali-kali gagal kabinet zaken ini dibentuk. Kemudian Soekarno memanggil Perdana Menteri Demisioner kala itu yakni Ali Sastroamijoyo untuk meminta pendapat mengenai format pemimpin dan yang mengisi kabinet Darurat Ekstraparlemeter ini. Akhirnya ditunjuklah Ir. Djuanda sebagai perdana menteri yang saat itu kabinet ini Darurat Ekstraparlemeter ini diberi nama Zaken Kabinet atau Kabinet Karya. (Aman, 2013, hlm. 84).

Dalam konteks ketatanegaraan hari ini, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Rina Martini mengenai persepsi mahasiswa terhadap profil kabinet didapat hasil bahwa 55% mayoritas mahasiswa Undip menilai kinerja kabinet kerja Jokowi kurang baik. (Martini, 2015, hlm. 41)

Hal ini didasarkan pada penilaian mahasiswa kabinet ini kurang keras bekerja banyak di isi oleh yang bukan berlatar sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian dalam melaksanakan perannya selalu berada di bawah tekanan reshuffle. Terlebih lagi banyaknya tekanan dari partai pendukung Presiden yang syarat muatan kepentingan politisnya.

Selain itu, di dalam kabinet koalisi biasanya munculnya potensi konflik dan benturan kepentingan partai, tidak jarang jabatan menteri yang diduduki politisi sering kali jadi sumber dana haram atau semacam ATM bagi partai. Pada gilirannya ini berpotensi melembagakan tindak

pidana suap, praktik korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara negara seperti masih marak terjadi dewasa ini dan bahkan banyaknya kesan bahwa banyaknya menteri titipan dari parpol pengusung yang menduduki posisi menteri. (Haris, 2011).

Dalam sistem pemerintahan Presidensial, pembentukan kabinet zaken yang berisi menteri non-parpol dan parpol diterapkan Indonesia. Sistem presidensial itu memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk menteri yang membantu dirinya dalam merealisasikan program-program. Karena dalam sistem presidensial Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan berdasarkan dukungan parpol di parlemen. (Harun, 2019, hlm. 4).

Sehingga Komposisi kabinet yang berbasis ahli dianggap sebagai pilihan ideal ketimbang berbasis partai politik karena kabinet ahli relatif bisa terhindar dari potensi politik kepentingan.

Hal ini dikarenakan, semenjak pemilu tahun 1971 belum pernah ada presiden yang terpilih melalui jalur non parpol. Karena secara konstitusional yang di atur dalam pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol dan gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Di sini dilematisnya posisi seorang presiden ketika dia terpilih menjadi kepala pemerintahan.

Selain itu, dalam sistem presidensial, posisi tawar Presiden sebagai mandat rakyat yang dipilih secara langsung sebenarnya membuat kekuasaan yang absolute dari presiden dalam menentukan pembantunya namun terbatasnya kekuasaan presiden tersebut karena masih ada posisi tawar parpol sebagai koalisi untuk menentukan kursi menteri dalam kabinet sehingga menjadikan presiden tersandera dalam posisi tawar politik. Dikarenakan presiden membutuhkan dukungan secara politik dari parpol di parlemen sehingga dengan demikian presiden menyandera dirinya dengan kepentingan parpol koalisi (Bhakti, 2008).

Maka dari itu hasil penelitian ini mencoba membuat formulasi kolaborasi komposisi kabinet antara ahli dan partai politik.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi komparatif dengan mencari referensi teori-teori dari aturan perundang-undangan dan pendapat

ahli yang relevan dari kajian riset ini. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan menelaah dan membandingkan dari beberapa teori dan pendapat dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumentasi, dan artikel. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif komparatif.

Metode analisis komparatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan fakta-fakta dan teori-teori mengenai komposisi menteri dinegara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial maupun semi-presidensial yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Hasil dan pembahasan

Komposisi Kabinet di Negara Presidensial dan Negara Semi Presidensial

Di setiap negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda maupun sama, jumlah dan bentuk komposisi kabinetnya berbeda-beda. Di dalam riset ini hanya dibatasi perbandingan dengan negara-negara yang hanya menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dan semi presidensial saja.

Amerika serikat (US) dalam kabinet yang disusun oleh Donald Trump yang merupakan rujukan dari sistem presidensial hanya memiliki 15 menteri yang didalamnya terdiri dari 10 yang berasal dari partai politik dan lima yang berlatar belakang profesional. (Pffner, 2017, hlm. 10).

Namun jika dicermati dari 10 menteri di Amerika serikat itu nampak delapan menteri merupakan orang yang sesuai bidang kepakarannya, artinya sebelum mereka diangkat menjadi menteri memang sudah pakar dibidangnya masing-masing.

Selain itu dinegara Irlandia mengenai jumlah komposisi menterinya juga hampir sama dengan Amerika Serikat 15 menteri, namun yang membedakannya di sini adalah di negara ini dikenal dengan istilah menteri pemerintah dan menteri junior yang bukan anggota pemerintah tapi memiliki tugas untuk membantu menteri pemerintah. (Barbier & Vercesi, 2013, hlm. 11).

Dari 15 menteri tersebut biasanya hanya ada satu sampai dua orang yang bukan dari menteri partai politik sisanya di isi oleh menteri yang berasal dari partai politik dan biasanya kebanyakan menteri junior berasal dari non parpol (Blondel, 1989).

Di Italia yang menggunakan sistem pemerintahan yang lain menteri negaranya terdiri dari 19 menteri 15 menteri yang berasal dari partai politik dan empat menteri yang berasal dari profesional atau non-parpol (Barbieri & Vercesi, 2013, hlm. 11).

Di Italia seorang menteri tanpa portofolio atau menteri yang tidak mengepalai suatu departemen atau kementerian yang statusnya hanya menjadi dewan tetap diberikan status yang tinggi kepada mereka atau setara dengan menteri pemerintahan. (Verzichelli & Cotta, 2001, hlm. 70).

Hal yang berbeda terdapat di dalam kabinet pemerintahan Argentina di mana komposisi kabinetnya pada umumnya diisi oleh menteri yang berasal dari partai politik. Namun jika sewaktu-waktu terjadi guncangan seperti krisis ekonomi kemudian diangkatlah dari kalangan profesional atau pakarnya bisa berasal dari parpol koalisi, oposisi atau non parpol.

Hal ini terjadi ketika saham negara anjlok Fernando de la Rúa bereaksi dengan menggantikan Menteri Ekonomi José Luis Machinea dengan Ricardo López Murphy, yang dipandang sebagai yang paling ortodoks para ekonom yang dekat dengan Tuan De la Rúa. Terlepas dari kepercayaannya, menteri baru gagal mendapatkan dukungan politik untuk rencana reformasinya dan dirinya sendiri segera digantikan oleh Domingo Cavallo, yang telah menjabat lima tahun sebagai Menteri Ekonomi di bawah Presiden Carlo sMenem. Yang terpenting, menteri baru tidak hanya memiliki keahlian yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki pendukung kuat di oposisi yang suaranya di kongres sangat penting dalam memberikannya yang luar biasa kekuatan untuk mereformasi ekonomi (Gallardo & Cecilia, 2014, hlm. 10).

Dalam pandangan penulis, ahli di sini memenuhi tiga aspek, antara lain profesional atau berkualitas, independen dan berintegritas. Profesional atau berkualitas yang dimaksud harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang linear dengan posisinya di kementerian. Independen berarti tidak terikat dengan parpol atau pihak lain. Itu perlu agar menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya.

Berintegritas berarti jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat serta patuh pada peraturan. Menteri mesti menjadi model yang baik bagi para bawahannya.

Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi

Melihat komposisi kabinet di negara-negara di atas yang hanya melibatkan sekitar 20% sampai 30% menteri yang berasal dari luar partai politik. Maka dalam mewujudkan kabinet efektif dirasa perlu adanya penguatan ahli atau pakar-pakar dalam pembentukan suatu kabinet. Bisa pakar yang berasal dari kalangan profesional non partai politik atau bisa para pakar (Ahli) yang berasal dari parpol untuk dikaborasikan sehingga terwujudlah kabinet yang efektif itu.

Kabinet yang efektif setidaknya terbangun dengan adanya solidaritas di antara para pembantu presiden atau perdana menteri. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya kabinet yang solid dan efektif, pertama, kapabilitas dari pembantu presiden, masyarakat tentu mengharapkn orang-orang yang berada di kabinet adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan mereka yang mampu bekerja nyata jauh dari intervensi seseorang maupun golongan.

Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa seorang presiden secara konstitusional juga terikat dengan partai politik pada saat proses pencalonan menjadi presiden. Sehingga tidak bisa terhindarkan terjadi kesepakatan-kesepakatan politik di antara calon presiden dan partai pengusungnya. (Azizi dkk, 2016, hlm. 10).

Bentuk kabinet Kolaborasi yang bisa penulis tawarkan ada empat macam bentuk, di antaranya: Pertama, harus adanya kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi. Kesepakatan platform politik saja tidak cukup untuk menjamin soliditas koalisi, karena perbedaan politik dalam tubuh koalisi justru sering muncul bukan karena perbedaan platform, melainkan karena perbedaan agenda politik dalam rangka merealisasikan platform.

Kedua, adanya pembagian kekuasaan atau *power sharing* yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli. Pembagian kekuasaan itu bukan saja lazim dalam koalisi dengan sistem presidensialisme multipartai, lebih dari itu merupakan konsekuensi logis atau kebutuhan untuk menciptakan koalisi yang solid. Banyak negara yang menganut presidensialisme dengan sistem multipartai,

pembagian kekuasaan di antara para anggota koalisi digunakan tolok ukur yang dianggap obyektif, seperti sistem skoring untuk jabatan-jabatan strategis pemerintahan yang didistribusikan secara proporsional dan adil kepada mitra-mitra koalisi.

Ketiga, Sistem presidensialisme multipartai erat kaitannya dengan koalisi yang beragam platform. Sehingga dalam penentuan platform, perlu penegasan Presiden sebagai pemegang mandat rakyat dalam memberi ruang kepada partai politik untuk memberikan kader terbaiknya yang memiliki keahlian dibidangnya untuk duduk sebagai menteri namun sebagai Presiden harus selektif dalam penentuan kabinetnya tanpa ada unsur paksaan dari Partai Politik maupun pihak lainnya.

Keempat, *zaken cabinet* (cabinet ahli) bisa di pilih oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing.

Hal ini didasarkan pada bahwa di dalam proses pembentukan kabinet sering kali ada menteri yang notabene adalah titipan dari partai politik. Presiden dalam hal ini memiliki kekuasaan prerogatif untuk membentuk pemerintahan dan berwenang mengangkat dan memberhentikan para menteri kabinet yang ia kehendaki.

Kabinet Zaken atau karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Juanda tidak ada unsur partai politik, kabinet ini dalam pendiriannya tidak diusung oleh partai politik. Walaupun ada beberapa menterinya yang berasal dari partai politik tetapi mereka bukan anggota aktif dari partai politik tersebut. (Aman, 2013, hlm. 80).

Kabinet zaken tidak mesti diisi para menteri ahli yang nonpartai politik. Sebab, pada intinya, zaken kabinet diisi oleh orang berdasarkan kompetensinya. Zaken kabinet akan lebih menguntungkan buat rakyat Indonesia ketimbang kabinet berbasis politik. Peralnya, yang selalu dikhawatirkan dari kabinet berbasis politik adalah adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus melayani publik, di sisi lain juga harus melayani partainya. (Yuda, 2010).

Dalam pandangan penulis, ahli di sini memenuhi tiga aspek, antara lain profesional atau berkualitas, independen dan berintegritas. Profesional atau berkualitas yang dimaksud harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang linear dengan posisinya di kementerian. Independen berarti tidak terikat dengan parpol atau pihak lain. Itu perlu agar

menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya. Berintegritas berarti jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat serta patuh pada peraturan. Menteri mesti menjadi model yang baik bagi para bawahannya.

Dengan kolaborasi ini juga berfungsi untuk menjembatani antara partai politik yang berkoalisi dengan partai oposisi. Bisa saja Presiden dengan hak prerogatifnya mengangkat menteri negara dari partai oposisi hanya Karen yang bersangkutan merupakan pakar di bidangnya. (Atmojo, 2016, 286).

Pembentukan kabinet yang berisi menteri nonparpol pun tidak terbilang mustahil. Justru sistem presidensial yang diterapkan Indonesia cocok dengan itu. Sistem presidensial itu memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk menteri yang membantu dirinya dalam merealisasikan program-program. Presiden Indonesia dipilih oleh masyarakat secara langsung, bukan berdasarkan dukungan parpol di parlemen. Parpol tidak bisa menuntut sesuatu kepada presiden dengan memaksa. Meski parpol yang bersangkutan berjasa memenangkan presiden dalam pilpres, jasanya itu tidak bisa diidentifikasi secara mutlak. Dan secara kalkulasi, kemenangan presiden di pilpres tidak bisa dihitung seberapa besar andil suatu partai dalam menyumbangkan perolehan suara (Assidiqie, 2012, hlm. 15).

Para pakar akademisi merupakan rujukan yang representatif dalam rangka mengisi formasi-formasi untuk ahli. Dalam era reformasi sekarang ini terjadi 31,9% Kabinet negara diisi oleh para ahli yang berlatar belakang akademisi, namun penempatan para akademisi di pemerintahan masih dirasa tidak begitu efektif setelah reformasi (Wicaksono, 2019).

Selain itu, kalangan menteri yang berlatar belakang dari kalangan profesional (Non parpol) hendaknya ditempatkan pada pos-pos di bidang kementerian yang menguasai jahat hidup orang banyak, misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian kesehatan, Kementerian sosial, dan kementerian keuangan. atau bisa saja post-post menteri tersebut diisi oleh orang-orang parpol atau politik yang memang berkompeten sesuai bidang akademiknya. (Sulistiyono, 2011).

Zaken kabinet cocok jika dibentuk di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Motifnya kurang lebih sama dengan pembentukan kabinet nonparpol. Presiden tidak terlalu terikat dengan parpol di parlemen. Dengan

kata lain, presiden tidak bisa dilengserkan meski hanya mendapat dukungan minoritas di parlemen. Zaken kabinet sendiri menghendaki menteri-parpol atau dari parpol.

Kabinet yang di dalamnya di dominasi oleh kalangan Profesional atau berkualitas yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman linear dengan posisinya di kementerian sangat mempengaruhi kinerja pemerintah ke depannya. Hal ini diperlukan agar menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya. Secara profesional dan mandiri akan membuat kabinet menjadi berintegritas dan jujur serta mengutamakan kepentingan rakyat.

Simpulan

Formulasi bentuk Kolaborasi kabinet zaken dan koalisi dalam rangka untuk memebentuk kabinet yang efektif bisa dilakukan dengan tiga opsi: (1) cara mengisi secara 50:50, 50% dari kalangan ahli profesional (non parpol), 50% dari kalangan parpol. (2), bisa 30% dari kalangan ahli profesional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang sesuai bidang akademik dan kerjanya. (3), posisi-posisi menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dijabat oleh menteri yang berasal dari kalangan ahli profesional non parpol.

Referensi

- Admojo, T. (2016). Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014. *Jurnal Politik*, 1(2), 283-315.
- Aman, F. P. (2013). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959. *SOCLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).
- Asshiddiqie, J. (2012). *Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan*. Disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta.
- Azizi, I. A., Khomarudin, S., Mubdi, U., & Sudirman, A. (2016). Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-jk. *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 3(1), 1-14.
- Barbieri, C., & Vercesi, M. (2013). The cabinet: a viable definition and its

composition in view of a comparative analysis. *Government and Opposition*, 48(4), 526-547.

- Bhakti, N. I. (2008). Konsep Pemerintahan Koalisi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta
- Blondel, J. (1989). Decisioni di governo e vincoli partitici. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 19(2), 199-222.
- Castelvecchi, Davide. (2008). "The Undeciders: More decision-makers bring less efficien. Science News. USA.
- Cotta, M., & Verzichelli, L. (1996). *Italy: From Constrained Coalitions to Alternating Governments?*. Dip. di Scienze storiche giuridiche politiche e sociali.
- Hanta Yuda A. R. (2010). *Presidensialisme setengah hati: dari dilema ke kompromi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsudin. (2019). Kabinet Ahli atau Politik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Jakarta.
- Harun, Refly. (2019). Urgensi Zaken Kabinet di Rezim Koalisi Gemuk Jokowi. CNN Indonesia. Jakarta.
- Martínez-Gallardo, C. (2014). Designing cabinets: Presidential politics and ministerial instability. *Journal of Politics in Latin America*, 6(2), 3-38.
- Martini, R. (2017). Persepsi Mahasiswa FISIP Undip Terhadap Profil Kabinet Kerja Jokowi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 34-44.
- Pffner, J. P. (2017). The unusual presidency of Donald Trump. *Political Insight*, 8(2), 9-11. DOI: 10.1177/2041905817726890
- Soemantri, Sri..(2014) . *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyo, Hermawan. (2011). Kabinet Pasca Reshuffle. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Wicaksono, Aries. (2019). Mengapa peran akademisi dikabinet menjadi tidak

selektif sejak era reformasi.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yuda, Hanta. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati – dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia.

Zen RS. (2016). Serba–Serbi Sejarah Kabinet di Indonesia. Tirta.id. (Diakses 18 April 2020) <https://tirta.id/serba-serbi-sejarah-kabinet-di-indonesia-bwmt>